

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU  
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

1.1            Gambaran Umum Kondisi Daerah

1.1.1 Aspek Geografi

1.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a.    Luas dan Batas Wilayah administrasi

Wilayah Kabupaten Boyolali kurang lebih 101.510,10 hektar yang membentang dari Barat-Timur sejauh 48 km dan Utara-Selatan sejauh 54 km, yang secara administratif dibagi menjadi 19 (sembilan belas) kecamatan terdiri 261 (dua ratus enam puluh satu) desa dan 6 (enam) kelurahan.

b.    Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Boyolali terletak pada posisi geografis antara 110<sup>0</sup>22'-110<sup>0</sup>50' Bujur Timur dan antara 7<sup>0</sup>7' - 7<sup>0</sup>36' Lintang Selatan. Posisi geografis wilayah Kabupaten Boyolali merupakan kekuatan yang dapat dijadikan sebagai modal pembangunan daerah karena berada pada segitiga emas wilayah Yogyakarta-Solo-Semarang (Joglosemar). Di samping itu, seiring dengan mulai pembangunan jalan tol Solo-Semarang yang melintasi wilayah Kabupaten Boyolali, maka diharapkan potensi pengembangan Kabupaten Boyolali, terutama dalam sektor perekonomian dan industri menjadi sangat besar.

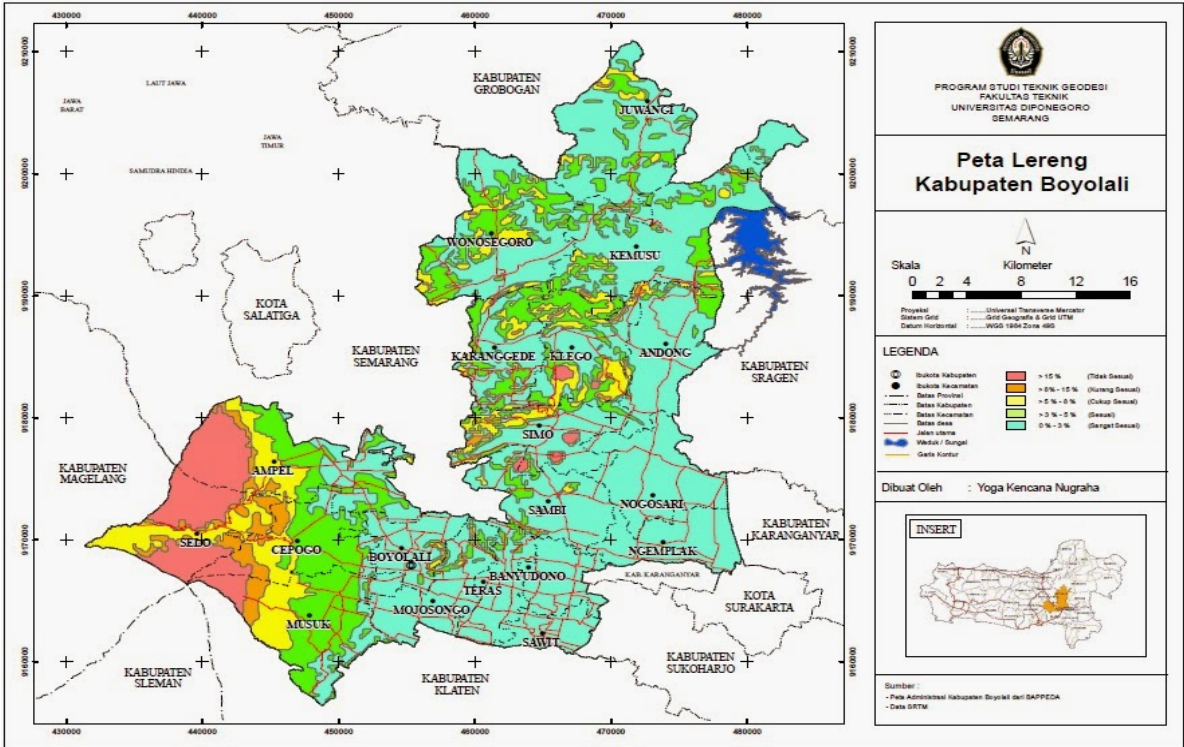
c.    Topografi

Topografi wilayah Kabupaten Boyolali secara umum dibagi menjadi beberapa wilayah berdasar ketinggian dari permukaan laut (dpl), sebagai berikut:

Tabel II.1  
Topografi wilayah Kabupaten Boyolali  
Berdasarkan Ketinggian

No	Ketinggian (Mdpl)	Lokasi (Kecamatan)
1	75 – 400	Kecamatan Teras, Banyudono, Sawit, Mojosongo, Ngemplak, Simo, Nogosari, Kemusu, Karanggede, dan sebagian Boyolali
2	400 – 700	Kecamatan Boyolali, Musuk, Mojosongo, Cepogo, Ampel, dan Karanggede
3	700 - 1.000	Kecamatan Musuk, Ampel, dan Cepogo

4	1.000 - 1.300	Kecamatan Cepogo, Ampel, dan Selo
5	1.300 - 1.500	Kecamatan Selo



Gambar II. 1 Peta Lereng Kabupaten Boyolali

d. Geologi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Boyolali adalah dataran rendah dan dataran bergelombang dengan perbukitan yang tidak begitu terjal. Kabupaten Boyolali secara umum termasuk bagian lereng gunung api kuarter Gunung Merbabu dan Gunung Merapi. Sedangkan di bagian utara terdapat waduk Kedungombo. Secara umum topografi tinggi terletak di wilayah barat mulai dari Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, Kecamatan Musuk yang merupakan kaki lereng Gunung Merapi dan Kecamatan Ampel yang merupakan lereng Gunung Merbabu. Kemudian secara

berangsur semakin bertopografi rendah ke arah timur Kecamatan Teras dan ke arah timur laut Kecamatan Simo.

1. Struktur Tanah

Jenis tanah yang ada di Kabupaten Boyolali sebagai berikut:

Tabel II.2  
Jenis tanah di Kabupaten Boyolali

No	Jenis Tanah	Lokasi (Kecamatan)
1	Asosiasi litosol dan grumosol	Kecamatan Kemusu, Klego, Andong, Karanggede, Wonosegoro dan Juwangi.
2	Litosol cokelat	Kecamatan Cepogo, Ampel dan Selo.
3	Regosol kelabu	Kecamatan Cepogo, Ampel, Boyolali, Mojosongo, Banyudono, Teras dan Sawit.
4	Regosol cokelat	Kecamatan Cepogo, Musuk, Mojosongo, Teras, Sawit dan Banyudono.
5	Andosol cokelat	Kecamatan Cepogo, Ampel dan Selo.
6	Kompleks regosol kelabu dan grumosol	Kecamatan Kemusu, Wonosegoro dan Juwangi.
7	Grumosol kelabu tua dan litosol	Kecamatan Simo, Sambu, Nogosari, dan Ngemplak.
8	Kompleks andosol kelabu tua dan litosol	Kecamatan Cepogo, Ampel dan Selo.
9	Asosiasi grumosol kelabu tua dan litosol	Kecamatan Simo, Sambu, Nogosari dan Ngemplak.
10	Mediterranean cokelat tua	Kecamatan Kemusu, Klego, Andong, Karanggede, Wonosegoro, Simo, Nogosari, Ngemplak, Mojosongo, Sambu, Teras dan Banyudono.

Sumber: DPU dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali

2. Hidrologi

Potensi Hidrologi yang dimiliki Kabupaten Boyolali dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, irigasi maupun kepentingan lainnya, baik alami maupun buatan. Kondisi hidrologi di Kabupaten Boyolali sangat bervariasi antara satu tempat dengan tempat yang lain. Beberapa faktor penyebabnya antara lain adalah perubahan iklim, topografi, dan struktur

geologi. Keadaan hidrologi tersebut secara terinci terlihat pada tabel berikut:

Tabel II.3  
Rata-Rata Debit Pada Waduk Di Kabupaten Boyolali

No	Nama/Lokasi	Luas(Ha)	Volume(m <sup>3</sup> )
I.	Waduk Cengklik	336	8.525.200 381.354
a.	Ds.Senting Kec.Sambi		
b.	Ds.Ngargorejo Ds.Sobokerto Kec. Ngemplak		
II. a.	Waduk Bade Ds.Bade Ds.Klego Ds.Blumbang Kec.Klego	56,34	1.900.000

Sumber: DPU dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali

a) Sungai

Tabel II.4  
Daftar Sungai Beserta Panjang  
dan Debitnya di Kabupaten Boyolali

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Debit Air (m3/dtk)
1	Serang	15	6.844/0.441
2	Pepe	11.5	24.346/11179
3	Irang Grenjeng	4.8	0.830
4	Kapuk	3.7	0.660
5	Wates	5.1	0.760
6	Gondang	5.4	0.340
7	Rejoso	5.1	0.286
8	Bogo	4	1.800
9	Nongko	7.4	0.530
10	Pule	8	3.698
11	Sombo	7.6	1.639
12	Luwuk	6.5	0.320
13	Gandul	28.5	7.128/6.960
14	Palang	4.2	0.150
15	Klumpit	7.9	-
16	Mati	7.3	-
17	Tambakan	7.2	-
18	Mojolegi	2.6	-
19	Kedungmangir	6.3	-
20	Selo	5.3	-

No	Nama Sungai	Paniang (Km)	Debit Air (m <sup>3</sup> /dt)
21	Makasih	8.7	0.050
22	Bodeh	1.9	0.050
23	Klampok	3.9	0.050
24	Grenjengan	1.9	0.050
25	Jengglong	6.2	0.180
26	Bendungan	9.7	0.130
27	Timo	4	1.100
28	Bagor	7	1.100
29	Bedoyo	17.3	1.100
30	Dungguyangan	6.6	1.100
31	Dungori	1	1.100
32	Lunyu	6	1.100
33	Kedungrong	12.2	0.075
34	Sranten	3.1	0.075
35	Bengle	11.6	0.180
36	Pringapus	7.7	0.070
37	Kedungbendo	4.4	1.012
38	Gebang	4.3	11.651
39	Nanas	4.3	-
40	Jowo	9.3	-
41	Cemoro	16.3	4.485/0.154

Sumber data: DPU dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali

b) Mata air/Danau/Waduk/Situ/Embung

Tabel II.5  
Daftar Mata Air Kabupaten Boyolali

No	Nama Mata Air	Lokasi		Luas Area Oncoran (Ha)	Debit Sumber (Lt/dt)
		Desa	Kecamatan		
1.	Bantengan	Bentengan	Karanggede	11.30	15
2.	Pinggir	Pinggir	Karanggede	11.00	15
3.	Klego	Klego	Klego	12.00	15
4.	Tanjung	Tanjung	Klego	11.00	15
5.	Sangge	Sangge	Klego	15.00	5
6.	Kedung	Kd.Lengkong	Simo	11.00	15
7.	Sirah	Gunung	Simo	11.00	8
8.	Tlatar	Kebonbimo	Boyolali	14.30	294
9.	Ketingan	Mudal	Boyolali	10.00	4
10.	Sililin/Tlogo	Kiringan	Boyolali	7.00	21
11.	Blimbing	Manggis	Mojosongo	379.90	10
12.	Karangandong	Metuk	Mojosongo	32.30	28
13.	Pulerejo	Jurug	Mojosongo	4.50	2
14.	Gendol	Tambak	Mojosongo	14.00	13
15.	Tawangsari	Dlingo	Mojosongo	5.30	6
16.	Kenteng	CepokoSawit	Sawit	25.30	15

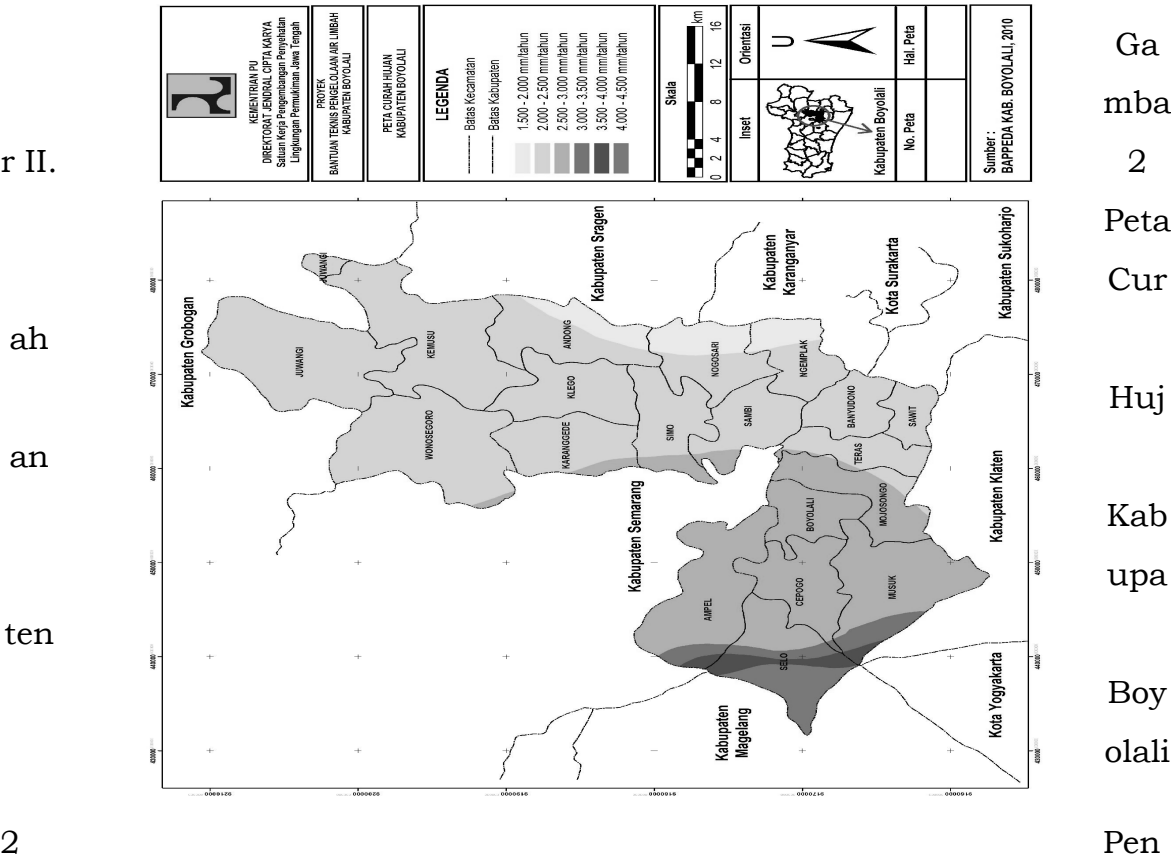
17.	CepokoSawit	CepokoSawit	Sawit	24.60	25
18.	Gomban Tan	CepokoSawit	Sawit	4.60	10
19.	Nledok	CepokoSawit	Sawit	37.65	20
20.	Kebatan	Jenengan	Sawit	15.20	68
21.	Soka	Jenengan	Sawit	81.10	10
22.	Gombang	Gombang	Sawit	23.00	60
23.	Mungup	Kemasan	Sawit	23.81	15
24.	Lajan	Kemasan	Sawit	118.60	10
25.	Langse	Nepen	Teras	293.20	152
26.	Manggis	Nepen	Teras	429.98	267
27.	Rembang	Nepen	Teras	57.60	493
28.	Bon Siji	Dukuh	Banyudono	55.80	150
29.	Dahar	Dukuh	Banyudono	40.00	45
30.	Temanten	Dukuh	Banyudono	12.20	52
31.	Tirtomoyo	Dukuh	Banyudono	72.10	23
32.	Sidomulyo	Cangkringan	Banyudono	117.10	136
33.	Sungsang	Bendan	Banyudono	14.00	334
34.	Ngrancah	Urut Sewu	Ampel	15.00	10
35.	Ngreco	Selodoko	Ampel	7.00	8
36.	Jambe	Gondang Slamet	Ampel	15.00	4
37.	Mliwis	Mliwis	Cepogo		12

Sumber: DPU dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali

Tabel II.6  
Daftar Waduk/Embung Kabupaten Boyolali

No.	Nama Waduk/ Embung	Luas(Ha)	Volume (m <sup>3</sup> )	Lokasi (Kecamatan)
1	Waduk Kedung Ombo	3.536	723.000.000	Kemusu
2	Waduk Cengklik	336	9.299.240	Sambi dan Ngemplak
3	Waduk Bade	80	2.844.400	Klego
4	Embung Karanganyar			Musuk
5	Embung Mliwis	0,35	7.680	Cepogo
6	Embung Juwangi	0,125	180	Juwangi
7	Embung Kalangan	0,8	8.050	Klego
8	Embung Kendel	1	10.000	Kemusu
9	Embung Jagir	0,154	4.786,15	Musuk
10	Embung Musuk			Musuk
11	Embung Lampar	0,146	4.391,10	Musuk
12	Embung Kembang Kuning	0,140	4.205,12	Cepogo
13	Embung Cepogo	0,253	7.594,12	Cepogo
14	Embung Cepokosawit	0,163	4.227,00	Sawit
15	Embung Jenengan	0,167	4.236,00	Sawit
16	Embung Sempu	0,338	9.126,74	Andong
17	Embung Sangup	0,166	4.877,25	Musuk
18	Embung Lanjaran	0,304	8.154,00	Musuk
19	Embung Dragan	0,240	6.372,00	Musuk
20	Embung Cluntang	0,129	3.865,50	Musuk
21	Embung Sumur	0,220	4.974,54	Musuk

Klimatologi  
Kabupaten Boyolali mempunyai curah hujan yang tinggi dan memiliki sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas masyarakatnya, termasuk iklim tropis dengan rata-rata curah hujan sekitar 2000 milimeter/Tahun.



ggunaan Lahan

Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 seluas 101.510,19 ha, sebagian besar (77,63%) merupakan lahan kering baik berupa tegalan, pekarangan, maupun hutan dan sisanya berupa sawah, waduk/kolam, dan lahan lainnya. Wilayah yang memiliki lahan kritis dan lahan kering meliputi Kecamatan Sambi, Simo, Nogosari, Andong, Klego, Karanggede, Wonosegoro, Kemusu, dan Juwangi. Kondisi tersebut kurang menguntungkan pengembangan pertanian dan upaya pemasaran dalam menarik investor. Sementara itu wilayah Kecamatan Selo, Cepogo, Ampel, dan Musuk beriklim cukup sejuk mendukung untuk pengembangan budidaya peternakan sapi dan hortikultura.

Penggunaan lahan secara lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.7  
Penggunaan Lahan Pertanian  
Kabupaten Boyolali Tahun 2012-2016

No	Penggunaan Lahan	2012		2013		2014		2015		2016	
		Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
1.	Lahan Sawah	22.830	22	22.711	22	22.710	22	23.824	23	22.711	22
	a. Irigasi Teknis	5.146,35	5	5.074,25	5	5.074	5	7.465	7	5.074	5
	b. Irigasi Setengah Teknis	4.850,55	5	4.852,75	5	4.852	5	4.927	5	4.853	5
	c. Irigasi Sederhana	2.668,34	3	2.665,34	3	2.665	3	2.007	2	2.665	3
	d. Tadah Hujan	10.165,57	10	10.118,80	10	10.118	10	9.425	9	10.119	10
2.	Tanah Kering	78.679,36	78	78.800,03	78	78.800	78	77.676	77	78.801	78
	a. Pekarangan/ Bangunan	25.329,09	25	25.271,61	25	25.280	25	25.290	25	25.280	25
	b. Tegal/ Kebun	30.480,77	30	30.479,77	30	30.471	30	30.466	30	30.471	30
	c. Padang Gembala	983,33	1	983,33	1	983	1	982,67	1	983	1
	d. Tambak/ Kolam	821,09	1	820,45	1	820	1	819,51	1	820	1
	e. Hutan Negara	14.835,49	15	14.835,49	15	14.835	15	14.835	15	14.835	15
	f. Perkebunan Negara/Swasta	-		-		-				-	-
	g. Lainnya	6.229,37	6	6.409,93	6	6.409	6	5.283	5	6.410	6
	JUMLAH :	101.510	100	101.510	100	101.510	100	101.510	100	101.510	100

Sumber data: Statistik Pertanian Tahun 2016

### c)1.13 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Boyolali sangat bervariasi meliputi sektor pertanian, industri, jasa serta pariwisata. Pengembangan potensi wilayah di Kabupaten Boyolali dilaksanakan berdasar potensi komoditas unggulan, kondisi sosial, ekonomi serta pengaturan pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali. Penetapan kawasan pada RTRW Kabupaten Boyolali dititikberatkan pada usaha untuk memberikan arahan pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan potensi sumberdaya yang ada dengan memperhatikan optimasi pemanfaatannya.

Kriteria untuk mendefinisikan kawasan/sub kawasan budidaya secara umum lebih didasarkan pada faktor kesesuaian lahan. Dilihat dari kriterianya, pada dasarnya terdapat wilayah yang dapat saja memenuhi kriteria untuk pengembangan beberapa jenis kegiatan budidaya (misalnya pertanian tanaman pangan lahan basah,



pertanian tanaman pangan lahan kering dan pertanian tanaman Tahunan/perkebunan lahan kering).

Hal ini berarti penggarisannya di atas peta akan menjadi tumpang tindih. Dengan demikian, pengalokasian ruangnya disamping didasarkan pada kesesuaian lahan juga mempertimbangkan aspek ekonomis serta kebijaksanaan secara nasional atau daerah bagi prioritasnya.

Arahan Pengelolaan kawasan budidaya bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya serta untuk pemenuhan kebutuhan akan ruang budidaya, menghindari konflik pemanfaatan ruang, dan kelestarian lingkungan hidup.

Sedangkan sasaran yang diinginkan dari pengelolaan kawasan budidaya adalah:

- a) Terselenggaranya pemanfaatan ruang dan sumberdaya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
- b) Pemenuhan kebutuhan akan ruang budidaya yang sesuai kriteria/standar ruang masing-masing sektoral; dan
- c) Terhindarnya konflik pemanfaatan sumberdaya dengan pengertian pemanfaatan ruang yang berdasarkan pada prioritas pemanfaatan bagi kegiatan yang memberikan keuntungan terbesar pada masyarakat.

Kawasan budidaya yang dikelola pemanfaatan ruangnya terdiri dari:

- 1) Kawasan peruntukan hutan produksi

Kawasan budidaya hutan produksi, meliputi hutan produksi tetap seluas kurang lebih 12.461 hektar (Kecamatan Karanggede, Klego, Kemusu, Wonosegoro dan Juwangi) dan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 1.204 hektar (Kecamatan Klego, Kemusu, dan Juwangi).

- 2) Kawasan peruntukan hutan rakyat

Kawasan hutan rakyat terdapat di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Boyolali, seluas kurang lebih 19.993 hektar.

- 3) Kawasan peruntukan pertanian

Potensi kawasan peruntukan pertanian lahan basah seluas kurang lebih 22.711 hektar, sedang target yang akan dicapai yaitu sebagai berikut:

Tabel II.8  
Luas Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah  
Kabupaten Boyolali Tahun 2015

No.	Kecamatan	Jumlah (Ha)
1.	Selo	35,40
2.	Ampel	571,06
3.	Cepogo	55,80
4.	Boyolali	294,60
5.	Mojosongo	942,75
6.	Teras	1.423,03
7.	Sawit	1.275,25
8.	Banyudono	1.510,08
9.	Sambi	2.204,95
10.	Ngemplak	1.403,48
11.	Nogosari	2.479,83
12.	Simo	2.117,80
13.	Karanggede	1.682,34
14.	Klego	1.568,10
15.	Andong	2.228,72
16.	Kemusu	652,43
17.	Wonosegoro	1.883,84
18.	Juwangi	380,70
Jumlah		22.710,16

*Sumber Data: Boyolali Dalam Angka 2015*

Potensi kawasan pertanian lahan kering dibedakan ke dalam kawasan tegalan seluas kurang lebih 30.471 hektar tersebar di 19 (sembilan belas) kecamatan. Lokasi kawasan pertanian hortikultura yang berada di Kecamatan Selo, Ampel, Cepogo, Musuk, Boyolali, Mojosongo, Teras, Sawit, Banyudono, Sambi, Ngemplak, Nogosari, Simo, Karanggede, Klego, Andong, Kemusu dan Wonosegoro.

#### 4) Kawasan peruntukan perikanan

Peruntukan perikanan budidaya perkolaman berada di seluruh kecamatan. Peruntukan perikanan budidaya karamba meliputi: Kecamatan Sambi, Ngemplak, Kemusu dan Juwangi.

Peruntukan perikanan tangkap di perairan umum meliputi: Kecamatan Sambu, Ngemplak, Klego, Kemusu, Juwangi. Peruntukan minapolitan terdiri atas: Kawasan inti minapolitan seluas kurang lebih 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar meliputi: Kecamatan Teras, Sawit, dan Banyudono. Sedangkan penyangga minapolitan meliputi selain ketiga kecamatan tersebut. Rencana pengembangan jaringan perikanan berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT)–Balai Benih Ikan (BBI) yaitu Balai Benih Ikan (BBI) Tlatar dan Bangak.

5) Kawasan peruntukan pertambangan

Rencana kawasan pertambangan belum bisa direncanakan, tetapi langkahnya adalah: Menetapkan kawasan peruntukan pertambangan atau dapat diartikan sebagai wilayah yang berpotensi pertambangan, Investarisasi bahan tambang bernilai tinggi yang indikasinya telah ada dan Ekplorasi kekayaan tambang dan mineral dengan persiapan studi kelayakan, rencana tindak dan sistem kerjasama yang akan dikembangkan.

6) Kawasan peruntukan industri

Kawasan peruntukan industri besar terdiri atas jenis industri permesinan, listrik, tekstil, alat angkutan, makanan, galian bukan logam, industri kayu, dan industri sejenis lainnya seluas kurang lebih 1.176 (seribu seratus tujuh puluh enam) hektar meliputi: Kecamatan Ampel, Kecamatan Cepogo, Kecamatan Mojosoongo, Kecamatan Teras, Kecamatan Sambu, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Nogosari, Kecamatan Karanggede, Kecamatan Klego, Kecamatan Kemusu, Kecamatan Wonosegoro, Kecamatan Kecamatan Juwangi. Kawasan peruntukan industri menengah terdiri atas jenis industri pertanian, kertas, industri kayu, penerbit, percetakan, pakaian jadi dan industri sejenis lainnya seluas kurang lebih 444 (empat ratus empat puluh empat) hektar meliputi 18 (delapan belas) kecamatan.

7) Kawasan peruntukan pariwisata

Kawasan wisata alam terdiri atas: Air Terjun Kedung Kayang berada di Kecamatan Selo, Sumber Sipendok berada di Kecamatan

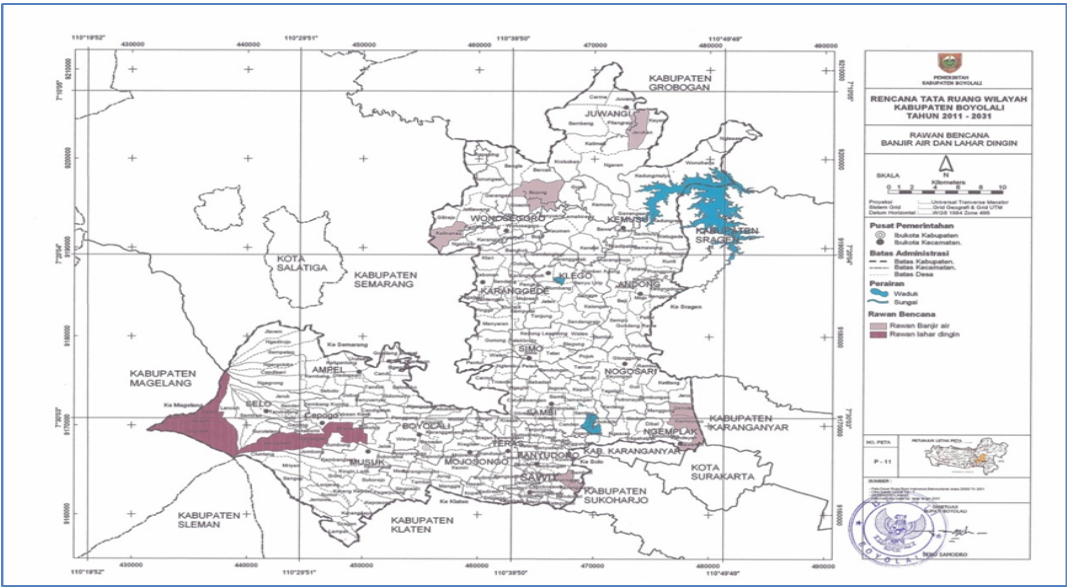
Ampel. Agrowisata Sapi Perah berada di Kecamatan Cepogo; Kawasan Wisata Arga Merapi-Merbabu dan lain-lain. Kawasan wisata religi terdiri atas: Makam Ki Ageng Kebo Kanigoro berada di Kecamatan Selo, Makam Ki Ageng Pantaran berada di Kecamatan Ampel. Kawasan wisata budaya terdiri atas: Kesenian tradisional dan upacara tradisional berada di Kecamatan Selo, Wayang berada di Kecamatan Sawit, Upacara tradisional berada di Kecamatan Banyudono dan lain-lain. Kawasan wisata rekreasi terdapat di kawasan wisata: Pesanggrahan Paras berada di Kecamatan Cepogo, Waduk Cengklik berada di Kecamatan Ngemplak, Waduk Kedungombo berada di Kecamatan Kemusu dan lain-lain.

8) Kawasan peruntukan permukiman

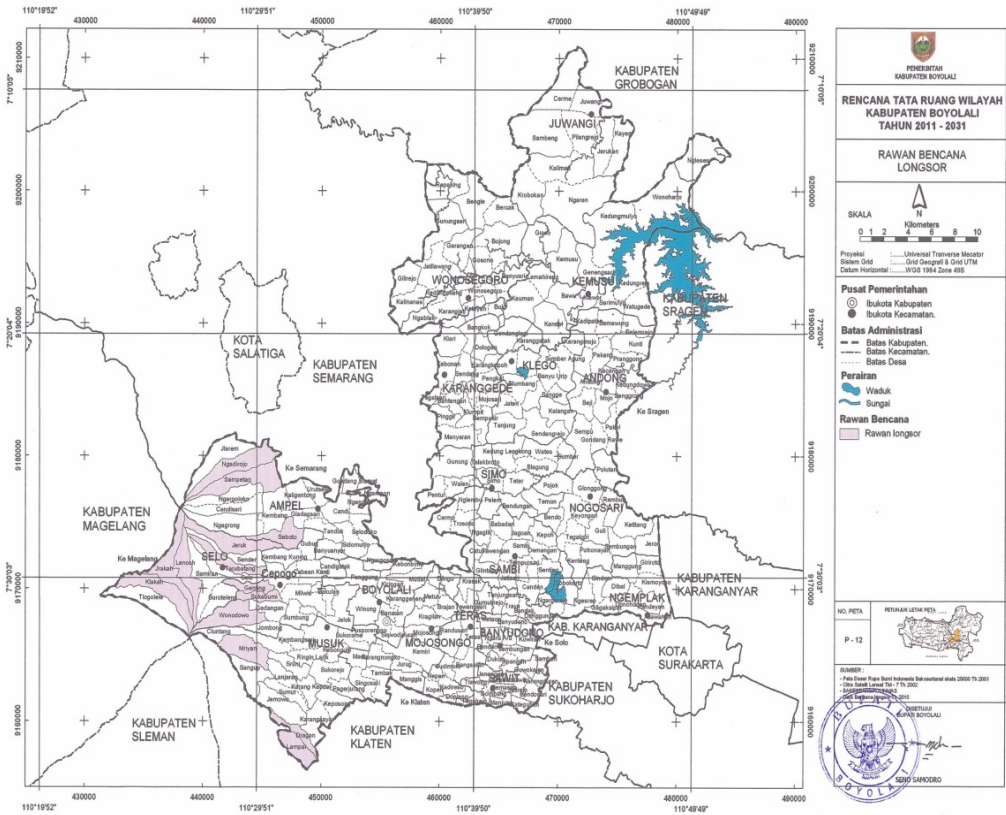
Permukiman Kota, yaitu Kawasan permukiman kota mencakup wilayah pengembangan kota untuk ibukota Kabupaten dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) baik yang telah mempunyai RUTRK maupun belum). Kebijakan pemanfaatan ruangnya didasarkan pada tujuan pengembangan sarana prasarana penunjangnya yang meliputi : penataan ruang kota yang mencakup penyusunan dan peninjauan kembali (evaluasi, revisi) rencana tata ruang kota.

Permukiman Perdesaan, yaitu Kebijakan pemanfaatan ruang Permukiman Perdesaan didasarkan pada tujuan untuk mengembangkan kawasan permukiman yang terkait dengan kegiatan budidaya pertanian yang meliputi pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan yang terdapat dalam Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D). Sedangkan, permukiman pedesaan di luar KTP2D mencakup perkampungan yang ada dan arahan bagi perluasannya.

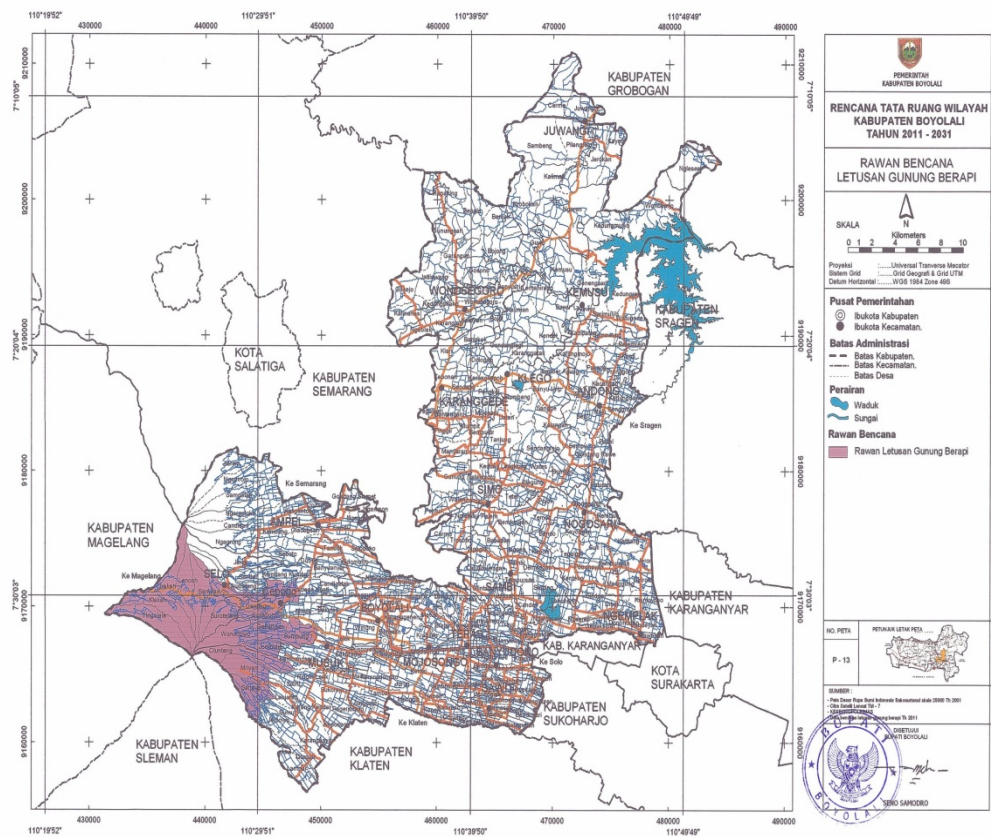
8)1.14 Kawasan Rawan Bencana



Gambar II.3 Peta Rawan Bencana Banjir Air dan Lahar Dingin (PetaSumber data: RTRW Kab. BoyolaliTahun 2011-2031)

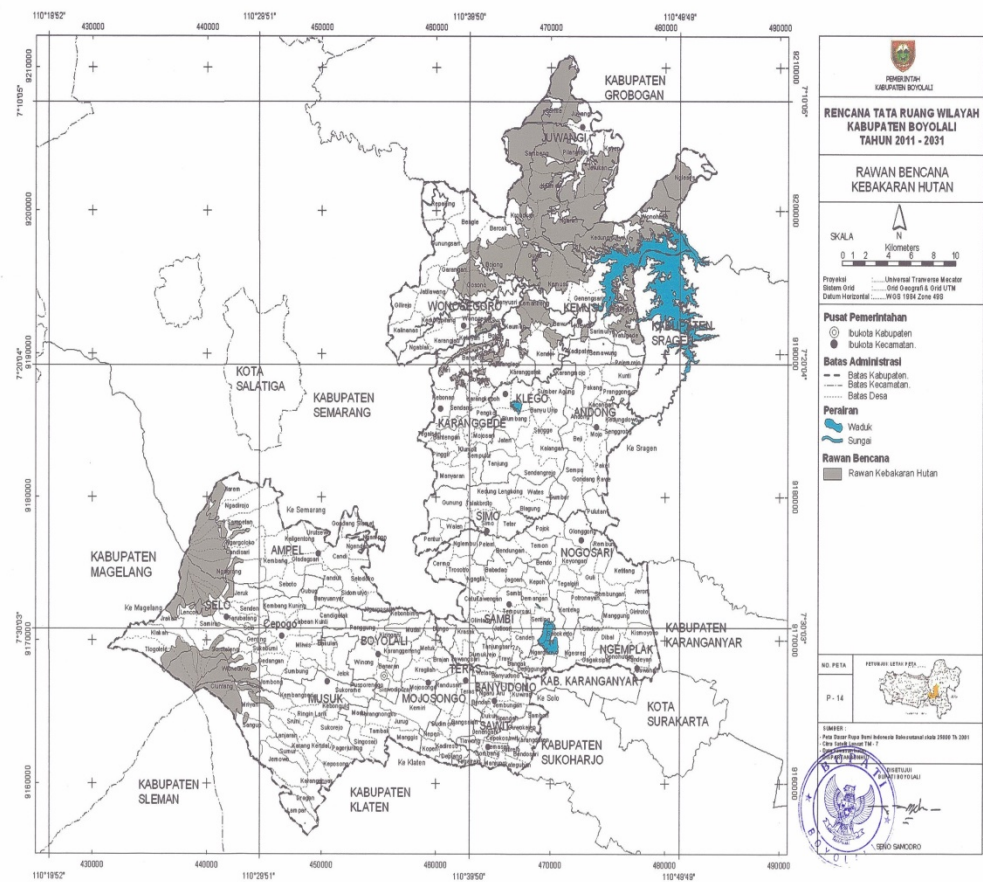


GGambar II.4 Peta Rawan Bencana Longsor  
(Peta Sumber data: RTRW Kab. Boyolali Tahun 2011-2031)

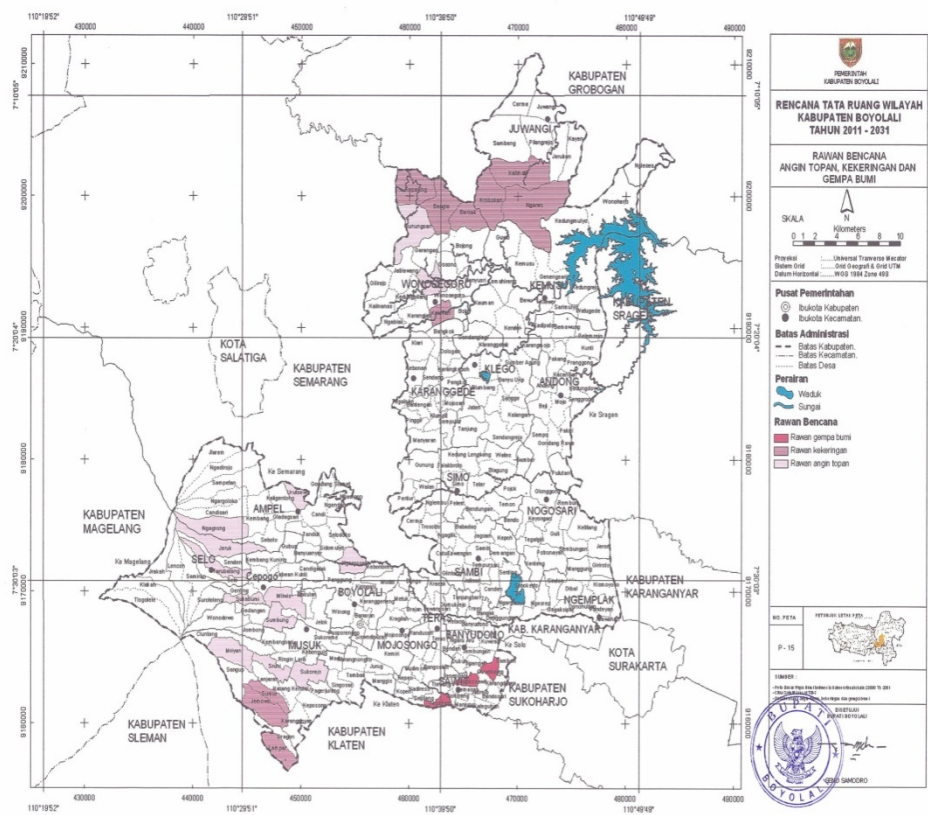


Gambar II.5 Peta Rawan Bencana Letusan Gunung Berapi  
(Peta Sumber data: RTRW Kab. Boyolali Tahun 2011-2031)





Gambar II.6 Peta Rawan Bencana Kebakaran Hutan  
(Peta Sumber data: RTRW Kab. Boyolali Tahun 2011-2031)



Gambar II.7 Peta Rewan Bencana Gempa Bumi,  
Kekeringan dan angin Topan  
(Peta Sumber data: RTRW Kab. Boyolali Tahun 2011-2031)

Kabupaten Boyolali merupakan daerah yang memiliki kondisi geografis dan topografis yang memungkinkan terjadinya beberapa jenis bencana. Kondisi tersebut dapat terjadi karena faktor alam maupun non alam. Beberapa kejadian bencana yang sering terjadi di Kabupaten Boyolali antara lain :

Tabel II.9  
Kawasan Rawan Bencana Alam di Kabupaten Boyolali

No	Bencana Alam	Kawasan/Wilayah
1	Banjir	Kecamatan Ngemplak, Nogosari, Sawit, Banyudono, Kemusu, Selo, Wonosegoro, danJuwangi.
2	Banjir lahar dingin	Kecamatan Selo, Musuk, Cepogo, Boyolalidan Mojosongo.
3	Tanah longsor/ Gerakan Tanah	Kecamatan Selo, Cepogo, Ampel ,Kemusu, Klego dan Musuk.
4	Letusan gunung berapi	Kecamatan Selo (Desa Suroteleng), Kecamatan Cepogo, Kecamatan Musuk.
5	Kebakaran hutan	Kecamatan Ampel, Selo, Cepogo, Juwangi
6	AnginRibut	Semua (19) Kecamatan di Boyolali
7	Kekeringan	Di Kecamatan Musuk, Sambu, Nogosari, Simo, Andong, Wonosegoro, Kemusu, dan Juwangi.
8	Gempa bumi	Kecamatan Selo, Musuk, Cepogo, Banyudono dan Sawit.

Sumber: BPBD Kabupaten Boyolali

Oleh karena itu dalam rangka pengembangan kawasan rawan bencana tersebut, dilakukan dengan:

- 1) Menghindari kawasan yang rawan bencana alam banjir, banjir lahar, tanah longsor, letusan gunung berapi, kebakaran hutan, angin topan, kekeringan, gerakan tanah dan gempa bumi sebagai kawasan terbangun;
- 2) Memberikan peringatan dini dari kemungkinan adanya bencana alam; Mengembangkan bangunan tahan gempa pada daerah terindikasi rawan gempa; dan
- 3) Membangun jalur evakuasi bencana.



3)12 Aspek Demografi  
3)12.1 Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Boyolali

Penduduk Kabupaten Boyolali pada Tahun 2014 berjumlah 967.197 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 475.847 jiwa dan perempuan sebanyak 491.350 jiwa, dengan luas wilayah 101.510,20 ha maka kepadatan penduduk sebesar 953 jiwa/Km<sup>2</sup>. Sedangkan pada akhir Tahun 2015 berdasarkan hasil perhitungan sementara jumlah penduduk menjadi 971.245 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 478.264 jiwa dan perempuan sebanyak 492.981 jiwa, serta kepadatan penduduk sebesar 957 jiwa/Km<sup>2</sup>. Data tersebut memberikan gambaran bahwa jumlah penduduk Kabupaten Boyolali selama 5 tahun terjadi penambahan 17.408 jiwa atau terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun 0,36%.

Data perkembangan penduduk Kabupaten Boyolali sejak akhir Tahun 2011 sampai dengan akhir Tahun 2015, sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.10

Data Kependudukan

Kabupaten Boyolali Tahun 2011 s/d 2015

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah	Peru-bahan	Pertum-buhan (%)	Kepadatan penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
		Laki-Laki	Perem-puan				
1.	2011	469.649	487.201	956.850	3.011	0,31	943
2.	2012	471.593	488.139	959.732	2.882	0,3	945
3.	2013	473.988	489.851	963.839	4.107	0,43	949
4.	2014	475.847	491.350	967.215	3.358	0,35	953
5.	2015	478.264	492.981	971.245	4.048	0,42	957

Sumber data: BPS Kabupaten Boyolali

Penjelasan tabel di atas, bahwa rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Boyolali dari Tahun 2011 sampai Tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 0,35%, dan Tahun 2015 tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 0,42%. Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk maka tingkat kepadatan penduduk

yang semakin tinggi sehingga perlu menjadi perhatian utama dalam penyediaan lahan pemukiman dan pertanian.

Untuk mengetahui data perkembangan penduduk Kabupaten Boyolali per Kecamatan pada akhir Tahun 2015, bisa dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.11  
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan  
Kabupaten Boyolali Tahun 2014 dan 2015

No	Kecamatan	Penduduk	
		2014	2015
1.	Selo	27.245	27.255
2.	Ampel	70.090	70.772
3.	Cepogo	54.222	54.408
4.	Musuk	61.314	61.303
5.	Boyolali	61.038	61.500
6.	Mojosongo	52.301	52.514
7.	Teras	47.152	47.520
8.	Sawit	33.027	32.975
9.	Banyudono	45.173	45.332
10.	Sambi	48.959	49.111
11.	Ngemplak	73.543	74.203
12.	Nogosari	62.157	62.501
13.	Simo	43.687	43.751
14.	Karangdede	40.990	41.034
15.	Klego	46.399	46.535
16.	Andong	62.085	62.153
17.	Kemus	46.632	46.682
18.	Wonosegoro	55.391	55.464
19.	Juwangi	35.810	36.232
	JUMLAH	<b>967.215</b>	<b>971.245</b>

Sumber data: BPS Kabupaten Boyolali

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Tahun 2014 tingkat jumlah penduduk paling tinggi yaitu Kecamatan Ngemplak dengan jumlah penduduk 74.203 jiwa kemudian Kecamatan Selo tingkat jumlah penduduk paling rendah dengan jumlah 27.255 jiwa.

### 19.122 Struktur Penduduk

Penduduk Kabupaten Boyolali sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.12  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur  
Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2015

Rentang Usia (Tahun)	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
0 – 4	79.323	70.192	64.324	64.549	55.939
5 – 9	80.967	77.501	76.472	76.740	75.764
10 – 14	85.224	82.529	82.202	82.490	77.697
15 -19	73.494	79.837	81.454	81.739	81.427
20 – 24	62.206	60.096	63.261	63.483	69.801
25 – 29	72.577	67.708	64.536	64.762	58.978
30 – 34	71.398	70.991	72.101	72.354	68.914
35 – 39	69.715	67.258	66.287	66.519.	68.160
40 – 44	71.323	71.024	71.865	72.117	66.925
45 -49	65.323	65.931	66.777	67.011	68.109
50 -54	57.848	61.416	63.200	63.421	62.847
55 – 59	44.315	47.682	50.067	50.242	55.643
60 – 64	34.386	37.418	39.989	40.129	42.769
> 65	88.751	100.160	101.304	101.659	118.273
JUMLAH	956.850	959.732	963.839	967.215	971.245

*Sumber data: BPS Kab. Boyolali*

Penjelasan tabel di atas, bahwa pengelompokkan penduduk berdasarkan kelompok umur sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dalam penataan jumlah angkatan kerja penduduk yang umurnya adalah usia di atas 15 tahun sampai dengan di bawah 64 tahun atau yang dikenal dengan usia produktif. Pada gilirannya usia produktif tersebut akan berkurang perkembangannya tiap tahun karena sejumlah penduduk melanjutkan sekolah dan sejumlah penduduk terserap pada lapangan kerja, selisihnya dikenal dengan angka pengangguran.

### 19.13 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

#### 19.13.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

##### 1) Kondisi Ekonomi

###### a) Pendapatan Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), secara agregat ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 rata-rata terjadi kenaikan sebesar 10,10%. Sedangkan PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 rata-rata terjadi kenaikan sebesar 5,48%.

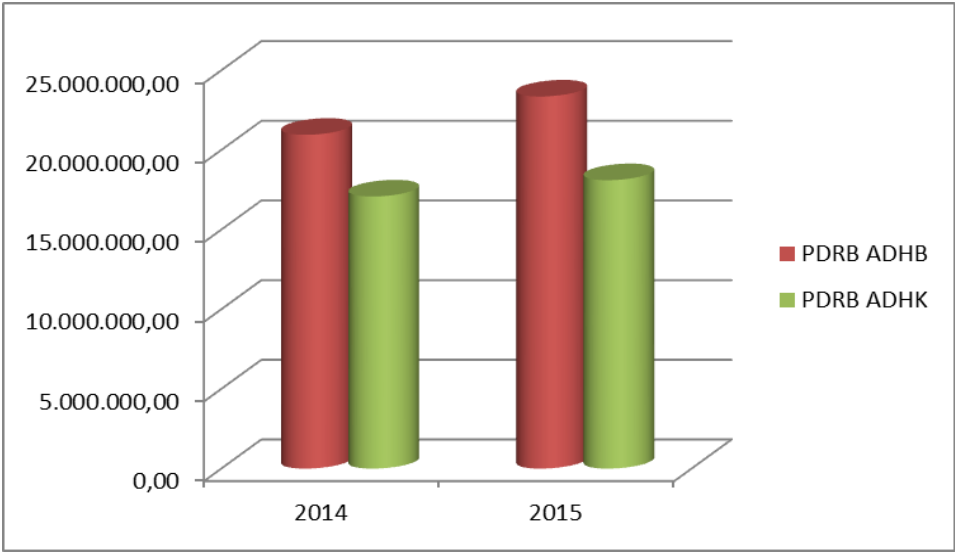
Adapun kondisi perkembangan PDRB Kabupaten Boyolali Tahun 2013 sampai Tahun 2014 atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK) dapat dilihat, tabel berikut.

Tabel II.13  
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto  
Kabupaten Boyolali Tahun 2014 dan 2015

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Nilai (Juta Rupiah)	(%) perubahan	Nilai (Juta Rupiah)	(%) perubahan
2014	20.958.574,00	11,49	17.085.661,60	5,04
2015	23.360.964,90	11,46	18.107.858,80	5,98

Sumber data: BPS Kabupaten Boyolali

Grafik II.1  
Grafik PDRB Kabupaten Boyolali  
Tahun 2014 dan 2015(Juta Rupiah)



Tabel II.14  
PDRB ADHB Eks Karesidenan Surakarta  
dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2015

KABUPATEN/ KOTA/ PROVINSI	PDRB ADHB (dalam juta rupiah)		
	2013	2014	2015
1. BOYOLALI	18.798.639,48	20.958.573,97	23.495.135,18
2. KLATEN	23.349.880,45	26.110.764,38	
3. SUKOHARJO	22.029.889,84	24.260.290,49	
4. WONOGIRI	17.657.525,95	19.674.351,24	
5. KARANGANYAR	22.880.345,39	25.645.061,65	
6. SRAGEN	21.870.689,03	24.488.922,71	
7. SURAKARTA	29.092.454,16	32.038.668,79	
8. JAWA TENGAH	832.953.579,11	925.662.692,21	

*Sumber data: BPS Kab. Boyolali*

Tabel II.15  
PDRB ADHK Eks Karesidenan Surakarta  
dan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2015

KABUPATEN/ KOTA/ PROVINSI	PDRB ADHB (dalam juta rupiah)		
	2013	2014	2015
1. BOYOLALI	16.265.748,68	17.085.661,59	18.189.698,21
2. KLATEN	20.299.990,92	21.391.717,78	
3. SUKOHARJO	19.403.138,94	20.423.511,80	
4. WONOGIRI	15.305.297,58	16.109.707,79	
5. KARANGANYAR	19.224.635,92	20.208.968,35	
6. SRAGEN	19.102.981,59	20.170.942,51	
7. SURAKARTA	25.612.681,32	26.955.056,24	
8. JAWA TENGAH	726.899.706,38	766.271.771,27	

*Sumber data: BPS Kab. Boyolali*

Tabel II.16  
Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan  
Menurut Lapangan Usaha (persen)

Kate-go ri	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,35	2,01	1,98	-1,78	6,41
B	Pertambangan dan Penggalian	4,26	4,85	5,57	6,08	2,04
C	Industri Pengolahan	6,79	9,22	10,26	8,36	6,17
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,04	10,64	8,52	1,20	-2,69
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,85	-2,47	-0,46	2,55	1,05
F	Konstruksi	0,98	6,26	3,69	4,67	6,26
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,20	1,50	4,29	3,92	3,63

Kate-go	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
H	Transportasi dan Pergudangan	6,96	6,75	9,07	9,63	8,25
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,18	3,97	2,02	7,84	7,44
J	Informasi dan Komunikasi	9,23	9,76	8,66	15,53	10,27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,01	2,88	4,11	3,76	7,23
L	Real Estate	6,21	4,60	6,61	8,18	8,92
M,N	Jasa Perusahaan	9,93	6,94	13,75	8,20	9,12
O	Administrasi Pemerintahan, Per-tahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,65	0,02	1,87	-0,16	4,76
P	Jasa Pendidikan	19,42	19,66	8,38	11,54	7,47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,99	9,63	6,42	12,66	7,32
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,80	-0,43	8,93	8,09	2,97
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		6,34	5,33	5,83	5,04	5,98

Sumber data: BPS Kab. Boyolali

Tabel II.17  
Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku  
Menurut Lapangan Usaha (Persen)

Kate-go ri	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,22	7,82	9,53	4,13	11,26
B	Pertambangan dan Penggalian	11,55	5,14	8,40	25,14	20,70
C	Industri Pengolahan	16,89	11,08	12,10	15,55	11,95
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11,38	9,57	4,27	2,34	1,54
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,22	-2,44	1,67	5,79	5,01
F	Konstruksi	6,05	10,28	7,58	13,43	11,43
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,08	3,23	8,86	7,02	7,68
H	Transportasi dan Pergudangan	12,62	12,65	21,70	19,14	14,94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,19	4,43	5,93	13,74	13,07
J	Informasi dan Komunikasi	11,86	7,01	6,23	11,76	8,68
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,93	12,36	8,61	9,03	13,12
L	Real Estate	8,24	5,28	7,34	12,78	11,29
M,N	Jasa Perusahaan	18,98	8,42	18,60	12,22	15,69
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,55	10,18	7,66	6,96	9,26
P	Jasa Pendidikan	35,83	29,82	17,97	17,51	10,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	18,28	18,22	12,48	17,79	13,03
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,12	-0,22	12,64	16,73	7,39

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	13,41	9,12	10,71	11,49	11,46
--------------------------------	-------	------	-------	-------	-------

*Sumber data: BPS Kab. Boyolali*

Tabel II.18  
Distribusi PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku  
Menurut Lapangan Usaha (persen)

Kate-go ri	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25,3	25,0	24,7	23,1	23,1
B	Pertambangan dan Penggalian	4,1	3,9	3,8	4,3	4,7
C	Industri Pengolahan	26,2	26,7	27,0	28,0	28,1
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
F	Konstruksi	6,4	6,5	6,3	6,4	6,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,1	14,3	14,1	13,5	13,1
H	Transportasi dan Pergudangan	4,1	4,3	4,7	5,0	5,2
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,8	2,7	2,6	2,6	2,6
J	Informasi dan Komunikasi	2,4	2,4	2,3	2,3	2,2
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,3	2,3	2,3	2,2	2,3
L	Real Estate	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
M,N	Jasa Perusahaan	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,0	3,0	2,9	2,8	2,7
P	Jasa Pendidikan	4,2	5,0	5,3	5,6	5,6
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,7	1,6	1,6	1,7	1,6
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

*Sumber data: BPS Kab. Boyolali*

Tabel II.19  
Distribusi PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan  
Menurut Lapangan Usaha (persen)

Kate-go ri	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25,3	24,5	23,6	22,1	22,2
B	Pertambangan dan Penggalian	4,1	4,0	4,0	4,1	3,9
C	Industri Pengolahan	25,5	26,4	27,6	28,4	28,5
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Kate-go	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
F	Konstruksi	6,5	6,6	6,5	6,4	6,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,4	14,9	14,7	14,5	14,2
H	Transportasi dan Pergudangan	4,2	4,2	4,4	4,6	4,7
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,9	2,8	2,7	2,8	2,8
J	Informasi dan Komunikasi	2,5	2,7	2,7	3,0	3,1
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2
L	Real Estate	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3
M,N	Jasa Perusahaan	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,1	2,9	2,8	2,7	2,7
P	Jasa Pendidikan	3,9	4,5	4,6	4,9	4,9
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,8	1,7	1,8	1,8	1,8
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber data: BPS Kab. Boyolali

Tabel II.20  
PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku  
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Kate-g ori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.936.440,4	4.244.253,4	4.648.625,5	4.840.590,8	5.385.673,0
B	Pertambangan dan Penggalian	634.857,0	667.473,1	723.541,9	905.432,2	1.092.878,9
C	Industri Pengolahan	4.074.070,8	4.525.496,5	5.072.860,6	5.861.606,6	6.562.301,0
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.395,9	3.721,0	3.879,8	3.970,5	4.031,5
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.312,1	11.036,2	11.220,8	11.871,0	12.466,0
F	Konstruksi	1.000.442,9	1.103.337,8	1.186.977,5	1.346.416,6	1.500.300,2
G	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.355.328,4	2.431.512,8	2.646.938,0	2.832.826,3	3.050.289,7
H	Transportasi dan Pergudangan	642.216,5	723.448,1	880.435,2	1.048.978,2	1.205.699,2
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	433.468,0	452.677,3	479.503,0	545.382,2	616.651,2
J	Informasi dan Komunikasi	380.504,9	407.179,3	432.531,5	483.402,3	525.361,8
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	353.887,1	397.639,0	431.879,0	470.893,5	532.678,5
L	Real Estate	177.165,8	186.527,8	200.223,9	225.819,3	251.304,4
M,N	Jasa Perusahaan	47.189,7	51.162,3	60.678,2	68.090,9	78.773,4
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	461.370,0	508.351,0	547.268,8	585.366,1	639.551,1



Kate-g	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
P	Jasa Pendidikan	655.543,9	851.002,5	1.003.955,7	1.179.736,9	1.303.428,1
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	122.964,8	145.367,6	163.511,2	192.606,5	217.702,2
R,S,T, U	Jasa lainnya	271.018,3	270.422,5	304.609,2	355.584,2	381.874,7
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		15.561.176,4	16.980.608,0	18.798.639,5	20.958.574,0	23.360.964,9

Sumber data: BPS Kab. Boyolali

Tabel II.21  
PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan  
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Kate-gori	Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.697.278,4	3.771.708,9	3.846.251,5	3.777.647,0	4.019.899,5
B	Pertambangan dan Penggalian	593.361,8	622.123,7	656.805,7	696.721,8	710.934,9
C	Industri Pengolahan	3.721.942,2	4.065.227,7	4.482.517,4	4.857.151,0	5.156.624,6
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.294,0	3.644,6	3.955,1	4.002,5	3.894,8
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.271,4	10.992,8	10.942,5	11.221,4	11.339,2
F	Konstruksi	952.579,3	1.012.227,5	1.049.622,2	1.098.593,8	1.167.365,8
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.252.745,1	2.286.535,0	2.384.567,3	2.478.005,1	2.567.851,2
H	Transportasi dan Pergudangan	609.916,4	651.088,1	710.113,5	778.495,3	842.747,9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	417.418,9	433.997,4	442.776,1	477.495,1	513.043,5
J	Informasi dan Komunikasi	371.547,6	407.819,8	443.148,4	511.962,3	564.540,8
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	334.649,9	344.283,3	358.417,7	371.893,0	398.767,2
L	Real Estate	173.838,4	181.833,1	193.860,9	209.725,6	228.433,2
M,N	Jasa Perusahaan	43.600,9	46.627,2	53.038,4	57.387,0	62.620,7
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	452.902,4	453.012,3	461.497,0	460.751,4	482.683,1
P	Jasa Pendidikan	576.342,9	689.655,2	747.431,7	833.670,8	895.946,0
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	114.347,2	125.359,0	133.403,8	150.298,1	161.299,9
R,S,T,U	Jasa lainnya	264.989,3	263.838,8	287.399,4	310.640,3	319.866,4
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		14.592.026,3	15.369.974,4	16.265.748,7	17.085.661,6	18.107.858,8

Sumber data: BPS Kab. Boyolali

b) Tingkat Inflasi

Tabel II.22  
Perkembangan Inflasi  
Kabupaten Boyolali Tahun 2012-2016

N	Kelompok	2012	2013	2014	2015	2016
---	----------	------	------	------	------	------

o.	Pengeluaran					
1.	Bahan Makanan	6,21	16,62	15,41	4,34	6,27
2.	Makanan Jadi, Minuman dan Rokok dan Tembakau	4,30	3,04	3,25	4,82	3,91
3.	Perumahan, Air, Listrik, Gas	2,01	3,25	6,44	2,41	2,01
4.	Sandang	3,23	5,06	3,52	1,77	2,25
5.	Kesehatan	1,86	4,46	2,90	3,81	1,77
6.	Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga	1,38	0,83	4,43	3,45	2,47
7.	Transportasi, Komunikasi dan Jasa	0,87	12,94	10,21	-2,72	2,12
Umum		3,35	3,45	8,21	7,45	2,65

Sumber data: BPS Kabupaten Boyolali

Inflasi adalah besarnya perubahan harga barang dan jasa secara rata-rata yang mencakup ratusan komoditas yang dikonsumsi masyarakat. Indikator ini menunjukkan tingkat stabilitas perekonomian di suatu wilayah pada periode tertentu. Inflasi yang rendah dan terkendali merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi, karena kegiatan produksi barang dan jasa berlangsung sesuai hukum pasar yang berlaku dan dapat diprediksi sifat dan perilakunya di pasar.

c) Indeks Gini

Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan secara menyeluruh di Kabupaten Boyolali dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.23

Indeks Gini Kabupaten Boyolali Tahun 2012-2015

No.	Tahun	Indeks Gini
1	2012	0,38
2	2013	0,40
3	2014	0,38
4	2015	0,35

Sumber : BPS Jawa Tengah

d) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, angkatan kerja yang masuk pada pasar kerja mengalami peningkatan pula. Permasalahan akan muncul ketika jumlah para pencari kerja tidak seimbang dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia. Mengingat urgensi dari aspek ketenagakerjaan, di mana manfaat langsung dari pembangunan dapat diukur melalui tingginya kesempatan kerja, setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja. Dengan kata lain, salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru untuk menyerap angkatan kerja.

Besarnya serapan angkatan kerja atau tingkat partisipasi penduduk terhadap pembangunan dapat dilihat dari indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (15 Tahun ke atas). Angkatan kerja sendiri merupakan penduduk yang secara aktif bekerja maupun yang belum bekerja tapi secara aktif mencari pekerjaan. Indikator lain yang sering dipakai untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan perbandingan jumlah pengangguran dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. TPT di Kabupaten Boyolali mengalami perkembangan yang fluktuatif selama 5 (lima) Tahun terakhir sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.24  
Perkembangan TPAK dan TPT  
di Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2015

No.	Tahun	TPAK	TPT
1	2011	73.16	5.81
2	2012	74.84	4.43
3	2013	75.85	5.44
4	2014	74.82	5.46
5	2015	74.68	4.95

Sumber: BPS Jawa Tengah

e) Kemiskinan

Dalam upaya perumusan kebijakan dan intervensi program penanggulangan kemiskinan, secara nasional data yang digunakan adalah data hasil pendataan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2015 dengan hasil berupa Pemutakhiran Basic Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 yang telah diserahkan kepada Kementerian Sosial dan di-launching oleh Tim Nasional Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. PBDT Tahun 2015 disepakati untuk digunakan sebagai single data/data tunggal dalam program penanggulangan kemiskinan oleh semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tabel II.25  
Penduduk Miskin Kabupaten Boyolali  
Tahun 2011 s.d. 2015

No	Tahun	Prosentase Penduduk Miskin (%)
1	2011	14,97
2	2012	13,88
3	2013	13,27
4	2014	12,36
5	2015	12,45

Sumber Data: BPS dan (\*) diolah BP3D Kabupaten Boyolali

Data kemiskinan makro/agregat menggambarkan persentase dan jumlah penduduk miskin dan KK miskin, data tersebut sangat berguna untuk mengetahui kemajuan pembangunan daerah dalam program penanggulangan kemiskinan, guna penetapan target dan sasaran program penanggulangan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan seperti program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat, bidang perumahan, bidang pendidikan melalui bantuan beasiswa keluarga miskin dan masyarakat rentan, dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin, yang didukung oleh informasi tentang siapa

dan di mana penduduk miskin itu berada (*by name* dan *by address*).

e)132 Fokus Kesejahteraan Sosial

1) Pendidikan

Tabel II.26  
Capaian Fokus Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan  
Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2016 dan Target Tahun 2017

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	HASIL		Target 2017
			2015	2016	
1	2	3	4	5	6
1	Angka melek huruf	%	99,66	99,68	99,68
2	Angka rata-rata lama sekolah	%	8,86	8.71	-
3	Angka partisipasi kasar				
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	99,35	99,53	99,50
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	94,20	94,35	95,00
	Angka Partisipasi Kasar (APK)) SMA/SMK/MA/Paket C	%	72,89	78,33	-
4	Angka pendidikan yang ditamatkan				
	SD	%	33,97	33.82	-
	SMP	%	17,66	18.11	-
	SMA	%	14,42	14.82	-
	D3	%	2,54	2.59	-
	PT/DIV	%	2,57	2.59	-
5	Angka Partisipasi Murni				
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	86,01	86,00	86,10
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	69,95	68,10	70,15
	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	%	49,02	50,91	-

Sumber data: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Boyolali

APK SD/MI dan Paket A Tahun 2016 dengan target 99,50% dapat terealisasi 99,53% atau capaian kinerja sebesar 100,03%, dibandingkan dengan Tahun lalu mengalami kenaikan sebesar 0,18%.

APK SMP/MTs dan Paket B pada Tahun 2016 dengan target 94,80% dapat terealisasi 94,35% atau capaian kinerja sebesar 99,53%, sehingga indikator ini belum optimal tercapai, dibandingkan dengan Tahun lalu mengalami kenaikan sebesar 0,15%.

APK SMA/MA/SMK dan Paket C Tahun 2016 dengan target 70% dapat terealisasi 78,33% atau capaian kinerja sebesar 111,90%, sehingga indikator ini dapat tercapai dan jika dibandingkan dengan Tahun lalu mengalami kenaikan sebesar 5,44%.

APM SD/MI dan Paket A Tahun 2016 dengan target 86,05% dapat terealisasi 86,00 % atau capaian kinerja sebesar 99,94%, dibandingkan dengan Tahun lalu mengalami penurunan sebesar 0,01%.

APM SMP/MTs dan Paket B Tahun 2016 dengan target 70,00% dapat terealisasi 68,10% atau capaian kinerja sebesar 97,29%, sehingga indikator ini belum dapat tercapai, jika dibandingkan dengan Tahun lalu mengalami penurunan sebesar 1,85%.

APM SMA/MA/SMK dan Paket C Tahun 2016 dengan target 49,19% dapat terealisasi 50,91% atau capaian kinerja sebesar 103,50%, jika dibandingkan dengan Tahun lalu mengalami kenaikan sebesar 1,89%.

Faktor-faktor pendukung Capaian Fokus Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan meliputi kondisi geografis yang relatif mendukung, hampir rata-rata daerah (kecamatan dan desa) yang berhasil tersebut terletak pada daerah sentral/geografis sehingga segala akses transportasi dan informasi dapat dengan mudah masuk daerah tersebut, anggaran Pendidikan tepat sasaran, kebersamaan dan keseriusan Pemerintah Daerah bersama masyarakat membangun pendidikan di Kabupaten Boyolali.

Tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Fokus Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan ini adalah kemampuan ekonomi masyarakat dan faktor geografi yang menyebabkan wilayah-wilayah tertentu di pedesaan dan pegunungan menjadi wilayah tersulit dalam jangkauan layanan pendidikan.

Alternatif pemecahan masalah yang dapat diambil adalah dengan memberikan lebih banyak lagi subsidi untuk membantu anak dalam menjangkau hak pendidikannya, seperti beasiswa dan pendirian sekolah satu atap, serta pendirian SMP Terbuka yang bertujuan memberikan kesempatan belajar yang lebih luas kepada anak-anak lulusan SD/MI atau sederajat yang tidak dapat mengikuti pendidikan SMP Reguler karena berbagai hambatan yang dihadapinya.

Melaksanakan penjangkauan anak usia sekolah baik yang belum pernah sekolah maupun yang putus sekolah untuk masuk ke dalam sistem pendidikan. Melanjutkan program beasiswa bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu termasuk beasiswa untuk menarik anak usia jenjang pendidikan dasar yang berada di luar sistem sekolah baik yang belum bersekolah maupun yang putus sekolah dengan tetap memberi perhatian pada keadilan dan kesetaraan gender.

2) Kesehatan

Tabel II.27

Capaian Fokus Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan  
Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2016 dan Target Tahun 2017

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	HASIL		Target 2017
			2015	2016	
1	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	75,8	76,1	76,3
2	Prosentase Balita Gizi Buruk	%	3	9,2	9,2
3	Prosentase balita Gizi Baik	%	80,7	80,4	80,4

Sumber data: Dinas Kesehatan Kab. Boyolali

3) Ketenagakerjaan

Tabel II.28

Capaian Fokus Kesejahteraan Rakyat Bidang Ketenagakerjaan  
Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2016 dan Target Tahun 2017

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	HASIL		Target 2017
			2015	2016	
1	Penduduk yang Bekerja	%	70,76	97,97	97,97
2	Penduduk yang Tidak Bekerja	%	5,38	2,03	2

Sumber data: BPS dan Dinkopnaker Kabupaten Boyolali

Rasio penduduk yang bekerja berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2010 adalah merupakan perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio jumlah penduduk yang bekerja Tahun 2016 sebesar 97,97%, dimana jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 537.179 orang dan jumlah angkatan kerja sebanyak 548.328 orang. Sedangkan jumlah penduduk yang tidak bekerja sebanyak 11.149 orang.

3)133 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1) Kebudayaan

Tabel II.29

Capaian Fokus Bidang Kebudayaan Tahun  
Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2016 dan Target Tahun 2017

No	CapaianPembangunan	2015	2016	2017
1	Jumlah grup kesenian	585	579	-
2	Jumlah gedung & tempat kesenian	7	9	-

*Sumber: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata*

Capaian pembangunan Bidang Kebudayaan Tahun 2016 pada jumlah grup/pelaku kesenian berjumlah 579. Dibandingkan dengan Tahun 2015 terdapat penurunan sejumlah 6 grup, hal ini dimungkinkan karena: terjadinya merger dan adanya grup yang tidak aktif dikarenakan anggotanya melakukan aktivitas lain di luar daerah (merantau). Pelaku/grup kesenian di Kabupaten Boyolali sudah semestinya selalu didata untuk memudahkan dalam melakukan pembinaan dan penyeleksian dalam mengikuti berbagai event. Masih adanya potensi kesenian di Kabupaten Boyolali yang perlu digali secara serius.

Jumlah Tempat dan sarana penyelenggaraan kesenian yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 sebanyak 7 meliputi: Joglo Mandala Krida, Ampitheatre di Lokasi Obyek Wisata Pengging, Gedung Kapujanggan (Ngestipuro) Pengging, Panggung Tlatar, Panggung Alun-alun kidul, Simpang Lima dan Taman Pandan Alas. Pada Tahun 2016 menjadi 9 gedung dan tempat kesenian (bertambah 2 meliputi : Gelanggang Anuraga dan Balai Mahesa).

2) Pemuda dan Olahraga

Tabel II.30

Capaian Fokus Bidang Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2016 dan Target Tahun 2017

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	HASIL		Target 2017
			2015	2016	
1	Jumlah klub olahraga	Buah	31	27	31
2	Jumlah gedung olahraga	Buah	1	2	2

*Sumber: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kab.Boyolali*

Jumlah klub olahraga yang di bawah binaan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali. sebanyak 19 Klub.



Dalam pengalamannya, klub-klub olahraga ini menghasilkan atlet-atlet yang akan dipertandingkan dalam OOSN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional) maupun POPDA (Pekan Olahraga Pelajar Daerah) Kabupaten Boyolali.

Jumlah gedung olahraga yang dikelola Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali Tahun 2016 tetap dengan jumlah 2 gedung olahraga yaitu GOR Bulu Tangkis dan *Indoor* untuk Tenis Lapangan.

Organisasi kepemudaan di bawah binaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali sejumlah 12 organisasi dan pada Tahun 2016 Kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan sebanyak 16 kegiatan kepemudaan.

Upaya untuk mendorong kegiatan kepemudaan dan pramuka dengan memberikan dukungan berupa sarana pendukung dan motivasi kepada peserta didik; Melakukan inovasi kegiatan kepramukaan dengan kegiatan yang menarik, menyesuaikan dengan perkembangan peserta didik, perkembangan zaman dan tantangan global; Pembina pramuka harus memperbanyak bekal pengetahuan, keterampilan, dan wawasan dalam membina, sehingga dalam proses pembinaan berjalan sesuai dengan kurikulum pembinaan gerakan pramuka.

Kegiatan keolahragaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali pada Tahun 2016 sebanyak 9 kegiatan, dibandingkan dengan Tahun 2015 terjadi peningkatan sebanyak 3 kegiatan.

- 2)14 Aspek Pelayanan Umum
- 2)14.1 Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar
  - 1) Pendidikan

Tabel II.31

Capaian Aspek Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2016 dan Target Tahun 2017

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	HASIL		Target 2017
			2015	2016	
1	Pendidikan dasar:				
	Angka partisipasi sekolah	%	94,94	94,90	-
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia	%	63,74	64,11	-

	sekolah				
	Rasio guru/murid	%	12,97	12,71	-
2	Pendidikan menengah:				
	Angka partisipasi sekolah	%	52,52	55,51	-
	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	%	19,42	19,03	-
	Rasio guru terhadap murid	%	11,40	12,6	-
	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,66	99,68	99,68

*Sumber: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Boyolali*

Angka Partisipasi Sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2016 sebesar 94,90%. Angka partisipasi ini didukung oleh Program dan kegiatan yang dilaksanakan cukup berhasil memenuhi target kinerja. Secara umum program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah kurangnya perluasan akses yang dapat dijangkau dengan mudah dan murah, dan pemerataan serta pemerataan kualitas pendidikan. Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah optimalisasi kegiatan yang mempunyai *output* perluasan akses dan pemerataan serta peningkatan kualitas pendidikan dengan memperhatikan keadilan antar wilayah baik wilayah utara-selatan maupun wilayah barat-timur.

Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar sebesar 12,71%. Jika dilihat dari angka rasio ini maka jumlah guru sudah lebih dari cukup, namun permasalahannya adalah persebaran guru yang tidak merata di beberapa sekolah terjadi kekurangan guru (banyak terjadi pada jenjang SD) namun di sisi lain, banyak sekolah yang kelebihan guru (SMP).

Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah Tahun 2016 sebesar 55,51%. Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah faktor geografis, rendahnya kesadaran orang tua dan masyarakat terhadap masalah pendidikan menengah, ketidakmampuan secara finansial untuk menyekolahkan anak-anaknya menjadi salah satu permasalahan rendahnya Angka

Partisipasi, khususnya pada kelompok masyarakat miskin adalah tingginya biaya pendidikan, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung meliputi antara lain, iuran sekolah, buku, pakaian/seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung meliputi antara lain biaya transportasi, uang saku, dan biaya lain-lain. Hal tersebut jelas mengungkapkan bahwa penduduk miskin tidak akan mampu menjangkau pendidikan jika tidak dibantu. Pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi masalah ini. Beberapa kebijakan yang berpihak pada siswa miskin (*pro poor policy*) telah dijalankan. Kebijakan tersebut pada intinya bertujuan untuk meningkatkan akses siswa miskin terhadap layanan pendidikan.

Upaya-upaya dilakukan adalah dengan melanjutkan program beasiswa/sekolah gratis bagi siswa berprestasi, beasiswa bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu dengan tetap memberi perhatian pada keadilan dan kesetaraan gender; melaksanakan *reengineering* dan menyelenggarakan program studi khusus untuk pendidikan kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah/pekerjaan lapangan kerja daerah; meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan industri dalam rangka meningkatkan relevansi pendidikan; meningkatkan pelaksanaan manajemen pendidikan menengah berbasis pada sekolah dan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun pendidikan menengah.

Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah sebesar 12,60. Jika dilihat dari angka rasio ini maka jumlah guru pada jenjang pendidikan menengah dalam kategori kelebihan guru, namun permasalahan yang dihadapi adalah persebaran guru yang tidak merata di beberapa sekolah dan kelebihan guru itu terdapat pada guru mata pelajaran tertentu.

Target kinerja melek huruf sesuai dengan target dari pemerintah pusat sebesar 97% pada Tahun 2016 terealisasi sebesar 99,68% tercapainya ini melalui kegiatan penerapan pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar dan keaksaraan lanjutan, serta pembelajaran pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup.

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah karena mereka berasal dari keluarga miskin.

Kemiskinan sering kali menjadi kendala sangat praktis dalam upaya pembelajaran masyarakat, banyak masyarakat penyandang buta aksara sudah terlalu tua sehingga kemampuan menyerap ilmu lebih lambat.

Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti dengan organisasi perempuan, organisasi keagamaan, dan swasta.

Tabel II.32  
 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pendidikan  
 Untuk Fasilitas Pendidikan Kabupaten Boyolali  
 Tahun 2015-2016 dan Target Tahun 2017

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATU AN	HASIL		Target 2017
			2015	2016	
	Fasilitas Pendidikan:				
1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	94,06	94,10	94,15
2	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	96,59	97,20	97,50

Sumber: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Boyolali

Indikator SD/MI kondisi bangunan baik pada Tahun 2016 dengan target 90,48% dapat terealisasi 94,10% atau capaian kinerja sebesar 104%, sehingga indikator ini dapat tercapai, hal ini terutama didukung didukung anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus), DED (*Detail Engineering Design*) untuk rehabilitasi ruang kelas rusak.

Indikator sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik pada Tahun 2016 dengan target 98,69% dapat terealisasi 97,20% atau capaian kinerja sebesar 98,49%, sehingga indikator ini belum dapat tercapai secara optimal, dikarenakan belum optimalnya alokasi anggaran untuk rehabilitasi ruang kelas rusak dengan bertambahnya ruang kelas rusak, namun jika dibandingkan dengan Tahun lalu ruang kelas kondisi bangunan baik meningkat sebesar 0,61%.

Keberhasilan tingkat Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pendidikan Untuk Fasilitas Pendidikan didukung dipengaruhi kebijakan dalam peningkatan kualitas sarana dan prasarana

pendidikan semua jenis dan jenjang pendidikan dengan upaya pengembangan pendidikan, pembangunan, dan rehabilitasi gedung sekolah.

Tabel II.33  
 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pendidikan untuk PAUD  
 Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2016 dan Target Tahun 2017

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	HASIL		Target 2017
			2015	2016	
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	lembaga	951	998	999

Sumber: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Boyolali

Keberhasilan dan perkembangan Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pendidikan untuk PAUD setidaknya jika dilihat dari peningkatan jumlah satuan pendidikan anak usia dini yang cukup signifikan yang diprakarsai oleh masyarakat secara mandiri di seluruh kecamatan dan desa. Perkembangan ini tentu sangat positif jika dilihat dari sisi perluasan akses layanan pendidikan. Namun, di sisi lain sebagai bagian penting dari program utama pembangunan pendidikan nasional, kebijakan pengembangan pendidikan anak usia dini juga senantiasa harus bertumpu pada prinsip pembangunan pendidikan yang berkeadilan dan bermutu.

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah masih kurangnya akses anak-anak usia dini yang berasal dari keluarga kategori miskin dan pemahaman orang tuanya akan pentingnya pendidikan anak usia dini yang masih rendah serta penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dengan biaya pendidikan murah belum dapat diwujudkan sepenuhnya, di sisi lain kemampuan pemerintah untuk membangun lembaga PAUD negeri sangat terbatas.

Guna meningkatkan pelayanan pendidikan usia dini, diperlukan secara bertahap ketersediaan sarana prasarana, maupun alat permainan edukatif yang memenuhi standar sehingga pada gilirannya akan dapat mencapai harapan. Meningkatkan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini di seluruh lapisan masyarakat sehingga partisipasi masyarakat akan semakin meningkat.

Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah mendorong pihak swasta untuk turut berpartisipasi dalam pendirian lembaga PAUD, memperkuat pelayanan PAUD di daerah-daerah terpencil dan pelosok. Dengan demikian, akan tercipta pemerataan pendidikan anak usia dini.

Tabel II.34  
 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pendidikan untuk Angka Putus Sekolah Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2016 dan Target Tahun 2017

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	HASIL		Target 2017
			2015	2016	
	Angka Putus Sekolah:				
1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,05	0,03	0,03
2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,21	0,09	0,25
3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	0,41	0,32	-

Sumber: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Boyolali

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI pada Tahun 2016 dengan target 0,03% terealisasi 0,03% atau capaian kinerja sebesar 100%, dibandingkan dengan Tahun lalu mengalami penurunan angka putus sekolah sebesar 0,02%.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berhasil memenuhi target kinerja, sehingga secara umum program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah beberapa faktor, yaitu kemiskinan, minat anak yang kurang, perhatian orang tua rendah, faktor budaya, fasilitas belajar kurang, kurangnya akses terhadap sarana dan anak berkebutuhan khusus.

Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah pemberian beasiswa untuk siswa miskin, mendekatkan akses kepada anak di daerah pedesaan dan sekolah inklusif bagi anak berkebutuhan khusus.

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs pada Tahun 2016 dengan target 0,23% terealisasi 0,09% atau capaian kinerja sebesar 100,14%,

sehingga indikator ini dapat tercapai, dibandingkan dengan Tahun lalu mengalami penurunan angka putus sekolah sebesar 0,12%.

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah kemiskinan, budaya dan pemahaman orang tua akan pentingnya pendidikan dasar.

Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah adanya beasiswa retrieval, pemberian pengertian kepada orang tua melalui guru/tokoh masyarakat.

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA pada Tahun 2016 dengan target 0,26% dapat terealisasi 0,32% atau capaian kinerja sebesar 99,94%, sehingga indikator ini belum dapat tercapai, secara optimal namun jika dibandingkan dengan Tahun lalu mengalami penurunan angka putus sekolah sebesar 0,09%.

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah faktor ketidakmampuan atau kemiskinan, biaya pendidikan, lingkungan, budaya, minat anak dan aksesibilitas wilayah.

Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah memberikan beasiswa khususnya bagi siswa dari keluarga miskin untuk mendapatkan akses pendidikan menengah.

Tabel II.35  
Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pendidikan Untuk Angka Kelulusan Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2016 dan Target Tahun 2017

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		Target 2017
			2015	2016	
	Angka Kelulusan:				
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100
3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	99,97	99,97	100
4	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	98,40	98,16	98,75
5	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	79,33	81,23	-
6	Tambahan Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	orang	215	116	-

Sumber: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Boyolali

Angka Kelulusan (AL) SD/MI pada Tahun 2016 dengan target 100% dapat terealisasi 100% atau capaian kinerja sebesar 100%, sehingga indikator ini dapat tercapai.

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs pada Tahun 2016 dengan target 100% dapat terealisasi 100% atau capaian kinerja sebesar 100%, sehingga indikator ini dapat tercapai.

Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/SMK, Indikator ini pada Tahun 2016 dengan target 98% dapat terealisasi 99,97% atau capaian kinerja sebesar 102,01%, sehingga indikator ini dapat tercapai.

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs. Pada Tahun 2016 dengan target 99,54% dapat terealisasi 98,16% atau capaian kinerja sebesar 98,45%, sehingga indikator ini belum sepenuhnya dapat tercapai.

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK pada Tahun 2016 dengan target 99,74% dapat terealisasi 98,16% atau capaian kinerja sebesar 98,42%, dan jika dibandingkan dengan Tahun lalu mengalami kenaikan sebesar 1,90%.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah sisi pembiayaan atau dana, budaya, geografis dan sisi ketersediaan sekolah dengan biaya murah.

Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah dengan mengupayakan subsidi pembiayaan atau dana operasional sekolah bagi anak kurang mampu (untuk seragam, transportasi dan lainnya) dan mengupayakan jumlah ketersediaan sekolah yang dapat diakses dengan murah.

Tambahan jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV didorong oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 82 ayat (2) disebutkan bahwa "Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang ini, wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 (sepuluh) Tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini".

## 2) Kesehatan

Tabel II.36

Capaian Aspek Pelayanan Bidang Kesehatan  
Kabupaten Boyolali Tahun 2014-2015 dan Target Tahun 2016



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	HASIL		Target 2017
			2015	2016	
1	2	3	4	5	6
1	Rasio Posyandu per satuan balita	Per 1.000 balita	24.8	24.9	25
2	Rasio puskesmas, poliklinik, postu per satuan penduduk	NA	NA		
3	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per 100.000 Penduduk	11	11	11
4	Rasio Dokter (umum) per satuan penduduk	Per 100.000 Penduduk	5,91	15.06	15.2
5	Rasio tenaga medis (umum&gigi) per satuan penduduk	Per 100.000 Penduduk	14,73	19.3	
	Bidan		56,5	56.53	56.7
	Perawat		87,15	89.9	90.7
	Perawat gigi		3,74	3.76	
6	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	131	116.61	100
7	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	105	95.32	98
8	Cakupan Desa/ kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	%	100	100	100
9	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100
10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Orang	274	143	
11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Per 100.000 Penduduk	48	100	100
12	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	95	42.36	
	Rawat Jalan	%	15,84	15.92	15
	Rawat inap	%	1,6	1.33	1.5
13	Cakupan kunjungan bayi	%	106	92.03	82
14	Cakupan Puskesmas	Unit	29	29	29
15	Cakupan Puskesmas Pembantu	Unit	44	44	44

Sumber data: Dinas Kesehatan

1. Rasio Posyandu per satuan balita pada Tahun 2015 sebesar (24,8) sedangkan pada Tahun 2016, meningkat menjadi 24,9 atau sejumlah 1.800 posyandu pada Tahun 2015 dan meningkat menjadi 1.811 di Tahun 2016.
2. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per jumlah seluruh penduduk

- Jumlah Puskesmas sebanyak 29, jumlah klinik 13, jumlah puskesmas 44, sehingga jumlah keseluruhan 86 dibagi jumlah penduduk 956.850. Sehingga rasio 0,008.
3. Jumlah Rumah Sakit pada Tahun 2015 sebanyak 11 Rumah sakit, sedangkan pada Tahun 2016 tidak bertambah.  
Rasio Dokter per satuan penduduk, jumlah dokter umum sebanyak 144 orang sehingga rasio per 100.000 penduduk adalah 15.06
  4. Rasio tenaga medis per satuan penduduk
    - Bidan jumlah bidan sebanyak 541 orang sehingga rasio bidan 56.53 per 100.000 penduduk
    - Perawat jumlah perawat sebanyak 861 orang sehingga rasio per 100.000 penduduk 89.9
    - Perawat gigi jumlah perawat gigi sebanyak 36 orang sehingga rasio perawat gigi 3.76 per 100.000 penduduk.
  5. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani  
Cakupan komplikasi Kebidanan yang ditangani pada Tahun 2016, diperoleh dari jumlah kasus komplikasi yang ada sebanyak 3.700 kasus, dan secara keseluruhan telah ditangani, sehingga capaian 100%.
  6. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan  
Pertolongan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (dokter dan bidan) diperoleh dari jumlah sasaran ibu bersalin pada Tahun 2016 sejumlah 15.156 ibu bersalin, dan yang persalinannya dilakukan oleh tenaga kesehatan sejumlah 14.446 ibu bersalin, sehingga cakupannya 95,3%. Hal ini disebabkan masih adanya persalinan yang ditolong oleh dukun di beberapa daerah.
  7. Cakupan Desa/ kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)  
Target indikator Tahun 2016 desa UCI 100,0 %, terealisasi sebesar 99.6 %, sehingga indikator ini tidak dapat tercapai (capaian 99,6 %). Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah adanya mobilitas penduduk sehingga tidak

dapat tercakup di Boyolali, sehingga pendataan secara periodik untuk dilakukan.

8. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Tahun 2016 terdapat 6 kasus balita gizi buruk (lama) disebabkan karena penyakit bawaan seperti : CP, Toxoplasma dan kelainan kongenital, dan diketemukan kasus baru 5 gizi buruk. Capaian indikator ini yaitu 100% balita gizi buruk semuanya telah mendapatkan perawatan.

9. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Indikator Penemuan pasien baru TB BTA (+) dengan target sasaran sejumlah 40% dari 1130 orang atau sejumlah 452 orang, terealisasi sejumlah 143 orang atau (13,87%), sehingga tidak tercapai. Hal ini disebabkan karena rendahnya pencarian suspek TB Paru difasyankes, dan Peran dokter praktik mandiri dalam pelaporan adanya suspek TB belum optimal.

10. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Target indikator Tahun 2016 sebesar 90% dari sasaran penderita DBD 600 orang, realisasi 100% atau semua penderita DBD tertangani, sedangkan jumlah yang meninggal sebanyak 12 orang.

11. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Jumlah masyarakat miskin sesuai dengan PBDT (Pemutakhiran Basis Data Terpadu) sejumlah 303.828, berkunjung di fasilitas pelayanan dasar sebanyak 120.113 orang dan dirujuk sebanyak 8.617 orang atau keseluruhan sebesar 42.3% yang berkunjung di sarana fasilitas kesehatan strata 1.

12. Rawat Jalan

Cakupan rawat jalan dari target 15% terealisasi 15.91%, dengan angka absolute jumlah pasien baru yang berkunjung di fasilitas pelayanan kesehatan primer (puskesmas) sebanyak 179.870 jiwa, dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Boyolali 956.850. Hal ini menunjukkan bahwa kunjungan masyarakat melebihi target yang ditetapkan sebesar 15% dari jumlah Penduduk.

13. Rawat inap

Cakupan rawat inap target 1.5% terealisasi 1.3% dengan angka absolute, sebanyak 7.093 jiwa yang melakukan rawat inap di puskesmas, dari jumlah penduduk di wilayah puskesmas rawat inap sejumlah 530.931. Capaian kinerja 88.67%, karena masyarakat selain rawat inap di fasilitas kesehatan primer (puskesmas), juga melakukan rawat inap di rumah sakit maupun klinik rawat inap.

14. Cakupan kunjungan bayi

Jumlah sasaran bayi pada Tahun 2016, sebanyak 15.650 bayi, sedangkan yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 14.402 bayi, sehingga cakupan 92,02%. Adanya pindah domisili dan mobilitas penduduk menyebabkan capaian tidak tercapai.

15. Cakupan Puskesmas

Sesuai dengan rumus perhitungan jumlah puskesmas sebanyak 29 Puskesmas, dan jumlah kecamatan di Kabupaten Boyolali 19, maka cakupan puskesmas sebesar 152%.

16. Cakupan Puskesmas Pembantu

Sesuai dengan rumus perhitungan jumlah pustu sebanyak 44 Pustu Puskesmas, dan jumlah desa di Kabupaten Boyolali 267, maka cakupan puskesmas pembantu sebesar 16,5%.

Tabel II.37  
 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Kesehatan di RSUD  
 Kabupaten Boyolali Tahun 2014-2016 dan Target Tahun 2017

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	HASIL			Target 2017
			2014	2015	2016	
1	Tingkat hunian ( <i>Bed Occupancy Rate / BOR</i> )	%				
	1. RSUD Simo		71,43	69,25	57,58	69
	2. RSUD Pandan Arang		73,84	69	70,08	81,65
	3. RSUD Waras-wiris		67,32	59,13	45,61	70
2	Lama tinggal ( <i>Length Of Stay / LOS</i> )	Hari				
	1. RSUD Simo		4,7	4,87	3,87	4,55
	2. RSUD Pandan Arang		3,66	3,64	3,66	3,95
	3. RSUD Waras-wiris		4,75	4,65	4,99	5
3	<i>Turn Over Interval (TOI)</i>	Hari				
	1. RSUD Simo		2,73	2,68	2,85	1,85
	2. RSUD Pandan Arang		1,34	1,64	1,62	1,48
	3. RSUD Waras-wiris		2,31	3,21	5,95	2

4	<i>Bed Turn Over (BTO)</i>	Pasien				
	1. RSUD Simo		36,24	36,92	54,4	45
	2. RSUD Pandan Arang		71,11	66,89	67,26	68,21
	3. RSUD Waras-wiris		51,72	46,41	33,39	46
5	Pelayanan pasien Jamkesmas – Jamkesda	Pasien				
	1. RSUD Simo		18.12 0	13.17 9	17.610	-
	2. RSUD Pandan Arang		10.31 9	20.56 6	0	0
	3. RSUD Waras-wiris		174	143	1568	1700
6	<i>Gross Death Rate (GDR )</i>	%				
	1. RSUD Simo		0,495	0,83	1,8995	0,85
	2. RSUD Pandan Arang		2,27	2,47	2,57	2,3
	3. RSUD Waras-wiris		1,05	2,62	2,5	2
7	Menurunnya angka kematian murni <i>Net Death Rate /NDR )</i>	%				
	1. RSUD Simo		0,495	0,24	0,94	0,26
	2. RSUD Pandan Arang		1,27	1,44	1,49	1,4
	3. RSUD Waras-wiris		2,23	1,17	0,99	0,9

*Sumber data: RSUD Pandanarang, RSUD Waras-wiris, RSUD Simo Kab. Boyolali*

Tingkat hunian (BOR) pada Tahun 2016 di RSUD Simo sebesar 57,58%; RSUD Pandan Arang sebesar 70,08%; RSUD Waras-wiris sebesar 45,61%. Nilai BOR ditentukan oleh angka prosentase pasien dirumah sakit yang menggunakan tempat tidur rawat inap. Untuk lamanya tinggal rawat inap (LOS) pada Tahun 2016 di RSUD Simo sebesar 3,87 hari; RSUD Pandan Arang sebesar 3,66 hari; RSUD Waras-wiris sebesar 4,99 hari. Angka LOS tersebut ditentukan oleh jumlah hari kalender pasien mendapatkan perawatan (rawat inap) hingga keluar dari rumah sakit (*discharge*) baik kondisi pasien keluar dari rumah sakit baik dalam kondisi hidup ataupun mati. TOI pada Tahun 2016 di RSUD Simo sebesar 2,85 hari; RSUD Pandan Arang sebesar 1,62 hari; RSUD Waras-wiris sebesar 5,95 hari. Angka TOI tersebut diperoleh dari rata-rata pasien yang menempati tempat atau ruangan dengan jumlah hari tidak terjadi kekosongan pasien sudah sembuh pulang dan selanjutnya ada pasien yang menunggu antrian pasien yang akan masuk. Pelayanan pasien Jamkesmas–Jamkesda tidak ada target Tahun 2017, karena indikator tersebut sudah tidak ada lagi dalam indikator program Tahun 2017.

### 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel II.38  
Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pekerjaan Umum  
Untuk Kondisi Jalan dan Irigasi  
Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2016 dan Target Tahun 2017

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	HASIL		Target 2017
			2015	2016	
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	71,00	71,24	72,09
2	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 km/Jam)	Km	481,38	483,44	488,77
3	Rasio Jaringan Irigasi	%	79,98	80,98	82,98
4	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Ha	8.902,41	9.013,71	9.236,33

*Sumber: DPU dan Penataan Ruang Kab. Boyolali*

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, untuk Tahun 2015 sebesar 71,00 atau 481,38 Km dari total panjang jalan kabupaten sepanjang 678 Km. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 900/0245 Tahun 2016 tentang Penetapan Status Jalan Sebagai Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Boyolali, dan untuk Tahun 2016 menjadi 71,24% atau 483,44 km dan untuk Tahun 2017 ditargetkan sebesar 72,09%.

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (<40km/jam), untuk Tahun 2015 panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 481,38 Km dan untuk Tahun 2016 sepanjang 483,44 km atau panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (< 40km/jam) dari Tahun 2015 sampai Tahun 2016 bertambah/naik sepanjang 2,06 km dan mempertahankan jalan dalam kondisi baik sepanjang 481,38 Km, untuk Tahun 2017 ditargetkan mempertahankan jalan dalam kondisi baik menjadi 72,09% atau  $\pm$  488,7702 Km.

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik untuk Tahun 2015 seluas 8.902,41 ha atau 79,98%, Tahun 2016 menjadi 9.013,71 ha atau 80,98%, Target rasio Jaringan Irigasi untuk Tahun 2017 sebesar 9.236,33 ha atau 82,98%

#### 1. Rasio Tahun 2013 :

(luas irigasi kondisi baik/total luas irigasi) x 100%

$$= (8.301,54/11.130,79) \times 100\% = 74,58 \%$$

2. Rasio Tahun 2014 :

$$(\text{luas irigasi kondisi baik}/\text{total luas irigasi}) \times 100\%$$

$$= (8.853,70 / 11.130,79) \times 100\% = 79,54\%.$$

3. Rasio Tahun 2015 sebesar 79,98% dengan perhitungan:

$$= (8.902,41 / 11.130,79) \times 100\% = 79,98\%.$$

Rasio Tahun 2016 sebesar 80,98% dengan perhitungan:

$$= (9.013,71/11.130,79) \times 100\% = 80,98\%.$$

**Target** Rasio Tahun 2017 sebesar 82,98% dengan perhitungan:

$$= (9.236,33/11.130,79) \times 100\% = 82,98\%$$

Tabel II.39

Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pekerjaan Umum

Untuk Rasio Tempat Pembuangan Sampah

Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2016 dan Target Tahun 2017

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	HASIL		Target 2017
			2015	2016	
1	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	m <sup>3</sup> / orang	5,3	0,78	0,79

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Boyolali

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Tahun 2015 sebesar 2.200 orang/TPS.

Tabel II.40

Capaian Aspek Pelayanan Bidang Penataan Ruang

Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2016 dan Target Tahun 2017

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	HASIL		Target 2017
			2015	2016	
1	Keserasian pembangunan antar sektor	%	100	100	100
2	Sosialisasi Perda RTRW Kab. Boyolali sebagai pedoman pemanfaatan ruang di Kab. Boyolali	paket	1	1	1
3	Website penataan ruang	paket	NA	NA	-
4	Monitoring kegiatan pemanfaatan ruang	Kec.	19	19	19

Sumber: DPU dan Penataan Ruang Kab. Boyolali

4) Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan antara rumah layak huni dengan jumlah rumah penduduk di seluruh wilayah kabupaten. Perkembangan pembangunan perumahan di Kabupaten Boyolali dengan indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.41  
Capaian Aspek Pelayanan Bidang Perumahan  
Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2016 dan Target Tahun 2017

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATU AN	HASIL		Target 2017
			2015	2016	
1	Rumah tangga pengguna air bersih	%	77,37	80, 24	86,65
2	Rumah tangga pengguna listrik	%	77	85,5	85,5
3	Rumah tangga bersanitasi	%	71,60	93,94	95,49
4	Rumah tidak layak huni	%	50	35	30
5	Kawasan permukiman kumuh	ha	3,3	2,75	2,20

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman, DPU PR Kab. Boyolali

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Tahun 2016 sebesar 85,5%, atau ada kenaikan sebesar 11,03% di banding Tahun 2015 sebesar 77%.

Target Tahun 2017 tidak bertambah karena Pemerintah Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki kewenangan dalam ketenagalistrikan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

Prosentase target untuk rumah tangga pengguna air bersih dan rumah tangga bersanitasi kewenangannya menjadi tanggung jawab Bidang Cipta Karya DPU PR Kabupaten Boyolali.

Penanganan permukiman tidak layak huni di Kabupaten Boyolali telah dilaksanakan dengan memberikan stimulan untuk penanganan rumah tidak layak huni. Sedangkan sumber pendanaan pelaksanaan penanganan rumah tidak layak huni berasal dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Boyolali. Target penanganan perbaikan rumah tidak layak huni Tahun 2017 sebanyak 2.867 unit dengan rincian dari dana APBN 254 unit, Provinsi Jawa Tengah 723 unit dan APBD Kabupaten Boyolali 1.890 unit. Dari data BPS pada Tahun 2016 jumlah rumah tidak layak huni di seluruh Kabupaten Boyolali sejumlah 53.959 unit sehingga pada Tahun 2017



jika bisa terealisasi perbaikan sebanyak 2.867 unit, maka jumlah rumah tidak layak huni berkurang sekitar 5%.

Target penanganan pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan pada Tahun 2017 ditarget berkurang 0,55 hektar yang dilaksanakan di Desa Karanggeneng Kecamatan Boyolali, dimana kondisi Tahun 2016 luasan permukiman kumuh seluas 2.75 ha. Dan dari hasil survey Tim Fasilitator Kotaku di 6 (enam) kecamatan yaitu Boyolali, Ngemplak, Banyudono, Sawit, Ampel dan Nogosari Luasan permukiman kumuh di 6 (enam) kecamatan itu seluas 33,5 hektar. Luasan permukiman di 6 (enam) kecamatan tersebut akan menjadi prioritas penanganan di Tahun 2017 -2021 oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

5) Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

5.1. Kegiatan pembinaan terhadap ormas, LSM dan OKP

Aspek ini menjelaskan tentang jumlah kegiatan pembinaan dan jumlah cakupan LSM, Ormas dan OKP yang dibina untuk membantu pemerintah dalam membantu kegiatan sosial kemasyarakatan. Jumlah LSM, Ormas dan OKP yang dibina sebanyak 87 ormas, LSM/OKP baik yang masih aktif atau tidak tetapi sudah terdaftar. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali mengadakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan tujuan untuk dapat membina dan mengevaluasi keberadaan Ormas, LSM dan OKP setempat. serta mendorong pengurus masing – masing Ormas, LSM dan OKP untuk mengaktifkan dan memperbaharui Surat Keterangan Terdaftar ( SKT ) bagi yang sudah habis masa berlakunya.

5.2. Kegiatan pembinaan politik daerah

Aspek ini menjelaskan tentang terwujudnya kegiatan pembinaan politik daerah sehingga dapat terlaksana sesuai dengan jumlah kegiatan yang telah direncanakan dan jadwal yang telah ditentukan. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali mengadakan 4 (empat) kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan politik daerah di Kabupaten Boyolali, diantaranya kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik, kegiatan forum- forum

diskusi politik dan kegiatan pengkondisian wilayah dan sosialisasi pemilu. adapun tujuan diselenggarakan kegiatan tersebut untuk menjalin koordinasi dengan mitra kerja, baik birokrasi yang terkait, partai politik maupun tokoh masyarakat yang berkecimpung dalam kegiatan berpolitik.

Tabel II.42  
Ketenteraman dan ketertiban umum  
serta perlindungan masyarakat Kabupaten Boyolali  
Tahun 2015-2016 dan Target Tahun 2017

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATU AN	HASIL		Target 2017
			2015	2016	
1	Prosentase LSM yang mempunyai SKT (Surat Keterangan Terdaftar)	%	NA	92,00	93,90
2	Cakupan sosialisasi/fasilitasi wawasan kebangsaan pada sekolah setingkat SLTA	%	NA	30,00	30,32
3	Cakupan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan	Kegiatan	3	3	22
4	Cakupan konflik antar kelompok masyarakat yang ditangani	%	NA	42,00	42,86
5	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	%	NA	78,00	78,00
6	Fasilitasi pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan di setiap Kecamatan.	Kegiatan	20	20	38
7	Cakupan kegiatan penyiapan tenaga, pengendalian kebisingan dan pengendalian keamanan lingkungan	Kegiatan	3	3	3
8	Cakupan kegiatan <i>event</i> pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan.	Kegiatan	20	20	20
9	Cakupan kegiatan untuk operasi penyakit masyarakat	Kegiatan	20	15	20
10	Cakupan pelayanan kebakaran di kabupaten	%	65	67	100
11	Jumlah Desa/Kelurahan yang menerapkan Desa/Kelurahan tangguh bencana	Desa	5	4	4
12	Cakupan kejadian tanggap darurat yang tertangani	%	65	65	67
13	Tingkat waktu tanggap ( <i>Response Time Rate</i> )	%	50	50	55

*Sumber data: Kesbangpol, BPBD Kab. Boyolali*

Dengan melihat hasil dari tabel II.42 tentang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Kabupaten Boyolali maka dapat direncanakan target pada Tahun 2017 sesuai dengan isian tabel tersebut, antara lain:

1. Prosentase LSM yang mempunyai Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan hasil capaian pada Tahun 2016 sebesar 92,00% maka pada Tahun 2017 ditargetkan sebesar 93,90%. untuk mencapai target tersebut maka diadakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap keberadaan Ormas, LSM dan OKP, serta kepemilikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) baik yang masih berlaku atau yang baru segera diperbaharui.
2. Cakupan sosialisasi/fasilitasi wawasan kebangsaan pada sekolah setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Sosialisasi wawasan kebangsaan pada sekolah setingkat SLTA dengan diadakan kegiatan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dengan tujuan untuk menyamakan Visi Misi dalam menjaga dan meningkatkan rasa solidaritas, mempererat rasa persaudaraan dalam kesatuan dan persatuan dan mengembangkan wawasan kebangsaan serta menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme dikalangan siswa tingkat SLTA.
3. Cakupan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang dijalankan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali dengan disediakan kegiatan fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan.
4. Cakupan konflik antar kelompok masyarakat yang ditangani. Kegiatan pencegahan dan pengkondisian konflik antar kelompok masyarakat yang ditangani oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali dengan melaksanakan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan yang diantaranya ada kegiatan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), kegiatan kapasitas kapabilitas masyarakat sipil dalam penyelesaian konflik sosial, pembentukan tim

penanganan konflik sosial dan Form Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

5. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

Dalam rangka menjaga partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum maka dilaksanakan kegiatan pengkondisian wilayah dan sosialisasi pemilu.

6. Fasilitasi pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan di setiap Kecamatan. Penyediaan Fasilitasi pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan di setiap kecamatan dengan diadakan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa, diantaranya dilaksanakan kegiatan Orketbang (Orientasi Ketahanan Bangsa), Paskibraka (Pasukan Pengibar Bendera Pusaka) dan lomba pengucapan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

7. Cakupan kegiatan penyiapan tenaga, pengendalian kebisingan dan pengendalian keamanan lingkungan.

a. Cakupan kegiatan untuk penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan terdiri dari :

- Pembinaan anggota linmas, dan
- Peningkatan kapasitas Satpol PP

b. Cakupan pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat terdiri dari :

- Pelaksanaan operasi tipiring,
- Pelaksanaan operasi cukai tembakau, dan
- Pelaksanaan operasi PKL dan Reklame.

c. Cakupan kegiatan dari pengendalian keamanan lingkungan terdiri dari :

- Pelaksanaan patroli wilayah,
- Pelaksanaan operasi terpadu,
- Pengamanan lebaran, Natal dan Tahun Baru, dan
- Pengamanan Giat Umum/Car Free Day.

Cakupan kegiatan tersebut pada Tahun 2015, Tahun 2016 adalah sebanyak 3 (tiga) kegiatan dan dilaksanakan dengan prosentase pelaksanaan sebesar 100 %. Untuk Tahun 2017 ditargetkan sama sebanyak 3 kegiatan.

8. Cakupan kegiatan *event* pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan.

Cakupan kegiatan ini adalah kegiatan Korsik (Korp Musik Praja Wibawa) dalam mengiringi setiap upacara hari-hari besar dan upacara kenegaraan lainnya. Upacara-upacara tersebut antara lain : Hari ulang Tahun Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (17 Agustus), Upacara KBBT (Karya Bakti Boyolali Tersenyum), Upacara TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa), Upacara Hari Pahlawan, Upacara Hari Jadi Kabupaten Boyolali, Upacara Hari Kesaktian Pancasila, dan Upacara-upacara lainnya yang diselenggarakan di Kabupaten Boyolali.

Kegiatan event pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan Tahun 2015 dan Tahun 2016 dilaksanakan masing-masing sebanyak 20 kegiatan dan masing-masing terlaksana sebesar 100 %. Untuk Tahun 2017 ditargetkan melaksanakan kegiatan tersebut sebanyak 20 (dua puluh) kegiatan.

9. Cakupan kegiatan untuk operasi penyakit masyarakat

Cakupan kegiatan ini adalah melakukan Penyuluhan dan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi di wilayah Kabupaten Boyolali. Kegiatan tersebut adalah melakukan sidak dan operasi di Lokasi yang disinyalir merupakan tempat mangkalnya PSK antara lain di warung remang-remang, panti pijat, salon-salon, hotel, karaoke, penginapan-penginapan dan tempat-tempat lain yang pantas dicurigai sebagai tempat mangkal PSK. Kegiatan operasi dilaksanakan secara gabungan yang melibatkan unsur dari Kepolisian dan juga jajaran TNI.

Kegiatan untuk operasi penyakit masyarakat pada Tahun 2015 dilaksanakan sebanyak 20 (dua puluh) kegiatan dan Tahun 2016 hanya melaksanakan sebanyak 15 (lima belas) Kegiatan. Turunnya kegiatan pada Tahun 2016 dari 20 (dua puluh) kegiatan pada Tahun sebelumnya menjadi 15 (lima belas) kegiatan disebabkan karena besaran anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut turun secara nominal, hal ini

mengakibatkan penyesuaian jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Meskipun mengalami penurunan secara kuantitas namun pelaksanaannya tetap dilaksanakan dengan maksimal. Untuk Tahun 2017 kembali ditargetkan sebanyak 20 (dua puluh) kegiatan.

10. Cakupan pelayanan kebakaran di kabupaten

Cakupan pelayanan Kebakaran di Kabupaten Boyolali adalah kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran di mana tugasnya adalah pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat yang berada di Kabupaten Boyolali. Pihak-pihak yang dilayani adalah semua warga tanpa terkecuali baik yang berupa perumahan perorangan, tempat usaha perekonomian, instansi pemerintah, instansi swasta dan juga instansi-instansi lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Boyolali. Untuk mendukung keberhasilan pelayanan kebakaran di wilayah Kabupaten Boyolali, maka Cakupan pelayanan kebakaran meliputi kegiatan-kegiatan antara lain; mengadakan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan THL (Tenaga Harian Lepas) Bidang Dakar (Pemadam Kebakaran), pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran.

11. Kegiatan untuk Cakupan pelayanan kebakaran di kabupaten pada Tahun 2015 sebesar 65 % dan Tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi sebesar 67 %. Pada Tahun 2017 target yang akan dilaksanakan adalah sebesar 100 %.

Desa yang menerapkan Desa Tangguh Bencana Tahun 2016 ada 4 (empat) desa di Kecamatan Selo yaitu: Desa Lencoh, Desa Samiran, Desa Tlogolele, Desa Jrah. Cakupan kejadian tanggap darurat yang tertangani Tahun 2016 tercapai 65% yaitu banyaknya kejadian di Kabupaten Boyolali hanya dapat menangani 65% yang 35% tertangani oleh masyarakat secara gotong royong dan bantuan dari relawan.

Cakupan pelayanan kebakaran di Kabupaten Boyolali tercapai 65% yaitu adanya kebakaran sebanyak 26 (dua puluh enam) kejadian kebakaran hanya bisa tertangani sebanyak 17 (tujuh

belas). Tingkat waktu tanggap (*Response Time Rate*) tercapai 50% karena jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran < 1 jam setelah pengaduan 17 kejadian dibagi jumlah kejadian 34.

6) Sosial

Tabel II.43  
 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Sosial  
 Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2016 dan Target Tahun 2017

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	HASIL		Target 2017
			2015	2016	
1	2	3	4	5	6
1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Unit	16	17	17
2	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	%	142,04	33,32	23
3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	37,13	35,70	23

Sumber: *Dinas Sosial Kab. Boyolali*

Pada Tahun 2016 terdapat 17 (tujuh belas) sarana sosial yang terdiri dari 16 (enam belas) unit panti asuhan dan 1 unit panti jompo. Dari 17 (tujuh belas) panti tersebut pada Tahun 2015 tertangani sebanyak 16 (enam belas) panti sesuai yang ditargetkan. Sedangkan pada Tahun 2016 tertangani sebanyak 16 (enam belas) panti. Penanganan ini berupa pemberian barang untuk memenuhi kebutuhan panti seperti kasur, busa, rak, dan lain-lain. Sarana sosial tersebut sebenarnya belum cukup menampung permasalahan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di Kabupaten Boyolali, salah satunya belum ada rumah singgah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Dinas Sosial masih harus bekerja sama dengan kabupaten lain seperti Surakarta dan Klaten.

Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang ada pada Tahun 2015 sebanyak 65.463 orang, dari jumlah tersebut yang mendapatkan bantuan sosial sebanyak 21.704 orang. Dengan demikian jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang tertangani atau mendapat pelayanan sosial sebanyak 24.306 orang.

Pada Tahun 2016 terdapat 17 (tujuh belas) sarana sosial yang terdiri dari 16 (enam belas) unit panti asuhan dan 1 unit panti jompo. Dari 17 (tujuh belas) panti tersebut pada Tahun 2015 tertangani sebanyak 16 (enam belas) panti sesuai yang ditargetkan. Sedangkan pada Tahun 2016 tertangani sebanyak 16 (enam belas) panti. Penanganan ini berupa pemberian barang untuk memenuhi kebutuhan panti seperti kasur, busa, rak, dan lain-lain. Sarana sosial tersebut sebenarnya belum cukup menampung permasalahan PMKS di Kabupaten Boyolali, salah satunya belum ada rumah singgah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi masih harus bekerja sama dengan Kabupaten lain seperti Surakarta dan Klaten.

Prosentase PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah perbandingan jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang memperoleh bantuan sosial dengan jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang ada. Pada Tahun 2016 realisasi sebesar 33,32%. Yang mendapatkan bantuan terhadap PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) sebanyak 25.197 orang, sedangkan jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang ada di Kabupaten Boyolali sebanyak 75.619 orang.

Sedangkan prosentase penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah perbandingan jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang tertangani dengan jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang ada. Pada Tahun 2016 realisasi sebesar 35,70%. Penanganan terhadap PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) sebanyak 26.997 orang, sedangkan jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang ada di Kabupaten Boyolali sebanyak 75.619 orang.

#### 6)142 Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar

##### 1) Ketenagakerjaan

Tabel II.44

Capaian Aspek Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan



## Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2016 dan Target Tahun 2017

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	HASIL		Target 2017*
			2015	2016	
1	2	3	4	5	6
1	Angka partisipasi angkatan kerja	%	74,82	74,68	74,76
2	Angka sengketa pengusaha-pekerja per Tahun	Kasus	7	14	20
3	Pencari kerja yang ditempatkan	Orang	3.863	3.451	3465
4	Tingkat pengangguran terbuka	%	4,95	2,03	2
5	Keselamatan dan perlindungan	%	100	100	100

Sumber: *Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kab. Boyolali*

Angka partisipasi angkatan kerja merupakan pebandingan antara jumlah Penduduk Angkatan Kerja (PAK) dan jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK). Jumlah PAK sebanyak 548.328 orang sedangkan PUK sebanyak 734.266 orang. Sehingga didapat angka partisipasi angkatan kerja sebesar 74,68%.

Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun adalah jumlah sengketa atau perselisihan yang dilaporkan. Angka sengketa pengusaha pada Tahun 2016 sebanyak 14 (empat belas) kasus.

Dengan semakin berkurangnya kasus atau sengketa maka menunjukkan kinerja yang baik dimana pembinaan tata cara penyelesaian HI (Hubungan Industrial) telah berhasil. Selain itu tidak semua sengketa dilaporkan. Kasus-kasus yang terjadi dapat tertangani dengan baik dan selesai dengan PB (Perjanjian Bersama) tidak sampai ke PHI (Pengadilan Hubungan Industrial).

Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan kepada pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat minat dan kemampuan. Pencari kerja yang ditempatkan pada Tahun 2016 sebanyak 3.451 orang. Penempatan melalui mekanisme Antar Kerja Antar Negara (AKAN) sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) orang, Antar Kerja Lokal (AKL) sebanyak 3,227 (tiga koma dua ratus dua puluh tujuh) dan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) sebanyak 4 (empat) orang.

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah perbandingan antara jumlah penganggur terbuka dan jumlah angkatan kerja. Jumlah penganggur terbuka Tahun 2016 sebanyak 11.149 orang dan jumlah angkatan kerja sebanyak 548.328 orang. Sehingga prosentase tingkat pengangguran terbuka Tahun 2016 sebesar 4,95%.

Prosentase tingkat pengangguran Tahun 2016 didapat dari :

$$\frac{\text{Jumlah Penganggur Terbuka (11.149 org)}}{\text{Jumlah Angkatan kerja (548.328 org)}} = 2,03 \%$$

Keselamatan dan perlindungan adalah perbandingan jumlah perusahaan yang menerapkan K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja) pada Tahun *n* dengan jumlah perusahaan di wilayah kabupaten pada Tahun *n*.

Jumlah perusahaan di Kabupaten Boyolali Tahun 2016 sebanyak 627 perusahaan meliputi perusahaan besar, sedang dan kecil. Dengan demikian jumlah perusahaan yang menerapkan K3 adalah sama dengan jumlah perusahaan wajib lapor yaitu 627 perusahaan. Berdirinya sebuah perusahaan atau tempat usaha dimana ada aktivitas dan tenaga kerjanya maka perusahaan ini wajib menerapkan K3. Namun tidak atau belum semua perusahaan mempunyai unsur-unsur K3 seperti P2K3 (Pengurus Pengelola K3).

- 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - a) Capaian 2015-2016

Tabel II.45  
 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2016

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	HASIL	
			2015	2016
1	Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	33	50
2	Penyediaan data pilah gender	%	100	-
3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	50,87	Data belum
4	Rasio KDRT	Kasus	23	7
5	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan	%	100	100

b) Target 2017

Tabel II.46  
 Capaian Aspek Pelayanan Bidang  
 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
 Kabupaten Boyolali Target Tahun 2017

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Target 2017
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	69,56
2	Jumlah Desa Layak Anak	desa	25
3	Kecamatan Sayang Ibu dan Anak	%	26
4	Jumlah produk kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	dokumen	1
5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	69,31
6	Cakupan penanganan aduan	%	100

Sumber: *Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Boyolali*

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah, jumlah PNS di Kabupaten Boyolali Tahun 2015 sebanyak : 9.528 orang dengan rincian 4681 laki-laki dan 4847 perempuan. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sudah mengalami peningkatan peran perempuan di lembaga pemerintahan dari 48,51%, di Tahun 2014 menjadi 50,87% di Tahun 2015. Tahun 2016 belum diperoleh data dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaporkan, pada Tahun 2014 sebanyak 83 kasus, Tahun 2015 yang dapat difasilitasi sebanyak 56 kasus. Pada Tahun 2016 dapat tertangani sebanyak 28 kasus. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan pada Tahun 2014 sebanyak 83 kasus, pada Tahun 2015 sebanyak 56 kasus, pada Tahun 2016 sebanyak 28 kasus. Seluruh pengaduan telah ditindak lanjuti sesuai dengan jenis kasusnya.

Rasio Kekerasan Terhadap Anak pada dasarnya rasio kekerasan terhadap anak meningkat namun sesuai laporan yang telah diterima

bahwa kekerasan terhadap anak pada Tahun 2014 terjadi 33 kasus, Tahun 2015 terjadi 29 kasus. Tahun 2016 dilaporkan terjadi 21 kasus. Hal ini disebabkan oleh karena masih kurang terpantaunya kejadian-kejadian yang dialami oleh anak selalu ditutup-tutupi oleh keluarganya karena merasa malu. Rasio kekerasan terhadap anak meningkat setiap Tahun utamanya pelecehan seksual, pra pergaulan, pengaruh Ilmu Teknologi dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang Hukum. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Tahun 2015 dan 2016 tercapai 69,56 ditargetkan Tahun 2017 bertahan pada 69,56. Jumlah Desa Layak Anak Tahun 2015 sebanyak 5 desa, Tahun 2016 meningkatkan menjadi 22 dan Tahun 2017 ditargetkan menjadi 25 desa. Desa Layak Anak ini merupakan indikator yang sangat strategis dalam menciptakan lingkungan yang optimal bagi tumbuh kembang dan perlindungan hak anak.

Jumlah Kecamatan Sayang Ibu dan Anak Tahun 2015 sebanyak 7%, Tahun 2016 meningkatkan menjadi 15% dan Tahun 2017 ditargetkan menjadi 26%. Kecamatan Sayang Ibu dan Anak ini merupakan indikator yang sangat strategis dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ibu dan anak. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan ukuran tingkat keberhasilan pembangunan seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menekankan pada status perempuan Tahun 2015 dan 2016 tercapai 69,30. Ditargetkan Tahun 2017 meningkat menjadi 69,31. Produk kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sangat penting dalam rangka mendorong pengarusutamaan gender dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perlindungan anak. Ditargetkan Tahun 2017 akan ada satu produk kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

### 3) Ketahanan Pangan

Tabel II.47  
Capaian Aspek Pelayanan Bidang Ketahanan Pangan  
Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2016

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	HASIL	
			2015	2016

1	2	3	4	5
1	Meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras) dibandingkan kebutuhan konsumsi penduduk	Skor	1,38	1,76
2	Terlaksananya pembelian gabah sesuai HPP	LUEP	46	46
3	Meningkatnya cadangan pangan masyarakat	Ton	735,047	735,047
4	Cakupan Desa P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan)	Desa	50	70
5	Meningkatnya jumlah kelompok tani yang menerapkan sistem jaminan mutu usaha pasca panen dan pengolahan	Kelompok	38	38
6	Penanganan daerah rawan pangan	%	100	100
7	Terpantaunya pola dan alur dan distribusi pangan	Kecamatan	19	19
8	Ketersediaan energi dan protein per kapita	%	144,98	172,12
9	Penguatan cadangan pangan di daerah	%	91,68	127,33
10	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	%	90,33	100
11	Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	100	100
12	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	87,1	86,5
13	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	82,6	82,6
14	Regulasi Ketahanan Pangan	Ada/Tidak	Ada	Ada
15	Ketersediaan pangan utama	%	138	176,45
16	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	-	-	
	- beras	kg/kap/th	95,1	77,3
	- jagung	kg/kap/th	7,3	0,4
	- kedelai	kg/kap/th	40,3	13,4
	- kacang tanah	kg/kap/th	0,77	1,8
	- ubi jalar	kg/kap/th	3,2	7,1
	- ubi kayu	kg/kap/th	15,9	18,6
17	Ketersediaan pangan utama			
	- beras	Ton	154.849	166.561,2
	- jagung	Ton	97.702	157.779,2
	- kedelai	Ton	4.556	4.547,5
	- kacang tanah	Ton	2.282	2.799,7
	- ubi jalar	Ton	347	353,8

- ubi kayu	Ton	97.526	88.135,2
------------	-----	--------	----------

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali

Keterangan: Angka ketersediaan Bulan Desember masih angka sementara.

- a Meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras) dibandingkan kebutuhan konsumsi penduduk, target Tahun 2016 sebesar 1,59 realisasi 1,76 (capaian kinerja 110,69%). Artinya jumlah ketersediaan pangan strategis (beras) beras selama 1 (satu) Tahun dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi penduduk selama 1 (satu) Tahun masih surplus dengan perbandingan 1,76 kali. Faktor kunci keberhasilannya adalah jumlah produksi pangan khususnya beras lebih tinggi (surplus) dibanding kebutuhan konsumsi. Kendalanya adalah masih tingginya tingkat konsumsi beras di masyarakat.
- b Terlaksananya pembelian gabah sesuai HPP, target 46 LUEP realisasi 46 LUEP (capaian kinerja 100%). Realisasi harga pembelian gabah di tingkat petani pada Tahun 2016 masih sesuai atau di atas HPP yaitu Rp.3.675/kg s/d 4.200/kg GKP di tingkat petani. Faktor kunci keberhasilan adanya monitoring dan pembinaan secara intensif kepada LUEP dan LDPM untuk terus membeli gabah petani sesuai dengan standar HPP, sehingga dapat menjaga kestabilan harga gabah. Kendalanya sejak Tahun 2011 tidak ada lagi dana talangan bagi LUEP sebagai modal membeli gabah petani.
- c Meningkatnya jumlah cadangan pangan masyarakat, realisasi jumlah cadangan pangan sebesar 735,047 ton, Artinya jumlah cadangan pangan baik yang ada di pemerintah dan masyarakat jumlahnya 735,047 ton. Capaian kinerja tersebut dicapai dengan penumbuhan dan pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD), Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), Pembinaan dan pengembangan LUEP serta kerjasama dengan LPMD binaan dari Bappermasdes. Faktor kunci keberhasilan adanya penambahan cadangan gabah yang berasal dari bantuan pemerintah dan berkembangnya kelembagaan dan kegiatan LDPM dan LPMD. Kendala: Pengelolaan cadangan pangan dalam bentuk

- gabah, membutuhkan biaya perawatan, sehingga sebagian cadangan pangan diwujudkan dalam bentuk uang.
- d Cakupan desa P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan). Realisasi jumlah desa P2KP pada Tahun 2016 yaitu 70 desa, artinya pada sampai dengan Tahun 2016 secara akumulatif sudah terealisasi 70 desa yang mendapat fasilitasi kegiatan berupa bantuan peralatan dan pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan maupun kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang beraneka ragam. Faktor kunci keberhasilannya adalah adanya dukungan anggaran dari Dana Dekonsentrasi APBN dan peran aktif kelompok masyarakat dalam merespon kegiatan P2KP dan peran peduli dari Pemerintah Desa dan Pendamping Kegiatan P2KP.
  - e Meningkatnya jumlah kelompok tani yang menerapkan jaminan mutu usaha pasca panen dan pengolahan, realisasi pada Tahun 2016 sebanyak 38 kelompok wanita tani, artinya sampai dengan Tahun 2016, sudah ada 38 kelompok binaan dari BKP-PP yang telah memiliki keterampilan pengolahan pangan (pasca panen), memiliki ijin SP.IRT dan sertifikasi produk berupa Prima-3 dan PSAT (Produk Segar Asal Tumbuhan). Faktor kunci keberhasilannya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mutu dan keamanan pangan dan didukung dengan fasilitasi dari pemerintah untuk mengembangkan kelompok pengolah pangan lokal.
  - f Penanganan daerah rawan pangan. Realisasi penanganan daerah rawan pangan pada Tahun 2016 sebesar 100%. Bentuk kegiatan penanganan daerah rawan pangan adalah penguatan tim SKPG (Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi) dan bantuan pangan ke daerah yang terkena rawan pangan, yaitu desa Jrakah, Kecamatan Selo, Desa Tegalgiri Kecamatan Nogosari, Desa Giriroto Kecamatan Ngemplak, Desa Trayu Kecamatan Banyudono, Desa Klego Kecamatan Klego, dan Desa Sambu Kecamatan Sambu. Faktor kunci keberhasilan adanya koordinasi dengan SKPD terkait. Kendala luasnya wilayah Kabupaten Boyolali yang mengakibatkan

sulitnya pemantauan kejadian bencana yang mengarah kepada rawan pangan.

- g Terpantaunya pola dan alur distribusi pangan. Realisasi pada Tahun 2016 sebesar 19 kecamatan. Artinya kondisi ketahanan pangan, yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, akses, dan harga pangan di 19 kecamatan se Kabupaten Boyolali dapat terpantau secara rutin, sehingga bisa memberikan gambaran riil kondisi ketahanan pangan di daerah sebagai bahan pengambil kebijakan. Faktor kunci keberhasilan koordinasi dan laporan dari petugas kecamatan yang menjadi Tim Penyusun Laporan berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah. Kendala keakuratan data dan terjadinya keterlambatan pengumpulan data dari kecamatan.
- h Ketersediaan energi dan protein per kapita, realisasi pada Tahun 2016 sebesar 172,12%. Artinya, ketersediaan energi dan protein yang berasal dari produksi bahan pangan pada Tahun 2016 sudah melebihi standar ketersediaan, yaitu ketersediaan energi sebesar 4.172,92 kkal/kapita/hari dari Standar Angka Kecukupan energi sebesar 2.400 kkal/kapita/hari, sedangkan ketersediaan protein sebesar 107,37 gram/kapita/hari dari standar Angka kecukupan protein sebesar 66 gram/kapita/hari. Faktor kunci keberhasilannya adalah meningkatnya produksi sehingga meningkatkan ketersediaan bahan pangan terutama sumber energi dan protein. Kendalanya keterlambatan pengumpulan data.
- i Penguatan cadangan pangan di daerah, realisasi penguatan cadangan pangan pemerintah daerah pada Tahun 2016 sebesar 127,33%. Jumlah cadangan pangan (khususnya beras) di Kabupaten Boyolali, berdasarkan pendekatan jumlah produksi padi dan jumlah penduduk Tahun 2016, besarnya adalah 127,33 ton, dari standar cadangan pangan pemerintah sebesar 100 ton. Faktor kunci keberhasilan peningkatan jumlah produksi padi dan berkembangnya kelembagaan cadangan pangan masyarakat.
- j Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah, Realisasi pada Tahun 2016 adalah 100%. Pada Tahun 2016, sudah tersedia informasi secara rutin terutama mengenai mengenai informasi harga dan pasokan pangan yang ada di 9 pasar kecamatan yang menjadi lokasi pemantauan dan data akses



pangan di 19 kecamatan selama 12 bulan. Faktor kunci keberhasilan adanya tim pengumpul, analisis, dan penyusun data yang melaporkan secara rutin dan menyusun laporan sebagai bahan informasi yang bisa digunakan. Selain itu di Badan Ketahanan Pangan sudah ada website yang berisi tentang informasi harga pangan di 19 kecamatan yang diupdate setiap hari.

- k Stabilitas harga dan pasokan pangan, realisasi pada Tahun 2016 sebesar 100%. Pada Tahun 2016 perkembangan harga pangan utama dapat terdata dan sesuai dengan target. Capaian 100% ini dikarenakan belum adanya data target harga, sehingga harga target disamakan dengan harga realisasi, sehingga capaiannya 100. Sedangkan untuk pasokan dan akses pangan cukup lancar sehingga tidak terjadi kelangkaan pasokan pangan. Faktor kunci keberhasilan kelancaran distribusi pangan dan stabilnya produksi pangan dan pasokan pangan. Kendalanya kestabilan harga pangan pokok sangat dipengaruhi oleh mekanisme pasar dan berbagi faktor eksternal yang sulit dikendalikan oleh OPD.
- l Skor Pola Pangan Harapan (PPH), pada Tahun 2016 skor PPH Kabupaten Boyolali sebesar 86,5. Pada Tahun 2016 tingkat panganekaragaman konsumsi pangan masyarakat (umbi-umbian, sereal, kacang-kacangan, daging, ikan, buah, sayur, dsb) semakin beragam dan seimbang sesuai dengan Pola Pangan Harapan (PPH). Capaian ini belum mencapai target SPM yaitu sebesar 90 dan RPJMD Kabupaten Boyolali sebesar 88. Faktor kunci keberhasilan meningkatnya sosialisasi dan fasilitasi untuk mendukung diversifikasi pangan serta berkembangnya konsumsi pangan lokal serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi pangan yang bergizi, beragam, seimbang dan aman. Kendalanya masih tingginya tingkat konsumsi beras pada masyarakat.
- m Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan, pada Tahun 2016 capaian target sebesar 82,6%. Artinya dari hasil pemantauan, pengawasan dan pengujian sampel pangan berupa pangan segar dan pangan olahan, 82,6% (dari 23 sampel, 19 diantaranya dinyatakan aman, tidak melebihi batas ambang residu pestisida

dan penggunaan boraks). Faktor kunci keberhasilan meningkatnya kesadaran masyarakat akan mutu dan keamanan pangan dan pemantauan serta pengawasan produk pangan secara rutin serta sosialisasi dan pembinaan tentang keamanan pangan. Kendalanya masih banyak beredarnya makanan atau jajanan-jananan yang kurang sehat dan kurang aman di masyarakat dan di sekolah-sekolah.

n Regulasi ketahanan pangan

Regulasi tentang ketahanan pangan di Kabupaten Boyolali sampai dengan Tahun 2016, antara lain:

- Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Boyolali.
- Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Boyolali
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Ketahanan Pangan.
- Instruksi Bupati Boyolali Nomor 02925 Tahun 2014 tentang Penggunaan bahan pangan dan makanan produk lokal pada acara rapat/ pertemuan, resepsi/ jamuan makan di Kabupaten Boyolali

o Ketersediaan pangan utama (beras)

Ketersediaan beras di Kabupaten Boyolali pada Tahun 2016 sebesar 166.561,2 ton, sementara kebutuhan konsumsi beras selama satu Tahun sebesar 94.396,9 ton, sehingga surplus 72.164,3 ton. Secara perbandingan maka ketersediaan beras dibanding kebutuhan konsumsi sebesar 176,45%.

p Pengeluaran konsumsi pangan per kapita. Berdasarkan hasil survey PPH (Pola Pangan Harapan) Tahun 2016, pola konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Boyolali menunjukkan keberagaman dan keseimbangan dalam komposisi bahan pangan yang dikonsumsi, dengan skor PPH sebesar yaitu 86,5. Skor PPH Tahun 2016 mengalami penurunan dibanding dengan Tahun

2015, tetapi masih tergolong baik. Faktor kunci keberhasilan ketersediaan sumber bahan pangan yang beraneka macam dalam jumlah yang mencukupi dan meningkatnya kesadaran konsumsi pangan yang bergizi, beragam, seimbang dan aman (B2SA). Kendalanya dalam pengukuran tingkat konsumsi bahan pangan berdasarkan hasil survey ke masyarakat, yang terkadang terjadi kurangnya keakuratan data.

- q Ketersediaan pangan utama. Ketersediaan pangan untuk komoditas beras, jagung, dan ubi kayu, dan kacang tanah melebihi kebutuhan, sedangkan ketersediaan komoditas kedelai dan ubi jalar masih belum mencukupi. Faktor kunci keberhasilan yaitu produksi komoditas pangan yang masih melebihi jumlah kebutuhan konsumsi masyarakat. Kendalanya masih rendahnya ketersediaan kedelai, yang disebabkan kurangnya produksi kedelai di masyarakat. Hal ini juga ditambah dengan masyarakat masih lebih suka menggunakan kedelai impor dalam pembuatan tahu tempe.

Tabel II.48  
Target Aspek Pelayanan Bidang Ketahanan Pangan  
Kabupaten Boyolali Tahun 2017

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Target Tahun 2017
1	2	3	
1	Persentase desa yang memiliki Lumbung Pangan Masyarakat Desa	%	19,46
2	Persentase penguatan cadangan pangan daerah	%	92
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	89
4	Regulasi Ketahanan Pangan	Ada/Tidak	Ada
5	Persentase Ketersediaan pangan utama (beras)	%	175
6	Ketersediaan pangan utama		
	- beras	Ton	160.000
	- jagung	Ton	150.000
	- kedelai	Ton	5.000
	- kacang tanah	Ton	2.800
	- ubi jalar	Ton	500
	- ubi kayu	Ton	90.000

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali

1. Persentase desa yang memiliki Lumbung Pangan Desa.

Indikator kinerja target ini berupa penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pangan di tingkat desa yaitu Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) sebesar 19,46%. Artinya pada Tahun 2017 ini 19,46% desa di Kabupaten Boyolali sudah memiliki LPMD. Cara mencapai target yaitu melalui penumbuhan kelompok-kelompok LPMD baru dan pengembangan kelompok yang sudah ada, melalui fasilitasi bantuan gabah dan pembinaan serta pelatihan kelompok LPMD.

2. Persentase penguatan cadangan pangan daerah.

Indikator kinerja target ini berupa penyediaan dan pengembangan cadangan pangan daerah, baik yang ada di pemerintah maupun di masyarakat (LPMD, LDPM, dan LUEP). Target kinerja sebesar 92% artinya jumlah cadangan pangan yang ada di Kabupaten Boyolali minimal sebesar 92% dari standar 100 ton, yaitu sebesar 92 ton. Cadangan pangan ini digunakan jika terjadi kondisi rawan pangan, baik rawan pangan kronis maupun akibat bencana alam. Cara mencapai target yaitu melalui pengadaan gabah untuk cadangan pangan serta pengelolaan cadangan pangan.

3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Indikator kinerja target ini berupa upaya pencapaian konsumsi pangan masyarakat yang bergizi, beragam, seimbang, dan aman (B2SA) baik dari segi keseimbangan gizi maupun keragaman jenis pangan. Target kinerja sebesar 89, artinya kondisi konsumsi pangan masyarakat dari segi keseimbangan gizi dan keragaman jenis pangan 89% dari skor maksimal 100%. Cara mencapai target melalui kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan, sosialisasi dan kampanye konsumsi pangan lokal, dan pelatihan-pelatihan pengolahan pangan lokal.

4. Regulasi Ketahanan Pangan

Indikator kinerja ini berupa adanya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketahanan pangan baik yang sudah ada dan masih berlaku maupun peraturan baru. Target kinerja berupa terlaksananya regulasi ketahanan pangan dan dapat dimanfaatkan oleh stakeholder.

5. Persentase ketersediaan pangan utama (beras)

Indikator kinerja ini berupa ketersediaan pangan, terutama beras berdasarkan perhitungan jumlah produksi dan jumlah kebutuhan konsumsi masyarakat. Target kinerja sebesar 175%, artinya jumlah ketersediaan beras melebihi (surplus) jika dibandingkan dengan kebutuhan, dengan rasio sebesar 175%. Cara mencapai target dengan peningkatan produksi beras dan pengurangan tingkat konsumsi beras masyarakat.

6. Ketersediaan pangan utama.

Indikator ini berupa pencapaian kondisi ketersediaan beberapa komoditas pangan utama sesuai dengan tabel di atas. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target berupa koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan produksi komoditas pangan.

4) Pertanian

Tabel II.49  
 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pertanian  
 Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2016 dan Target Tahun 2017

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATU AN	HASIL		Target 2017
			2015	2016	
1	Penanganan permasalahan di bidang keagrariaan	%	70	70	70
2	Fasilitasi pengelolaan, pemanfaatan, pelepasan dan alih fungsi tanah kas desa	desa	10	10	10

Sumber data: Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Boyolali, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan DPU PR Kab. Boyolali

Permasalahan di bidang keagrariaan pada Tahun 2015 terealisasi 70%, Tahun 2016 terealisasi 70%, terealisasi 70% atau capaian kinerjanya 100%. Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanian.

1. Penanganan Permasalahan di Bidang Keagrarian
  - a. Indikator ini pada Tahun 2016 dengan target 70% dapat terealisasi 70% atau capaian kinerja sebesar 100% sehingga indikator ini dapat tercapai, dibandingkan dengan Tahun lalu kinerjanya sama sebesar 100%, hal ini dapat tercapai karena:
    - i. Telah terbentuknya Tim Fasilitasi Penyelesaian

Permasalahan Pertanahan di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2016;

- ii. Adanya koordinasi lintas sektoral antara dinas/instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan bidang kewenangan masing-masing;
- iii. Adanya Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penatagunaan, kepemilikan, pemanfaatan, dan penguasaan tanah.

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

i. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan. Untuk kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan dimaksud telah dibentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan. Tugas Tim dimaksud, antara lain:

- a) Melakukan kajian terhadap laporan/pengaduan masyarakat atas permasalahan pertanahan;
- b) Melakukan rapat-rapat koordinasi untuk menetapkan langkah-langkah fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan;
- c) Memfasilitasi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan penyelesaian.

ii. Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-bnar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar Rp.1.529.500,00 dari anggaran sebesar Rp.46.290.000,00 digunakan sebesar Rp.44.760.000,00

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik. Kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan dengan indikator tertib administrasi Pemerintahan di Bidang Keagrariaan sudah tercapai. Permasalahan dalam fasilitasi penyelesaian pertanahan diantaranya adalah tidak semua kewenangan penyelesaian permasalahan berada pada Pemerintah Daerah Kabupaten, namun merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi atau

Pemerintah Pusat oleh sebab itu perlu ditingkatkan koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi terkait.

Pada Tahun 2016 telah dilaksanakan fasilitasi terhadap penyelesaian permasalahan-permasalahan pertanahan antara lain:

1. Penanganan permasalahan status tanah yang digunakan MTS Negeri Teras di Desa Kopen Kecamatan Teras;
2. Penanganan permasalahan status tanah yang dimohon warga masyarakat di Desa Pojok Kecamatan Nogosari;
3. Penanganan permasalahan status tanah yang dimohon warga masyarakat Kelurahan Siswodipuran Kecamatan Boyolali;
4. Penanganan Permasalahan dampak pembangunan Jalan Tol di Desa Dibal Kecamatan Ngemplak;
5. Penanganan permohonan lahan relokasi yang diajukan oleh warga masyarakat dampak pembangunan Waduk Kedung Ombo (Sdr Jaswadi HS dkk);
6. Penanganan permohonan pensertifikatan lahan relokasi yang diajukan oleh warga masyarakat dampak pembangunan Waduk Kedung Ombo (Sdr Bejo Maryatin dkk);
7. Penanganan permasalahan pensertipikatan tanah warga masyarakat di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede;
8. Penanganan permasalahan akses jalan warga masyarakat dampak pemagaran kawasan KKOP Bandara Adi Soemarmo di Desa Dibal Kecamatan Ngemplak;
9. Penanganan Permasalahan pengadaan tanah Jalan Tol Salatiga-Boyolali di Desa Brajan Kecamatan Mojosongo;
10. Penanganan permasalahan status tanah warga masyarakat di Desa Bendan Kecamatan Banyudono;
11. Penanganan permasalahan status tanah yang ditempati warga masyarakat di Desa Penggung Kecamatan Boyolali;
12. Penanganan permasalahan tanah warga masyarakat di Desa Sendangrejo Kecamatan Klego;
13. Penanganan permasalahan tanah Aset Pemerintah Kabupaten Boyolali di Kecamatan Boyolali;
14. Penanganan permasalahan status tanah yang digunakan SMA N 1 Nogosari di Desa Glonggong Kecamatan Nogosari;

15. Penanganan permasalahan Aset tanah di Kelurahan Sambeng Kecamatan Juwangi;
16. Penanganan permasalahan status tanah yang digunakan warga masyarakat di Kelurahan Banaran Kecamatan Boyolali;
17. Penanganan permasalahan status tanah yang digunakan relokasi RSUD Simo di Desa Pelem Kecamatan Simo;
18. Penanganan permasalahan status tanah yang digunakan untuk Rusunawa di Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo;
19. Penanganan permasalahan status tanah yang digunakan untuk Kebon Raya di Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo;
20. Penanganan permasalahan status tanah yang digunakan untuk Balai Warga Kampung Surodadi di Kelurahan Siswodipuran Kecamatan Boyolali;
21. Penanganan permasalahan status tanah yang digunakan untuk relokasi Puskesmas Juwangi di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi;
22. Penanganan permasalahan pemanfaatan tata ruang wilayah di Desa Kebonbimo Kecamatan Boyolali, Tawengan Kecamatan Sambu dan Ketitang Kecamatan Nogosari;
23. Penanganan permasalahan dampak pembangunan jalan tol Solo-Kertosono I di Wilayah Kecamatan Ngemplak;
24. Penanganan permasalahan administrasi pertanahan/tanah tidak bertuan di Wilayah Kabupaten Boyolali;
25. Fasilitasi implementasi surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3291/020/VII/2016 perihal Pendayagunaan tanah negara untuk pedagang kaki lima;
26. Fasilitasi tindak lanjut penanganan fasum fasos yang terkena pengadaan tanah jalan Tol Salatiga-Boyolali.



5) Lingkungan Hidup

Tabel II.50  
Capaian Aspek Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup  
Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2016

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	HASIL	
			2015	2016
1	2	3	4	5
1	Persentase penanganan sampah	%	78,4	NA
2	Pencemaran status mutu air	Usaha/Keg	10	10
3	(Cakupan jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan adm. dan teknis pencegahan pencemaran air)	%	100	100
4	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL/UPL	%	94,1	100
5	(Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang ditindaklanjuti)	%	100	100
6	Pencemaran kualitas udara	Usaha/Keg	10	10
7	Prosentase jumlah usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak bergerak yang mentaati persyaratan adm. dan teknis pencegahan pencemaran udara	%	100	100
8	Cakupan luas lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	Kec (Ha)	19 kec	19 kec

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Boyolali

Tabel II.51  
Target Aspek Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup  
Kabupaten Boyolali Tahun 2017

No	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Target 2017	Program
1	Luasan RTH Publik wil. Kota/ kawasan perkotaan (akumulasi RTH total) RTH Tahun 2016 : ± 1.289.322 m2)	M2	1.324.322	Pengell. RTH
2	% ketersediaan luasan RTH Publik sebesar 20% dari wilayah kota/ kawasan perkotaan	%	2,95	
3	Sumur resapan dan sejenisnya	unit	1540	Perindungan dan Konservasi SDA & LH

4	Cakupan pengelolaan sampah mandiri	Desa / kel	2	Pengembangan Kinerja Pengell. Persampahan
5	Prosentase aduan dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan ditindaklanjuti	%	100	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
6	Prosentase usaha/ kegiatan yang ramah lingkungan	%	10	Peningkatan Pengendalian Polusi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Boyolali

a. Luasan RTH Publik wilayah kota/kawasan perkotaan

Dengan Visi Pro Investasi mewujudkan Boyolali yang maju dan lebih sejahtera, akan berdampak pembangunan di Kabupaten Boyolali berkembang lebih pesat. Pembangunan yang dilaksanakan seringkali berdampak terhadap berkurangnya Ruang terbuka Hijau terutama adanya alih fungsi lahan yang dimanfaatkan untuk pendirian usaha dan/atau kegiatan (dalam hal ini perusahaan), permukiman (perumahan) serta kegiatan kegiatan lain yang memerlukan alih fungsi lahan.

Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bahwa Luas RTH kawasan perkotaan yang ideal adalah sebesar 20 % dari luas RTH perkotaan secara keseluruhan (RDRT). Sebagai pengertian bahwa luas RTH perkotaan sampai dengan Tahun 2015 diperkirakan baru 2,65 % atau 1.190.322 m<sup>2</sup> dari luas ideal, sehingga masih sangat kecil prosentase pemenuhannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menetapkan peningkatan kualitas dan kuantitas RTH sebagai indikator utama untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah. Selama 5 (lima) Tahun telah ditargetkan untuk mencapai luasan RTH sebesar 1 % atau 247.000 m<sup>2</sup>. Sedangkan untuk Tahun 2017 ditetapkan penambahan luasan RTH perkotaan 35.000 m<sup>2</sup> yang dilaksanakan oleh DLH dan DPU, sehingga dengan penambahan 35.000 m<sup>2</sup> diperkirakan luas RTH perkotaan menjadi 1.324.322 m<sup>2</sup>

b. Ketersediaan luasan RTH Publik sebesar 20% dari wilayah kota/kawasan perkotaan

Dengan Visi Pro Investasi mewujudkan Boyolali yang maju dan lebih sejahtera, akan berdampak pembangunan di Kabupaten Boyolali berkembang lebih pesat . Pembangunan yang dilaksanakan seringkali berdampak terhadap berkurangnya Ruang terbuka Hijau terutama adanya alih fungsi lahan yang dimanfaatkan untuk pendirian usaha dan/atau kegiatan (dalam hal ini perusahaan), permukiman (perumahan) serta kegiatan kegiatan lain yang memerlukan alih fungsi lahan.

Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bahwa Luas RTH perkotaan yang ideal adalah sebesar 20 % dari luas RTH perkotaan secara keseluruhan (RDRT). Sebagai pengertian bahwa luas RTH perkotaan sampai dengan Tahun 2015 diperkirakan baru 8 % atau 1.190.322 m<sup>2</sup> dari luas ideal, sehingga masih sangat kecil prosentase pemenuhannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menetapkan peningkatan kualitas dan kuantitas RTH sebagai indikator utama untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah. Selama 5 (lima) Tahun telah ditargetkan untuk mencapai luasan RTH sebesar 1 % atau 247.000 m<sup>2</sup>. Sedangkan untuk Tahun 2017 ditetapkan penambahan luasan RTH kawasan perkotaan 35.000 m<sup>2</sup> yang dilaksanakan oleh DLH dan DPU, sehingga dengan penambahan 35.000 m<sup>2</sup> diperkirakan luas RTH kawasan perkotaan menjadi 1.324.322 m<sup>2</sup> atau diperkirakan 2,95 dari prosentase ketersediaan luasan RTH publik sebesar 20% dari luasan wilayah kota/kawasan perkotaan.

c. Sumur resapan dan sejenisnya

Dengan Visi Boyolali Pro Investasi, pembangunan di Kabupaten Boyolali berkembang pesat. Pembangunan yang sedang giat dilaksanakan seringkali berdampak negatif terhadap keberadaan sumber/mata air. Perubahan fungsi lahan untuk industri dan permukiman serta berkurangnya ruang terbuka hijau dapat berdampak terhadap berkurangnya daya resap dan daya serap lahan terhadap air hujan.

Pembangunan gedung, pengaspalan, cor beton dll . menjadikan air hujan lebih cepat dan lebih banyak yang mengalir ke sungai dari

pada yang meresap ke dalam tanah, sehingga debit air tanah/mata air semakin kecil. Untuk mengatasi hal tersebut melalui kegiatan ini, dibangun sumur resapan dan sejenisnya (biopori) yang diharapkan dapat meningkatkan resapan air hujan ke dalam tanah dan mengurangi laju limpasan permukaan, dapat memperpanjang siklus hidrologis serta menekan terjadinya bencana banjir.

Seperti pada Tahun Tahun sebelumnya Dinas Lingkungan Hidup (Badan Lingkungan Hidup) telah melakukan pembuatan prototype sumur resapan rata-rata 40 unit per Tahun dan lubang biopori rata rata 1000 lebih yang berguna untuk meningkatkan resapan air hujan, sedangkan untuk Tahun 2017 ini Dinas lingkungan Hidup merencanakan untuk membuat sumur resapan dan biopori sebanyak 1540 unit

d. Cakupan pengelolaan sampah mandiri

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitasnya, semakin besar pula volume sampah yang dihasilkan. Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah salah satu tugas pemerintah dalam rangka menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan maka pemerintah wajib memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kabupaten Boyolali saat ini mempunyai luas lahan 3,7 ha dengan lahan yang telah digunakan seluas 2,5 ha dengan rata-rata volume sampah yang masuk ke TPA antara 44 s/d 50 ton/hari diperkirakan umur pemanfaatan TPA tinggal beberapa Tahun saja apabila kondisi/metode pengelolaan sampah tidak berubah.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk meminimalisasi volume sampah yang dikirim ke TPA antara lain dengan melakukan pengelolaan sampah di sumbernya (pemukiman, pasar, perkantoran dan sekolahan sebelum dikirim ke TPA) maupun dengan pengelolaan sampah TPS 3R, Rumah Kompos, Bank sampah dan daur ulang sampah sektor informal (pemulung, lapak dan pengepul).

Tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup menetapkan target adanya cakupan pengelolaan sampah mandiri terutama wilayah perkotaan sebanyak 2 (dua) wilayah. Melalui pengelolaan sampah mandiri yang dilakukan masyarakat diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPA.

- e. Prosentase aduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan ditindaklanjuti

Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebelumnya merupakan salah satu jenis pelayanan Dasar SPM Bidang Lingkungan Hidup. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Lingkungan Hidup merupakan urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, sehingga tidak lagi melaksanakan SPM. Meskipun tidak lagi melaksanakan SPM bidang Lingkungan Hidup bukan berarti hal ini serta merta ditinggalkan. Tindak lanjut terhadap adanya aduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan merupakan salah satu pelayanan publik yang dilakukan pemerintah Kabupaten Boyolali terhadap masyarakat sebagai salah satu upaya penegakan hukum lingkungan untuk mewujudkan usaha yang ramah lingkungan dalam rangka menciptakan *green economy*.

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa sampai dengan Tahun 2016 target yang ditetapkan sebesar 100% dapat terealisasi 100%, hal ini berarti semua aduan adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang masuk ke BLH telah/dapat ditindaklanjuti.

Pada Tahun 2016 aduan yang masuk ke BLH sebanyak 17 kasus, turun 5 % dari jumlah aduan Tahun 2015 sebanyak 18 aduan. Penanganan kasus dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sesuai ketentuan standar pelayanan yaitu identifikasi, klarifikasi, koordinasi/mediasi sehingga dicapai kesepakatan-kesepakatan, serta monitoring/pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan tersebut dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

Meningkatnya jumlah kasus yang terjadi dapat mengindikasikan semakin bertambahnya kepedulian masyarakat

terhadap lingkungan sehingga menjadi peka dan sensitif terhadap permasalahan lingkungan, ataupun pengelolaan lingkungan yang belum baik dari para pelaku usaha/kegiatan sehingga perlu adanya pengawasan terhadap ketaatan usaha/kegiatan dalam melaksanakan janjinya sesuai dokumen lingkungan yang dimiliki. Demikian pula untuk Tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup menargetkan untuk dapat tindaklanjuti semua aduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan (100%) sehingga tidak ada aduan yang tidak ditindaklanjuti.

Aduan yang disampaikan masyarakat ke Dinas Lingkungan Hidup dapat melalui surat tertulis, sms, email, atau secara lisan sesuai prosedur yang berlaku.

f. Prosentase usaha/kegiatan yang ramah lingkungan

Dengan visi Boyolali Pro Investasi berdampak semakin mudahnya melakukan investasi di Kabupaten Boyolali yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Boyolali. Meningkatnya jumlah perusahaan membawa konsekuensi pula terhadap kualitas lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya pencegahan dan pengendalian terhadap dampak buruk yang mungkin terjadi melalui pembinaan monitoring serta pengawasan terhadap perusahaan yang berpotensi terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan, terutama terhadap perusahaan menengah dan besar serta jenis usaha/produksinya sehingga green economy dapat terwujud.

Apabila dilihat secara sepiantas indikator ini merupakan kelanjutan dari pelaksanaan SPM bidang lingkungan hidup sebelumnya yaitu pelayanan pencegahan pencemaran air dan pencemaran udara.

Pada Tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup menetapkan target 10 % usaha dan/ atau kegiatan yang ramah lingkungan, yaitu usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dokumen lingkungan yang dimiliki.

6) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Tabel II.52

Capaian Aspek Pelayanan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2016 dan Target Tahun 2017

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	HASIL		Target 2017
			2015	2016	
1	Rasio penduduk be KTP persatuan Penduduk	%	96,02	97,74	96
2	Rasio anak berakte kelahiran	%	82,73	83,12	85
3	Rasio pasangan berakte nikah	%	100	100	100
4	Kepemilikan KTP	jumlah	703.364	748.154	755.000
5	Kepemilikan Akte kelahiran per 1000 penduduk	%	62	63,88	65
6	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah / blm	sudah	sudah	sudah
7	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	ada/ tidak	ada	ada	Ada
	a. Indikator SPM/RPJMD				
	– Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	%	96,02	97,74	96
	– Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	%	100	100	100
	– Cakupan penerbitan Kutipan Akte Kelahiran Penduduk usia 0 - 18	%	-	83,12	85
	– Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	%	62	63,88	65
	– Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kematian	%	3,58	43,20	6
	b. Indikator RPJM				
	– Prosentase kepemilikan KTP dari wajib KTP	%	96,02	97,74	-
	– Rasio kepemilikan Akta Kelahiran dari jumlah penduduk	%	62	63,88	-
	– Prosentase Penduduk yang menerima e-KTP berbasis NIK dengan perekaman sidik jari	%	99,21	97,74	-
	– Keluarga yang mengajukan permohonan KK	KK	105.842	112.509	-
	– Jumlah pemohon KTP yang mendapat pelayanan	Orang	44.542	58.854	-
	– Meningkatnya jumlah warga yang memiliki Akta Catatan Sipil	Orang	603.813	623.148	-

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Boyolali*

Sejak Tahun 2006 Kabupaten Boyolali sudah menerapkan KTP Nasional berbasis NIK. Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten sudah ada. Tingkat capaian cakupan penerbitan Kartu

Tanda Penduduk tidak mencapai target, dengan capaian sebesar 97,74% dari target SPM 100% (tingkat capaian 96,02%), tidak mencapai target karena wajib KTP atau penduduk yang pada Tahun 2016 sudah usia 17 Tahun yang seharusnya melaksanakan perekaman KTP-el/mencari KTP, sekiranya KTP-el tersebut tidak mendesak digunakan, mereka belum akan melaksanakan perekaman atau mencari KTP-el. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) pada Tahun 2016 berdasarkan data, Kepala Keluarga yang mendaftarkan permohonan KK tercapai sebesar 100% dari target 100% atau tingkat capaian sebesar 100%, karena dari jumlah pemohon sejumlah 112.509 KK sudah dilayani dan Kartu Keluarga sudah dicetak dan didistribusikan kepada pemohon.

Untuk tingkat capaian cakupan penerbitan akta kelahiran dapat mencapai target, atau terealisasi 63,88% dari target SPM 63% (tingkat capaian 101,40%) hal ini disebabkan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengamanatkan bahwa bagi pemohon akte kelahiran yang mendaftar lebih 1 (satu) Tahun dari terjadinya peristiwa kelahiran tidak perlu melampirkan hasil keputusan pengadilan, dan cukup dengan Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sedangkan Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kematian terealisasi 43,20 %, dari peristiwa kematian yang dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sejumlah 1.868 orang, yang telah mengajukan permohonan dan telah diterbitkan kutipan akte kematian sejumlah 807 orang, (tingkat capaian 432% dari target 10%), prosentase kepemilikan akte kematian masih sangat rendah dikarenakan akte kematian saat ini belum dibutuhkan oleh masyarakat, karena akte kematian belum dimanfaatkan sebagai persyaratan untuk pengurusan dokumen yang berkaitan dengan kematian seseorang, baik di lembaga pemerintah maupun lembaga swasta.

Prosentase kepemilikan KTP dari wajib KTP pada Tahun 2015 tercapai 97,74% dari target 100% sehingga capaian kinerja sebesar 97,74%, tidak mencapai target karena wajib KTP atau penduduk yang pada Tahun 2016 sudah usia 17 Tahun yang seharusnya



melaksanakan perekaman KTP-el/mencari KTP, sekiranya KTP-el tersebut tidak mendesak digunakan, mereka belum akan melaksanakan perekaman atau mencari KTP-el,

Rasio kepemilikan Akta Kelahiran dari jumlah penduduk sampai dengan Tahun 2016 sebesar 63,88% dari target 63%, tingkat capaian kinerja 101,40%. Bila dibandingkan dengan Tahun 2015 realisasi capaian mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan mulai Tahun 2013 bagi pemohon akte kelahiran yang mendaftar lebih dari 1 Tahun tidak melampirkan hasil keputusan sidang pengadilan hal ini sangat berpengaruh pada jumlah pemohon akte kelahiran,

Prosentase penduduk yang menerima e-KTP berbasis NIK dengan perekaman sidik jari Tahun 2016 realisasi 97,74% dari target 100% tingkat capaian kinerja 97,74%, Cara pencapaiannya dengan melaksanakan pencetakan KTP-el bagi wajib KTP yang sudah melaksanakan perekaman, wajib KTP yang melaksanakan perekaman sejumlah 748.154 orang dan yang sudah dicetak dan didistribusikan.

Keluarga yang mengajukan permohonan KK (Kartu Keluarga) Tahun 2016 sebanyak 112.509 KK dari target 84.000. Bila dibandingkan dengan Tahun lalu jumlah pemohon mengalami kenaikan sebesar 14.313 pemohon, hal ini disebabkan warga/Kepala Keluarga memperbaharui KK sebagai lampiran untuk mengajukan permohonan kepesertaan program BPJS dan Perubahan format KK lama ( SQL ) ke format KK yang baru (Oracle).

Jumlah pemohon KTP pada Tahun 2016 sejumlah 58.854 orang dari target 30.000 orang dengan tingkat capaian 196,18 %, bila dibandingkan dengan Tahun lalu jumlah pemohon mengalami kenaikan sejumlah 14.313 orang dimana pemohon KTP Tahun 2015 sejumlah 44.541 orang.

Jumlah warga yang memiliki akte kelahiran sampai dengan Tahun 2016 sejumlah 623.148 orang dari target 630.000 orang. Jumlah warga yang memiliki akte kelahiran pada Tahun 2016 mengalami peningkatan sejumlah 19.335 orang, dari jumlah kepemilikan akte kelahiran Tahun 2015 sejumlah 603.813 orang.

Indikator RPJMD dalam tabel tersebut diatas pada huruf (b), pada Tahun 2017 tidak ada target karena indikator tersebut tidak lagi menjadi indikator program pada RPJMD 2016–2021.

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel II.53

Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2016 dan Target Tahun 2017

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	HASIL		Target 2017
			2015	2016	
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	LPM	267	267	57
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%	57	38	55
3	Jumlah LSM	LSM	267	267	267
4	LPM Berprestasi	%	-		
5	PKK Aktif	%	287	287	287
6	Posyandu aktif	%	1.804	1.804	1.804

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Boyolali

Target kinerja rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 target kinerja 267 LPM terealisasi 267 atau capaian kinerja 100%. Adapun bentuk kegiatan meningkatkan kemampuan LPMD/K, sedangkan Tahun 2017 target kinerja 267 LPMD.

- Target kinerja jumlah kelompok binaan PKK pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 target kinerja 57% atau capaian kinerjanya 100% target kinerja 2016 capaian kinerja 66% sedangkan Tahun 2017 target kinerja 55 Desa. Adapun kegiatan peningkatan peran perempuan di pedesaan.
- Target kinerja jumlah LSM pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 target kinerja 267 terealisasi 100%. Adapun bentuk kegiatan pendataan LSM.
- Target kinerja PKK Aktif pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 target kinerja 100%. Adapun bentuk kegiatan Peningkatan Peran

Perempuan Pedesaan pada Tahun 2017 target kinerja 287 PKK Aktif.

Target kinerja Posyandu Aktif pada Tahun 2015 dan 2016 capaian kinerja 100%. Adapun bentuk kegiatan pendataan Posyandu pada Tahun 2017 target kinerja 1.804 Posyandu Aktif.

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel II.54  
Capaian Aspek Pelayanan Bidang Keluarga Berencana  
dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2016

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	HASIL	
			2015	2016
1	Cakupan peserta KB aktif	%	79,99	80,95
2	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Keluarga	160.858	223.740
3	Cakupan peserta KB Pria	%	3,17	2,16
4	Terpenuhinya kebutuhan model operasional BKB – Posyandu PADU	%	0,94	0,94
5	Terpenuhinya kebutuhan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	%	100	100
6	Cakupan jumlah kelompok KRR aktif	kelompo k	35	35
7	Cakupan desa yang mendapat layanan KIE KB KS	desa	30	30
8	Tersedianya data jumlah KK yang terkini	KK	310.956	288.637
9	Terlaksananya pengelolaan data dan informasi program KB	kecamatan	19	19

Sumber: *Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Boyolali*

Tabel II.55  
Target Aspek Pelayanan Bidang Keluarga Berencana  
dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Boyolali Tahun 2017

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2017
1	Cakupan peserta KB aktif	%	75
2	Angka kelahiran total (TFR)	%	2,22
3	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi /DO	%	25,30
4	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need).	%	9,31
5	Cakupan peserta MKJP.	%	25,87
6	Cakupan pemenuhan data pengendalian penduduk.	dokumen	12
7	Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 Tahun	%	1,8

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET
8	Cakupan jumlah kelompok KRR aktif	%	28,92
9	Cakupan desa yang memiliki kelompok Tribina Aktif (BKB, BKR, dan BKL)	%	21,35
10	Cakupan kader aktif dalam pemberian informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Orang	58

Sumber: *Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Boyolali*

Indikator yang digunakan Tahun 2017 dan seterusnya berbeda dengan indikator yang digunakan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki proses perencanaan dan pengendalian serta pengawasan program, dan menyesuaikan dengan indikator nasional dan provinsi.

Cakupan peserta KB aktif Kabupaten Boyolali sudah mencapai dari PUS sebesar 171.319 dengan PA sebesar 137.084. Capaian peserta KB Aktif Tahun 2015 sebesar 79,99% dari PUS sebesar 176.505 dengan peserta KB Aktif sebesar 141.190. Capaian peserta KB Aktif Tahun 2016 sebesar 80,95% dari PUS sebesar 176.017 dengan peserta KB Aktif sebesar 141.223. Tahun 2017 ditargetkan sebesar 75% sesuai dengan target nasional dan provinsi, terkait dengan upaya validasi data yang akan dilaksanakan mulai Tahun 2017. Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*) Angka Kelahiran Total per WUS 915-49 Tahun berdasarkan RPJMN ditetapkan maksimal 2,33 untuk Tahun 2017, sedangkan Kabupaten Boyolali menetapkan target 2,22 yaitu 0,11 lebih baik dari target RPJMN. Besarnya angka kejadian putus pakai, kegagalan cara/alat, atau ganti cara/alat dapat dipakai sebagai petunjuk bahwa diperlukan perbaikan dalam pemberian bimbingan tentang pemilihan alat/cara kontrasepsi, pelayanan lanjutan dan penyediaan pelayanan yang lebih luas. Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi ditarget 25,30 pada Tahun 2017.

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmet Need*). *Unmet need* dapat didefinisikan sebagai kelompok yang belum terpenuhi kebutuhan kontrasepsinya, mencakup semua pria atau wanita usia subur yang sudah menikah atau hidup bersama dan dianggap aktif secara seksual yang tidak

menggunakan metode kontrasepsi, baik yang tidak ingin punya anak lagi ataupun menunda kelahiran berikutnya. Cakupan pasangan usia subur yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, ingin ber KB tetapi belum terlayani yang besar kemungkinan akan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Hasil SDKI 2012 menunjukkan bahwa angka (*unmet need*) kontrasepsi di Indonesia sebesar 11,4%. (*unmet need*) Kabupaten Boyolali ada Tahun 2015 adalah 10,48% dan Tahun 2016 sebesar 10,45%. Tahun 2017 ditargetkan (*unmet need*) sebesar 9,31 terkait dengan upaya validasi data yang dilaksanakan Tahun 2017. Berdasarkan hasil pendataan diketahui cakupan peserta MKJP Tahun 2015 adalah sebesar 38,88 dan Tahun 2016 sebesar 39,00. Namun disadari bahwa data tersebut memiliki kelemahan karena tidak terdapat dobel penghitungan pada peserta yang beralih jenis kontrasepsi, dan beberapa masalah pengolahan data lainnya. Karena itu, dalam rangka melaksanakan validasi data, ditetapkan target 2017 sesuai dengan target Jawa Tengah yaitu sebesar 25,87. Cakupan pemenuhan data pengendalian penduduk sangat strategis perannya dalam pengambilan kebijakan dan pengendalian program Keluarga Berencana. Ditargetkan tercapai 12 dokumen data kependudukan yang valid dalam Tahun 2017.

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 Tahun adalah proporsi PUS yang istrinya di bawah 20 Tahun dibandingkan dengan seluruh PUS yang ada disuatu wilayah, upaya peningkatan cakupan dilakukan melalui:

- Peningkatan akses informasi;
- Peningkatan akses pelayanan PIK Remaja;
- Peningkatan kualitas dan pengelolaan, jaringan serta keterpaduan program PIK Remaja.

Pada Tahun 2014 tercapai 1,40% dengan kategori sudah melampaui target (capaian lebih kecil lebih baik), pada Tahun 2015 tercapai sebesar 0,94%. Tahun 2016 sebesar 2,0%, diperoleh dari hasil validasi data pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sehingga target yang ditetapkan untuk Tahun 2017 adalah sebesar 1,8%

Cakupan kelompok KRR aktif merupakan gambaran kelompok Kesehatan Reproduksi yang berperan aktif dalam memberikan

dukungan dan partisipasi dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, khususnya dalam meningkatkan kedewasaan umur perkawinan. Tahun 2015 tercapai 10,98%, Tahun 2016 tercapai 20,48% dan Tahun 2017 ditargetkan sebesar 28,92% . Cakupan desa yang memiliki kelompok Tribina Aktif (BKB, BKR, dan BKL) merupakan indikator dukungan dan partisipasi masyarakat dalam bidang keluarga berencana, sekaligus merupakan ukuran keberhasilan dalam pergerakan masyarakat bidang keluarga berencana. Tahun 2015 tercapai sebesar 21,35% dan berhasil dipertahankan pada Tahun 2016. Tahun 2017 ditargetkan untuk mempertahankan pada angka 21,35%, dengan harapan dukungan dan partisipasi yang telah ada semakin mantap, untuk dapat diperluas pada Tahun berikutnya. Cakupan kader aktif dalam pemberian informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak merupakan indikator baru atas program baru yang dimunculkan pada Tahun 2017 untuk menjawab tantangan atas berbagai permasalahan pemenuhan hak anak terutama dalam masa tumbuh kembang untuk mewujudkan salah satu aspek kesejahteraan keluarga yang menjadi wilayah tanggung jawab DP2KBP3A. Tahun 2017 ditargetkan terbentuk dan terlatih sebanyak 58 (lima puluh delapan) kader yang berperan aktif di lingkungannya masing-masing.

9) Perhubungan

Tabel II.56  
 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Perhubungan  
 Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2016 dan Target Tahun 2017

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	HASIL		Target 2017
			2015	2016	
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang/ Hari	18.847	18.677	10.000
2	Rasio ijin trayek	%	6,4	0,04	0,50
3	Jumlah uji kir angkutan umum	Kendaraan	1.668	3.569	3.569
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Buah	14	14	13
5	Angkutan darat	%	0,14	0,012	0,012
6	Kepemilikan KIR angkutan umum	%	22	19,96	20
7	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Menit	40	40	40
8	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	Rp	30.000		

	JBB $\leq$ 2.500		35.000	30.000	30.000
	JBB $\leq$ 5.000		40.000	35.000	35.000
	JBB $\leq$ 7.500		45.000	40.000	40.000
	JBB $\leq$ 10.000		50.000	45.000	45.000
	JBB $>$ 10.000			50.000	50.000
9	Pemasangan Rambu-rambu	%	79,66	100	100
10	Rasio kendaraan umum layak jalan	%	173,33	177,77	177,77

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Boyolali

- a) Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum yang melewati simpul transportasi (terminal, halte dan tempat pemberhentian bus) didapat hasil Tahun 2015 sebanyak 18.847 orang/hari dan pada Tahun 2016 sebanyak 18.677 orang/hari target pada Tahun 2017 sebanyak 10.000 orang/hari
- b) Rasio Ijin Trayek yang ada di perhubungan Tahun 2015 sebesar 6,4% dengan 62 buah ijin trayek yang dikeluarkan, Tahun 2016 rasio ijin trayek 0,04% dengan 26 buah ijin trayek yang dikeluarkan. Target Tahun 2017 untuk rasio ijin trayek 0,50%
- c) Jumlah Uji KIR Angkutan umum pada Tahun 2015 uji KIR sejumlah 1668 Tahun 2016 sebanyak 3569 kendaraan karena banyaknya kendaraan dari luar daerah yang numpang uji daerah yang numpang uji target pada Tahun 2017 sebanyak 3569 kendaraan
- d) Jumlah Terminal Bus untuk Tahun 2016 tidak mengalami penambahan dari Tahun-Tahun sebelumnya dengan jumlah 14 buah disebabkan belum adanya kajian mengenai pergerakan masyarakat Boyolali atau belum adanya matrik OD (*Origin and Destination*) atau kajian yang menyangkut penetapan lokasi terminal bus. Target jumlah terminal bis Tahun 2017 sebanyak 13 buah
- e) Jumlah angkutan darat berdasarkan prosentase pada Tahun 2015 sebesar 0,14% untuk Tahun 2016 sebesar 0,012% target pada Tahun 2017 sebesar 0,012%
- f) Jumlah kepemilikan KIR angkutan umum berdasarkan prosentase pada Tahun 2015 sebesar 22% sedangkan untuk Tahun 2016 19,96% target untuk Tahun 2017 sebesar 20%

- g) Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) Tahun 2015 dan 2016 sama selama 40 menit yang lebih cepat dibandingkan sebelumnya hal ini disebabkan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Boyolali sudah menggunakan alat uji mekanik sehingga mempercepat waktu pelayanan.
- h) Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum untuk Tahun 2015 dan Tahun 2016 antara Rp. 30.000,00 sampai dengan Rp. 50.000,00. Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2011 penarikan retribusi menyangkut jasa umum.
- i) Jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas berdasarkan prosentase untuk Tahun 2015 sebesar 79,66% sedangkan untuk Tahun 2016 sebesar 100% dan target Tahun 2017 sebesar 100%.

10) Komunikasi dan Informatika

Tabel II.57  
 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika  
 Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2016 dan Target Tahun 2017

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	HASIL		Target 2017
			2015	2016	
1	Jumlah jaringan komunikasi	Buah	175	176	179
2	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	%	5,47	6,47	8,33
3	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	Buah	4	4	4
4	Persentase penduduk yang menggunakan HP/ telephon	%	5,16	10,8	12,7
5	Web site milik pemerintah daerah	Site	7	9	12

Sumber: Dinas Komunikasi Informasi Kab. Boyolali

- a. Jumlah Jaringan Komunikasi pada Tahun 2013 sebanyak 113 buah pada Tahun 2014 sebanyak 124 buah pada Tahun 2015 sebanyak 175 buah dan pada Tahun 2016 sebanyak 176 sedangkan Tahun 2017 sebesar 179.
- b. Rasio wartel/warnet terhadap penduduk pada Tahun 2015 sebesar 5,47 % dan untuk Tahun 2016 sebesar 6,47 % sedangkan Tahun 2017 sebesar 8,33%.
- c. Jumlah penyiaran radio/TV lokal Tahun 2013 sebanyak 4 buah untuk Tahun 2014 sebanyak 4 buah untuk Tahun 2015 dan Tahun 2016 masih sama sebanyak 4 buah sedangkan Tahun 2017 sebanyak 4 buah.



- d. Persentase penduduk yang menggunakan HP/ telepon Tahun 2013 sebesar 2,6 dan pada Tahun 2014 sebesar 2,5%, sedangkan pada Tahun 2015 sebanyak 5,16% untuk Tahun 2016 sebesar 10,8 % sedangkan Tahun 2017 sebanyak 12,7 %.
- e. Jumlah wibesite milik pemerintah daerah pada Tahun 2015 sebanyak 7 web dan pada Tahun 2016 sebanyak 9 web sedangkan untuk Tahun 2017 sebanyak 12.

11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tabel II.58  
 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  
 Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2016 dan Target Tahun 2017

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	HASIL		Target 2017
			2015	2016	
1	Persentase koperasi aktif	%	79,65	76,22	76,80
2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	UKM	28.131	28.423	28.423
3	Jumlah BPR/LKM	LKM	1.132	1.135	1135
4	Usaha Mikro dan Kecil	usaha mikro	24.979	25.247	25.400

Sumber: Dinas Koperasi dan Ketenagakerjaan Kab. Boyolali

Secara terinci penjelasan capaian Aspek Pelayanan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut:

- (1) Indikator Persentase Koperasi aktif
  - Persentase koperasi aktif Tahun 2015 sebesar 79,65% dan Tahun 2016 76,22%. penurunan sebesar 3,43% tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan jumlah koperasi tidak aktif. Pada Tahun 2015 terdapat koperasi tidak aktif sejumlah 222 koperasi, sedangkan di Tahun 2016 terdapat 261 koperasi tidak aktif, hal ini ada kenaikan koperasi tidak aktif sebesar 39 Koperasi sehingga menurunkan prosentase Koperasi aktif.
  - Pada Tahun 2016 komposisi keaktifan koperasi terdiri dari 261 koperasi tidak aktif dan 837 koperasi aktif.
  - Dengan ini perlu adanya peningkatan pembinaan kelembagaan koperasi.
- (2) Indikator Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

- Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Tahun 2016 yaitu  $28.423/1.135 = 25,04$
- jumlah perbandingan UKM non BPR dengan LKM UKM Tahun 2016 yaitu 25,04 hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan UKM dengan LKM beriringan dalam pemenuhan pembiayaan.dengan hal tersebut perlu adanya pendampingan pembiayaan UMKM dengan bunga rendah untuk menjaga kelangsungan usaha UMKM
- Jumlah BPR di Kab Boyolali ada 7 BPR
- Jumlah BPR di Kabupaten Boyolali ada 7 BPR
- Di Tahun 2015 total jumlah UKM ada 28.131 unit, usaha mikro dan kecil ada 24.979 unit, usaha menengah ada 3.152 unit
- Di Tahun 2016 jumlah UKM ada 28.423 unit, Usaha mikro dan kecil ada 25.247 unit dan usaha menengah ada 3.176 unit.

(3) Indikator Jumlah BPR/LKM

- Jumlah BPR/LKM aktif Tahun 2016 yaitu jumlah BPR 7/LKM aktif 681 hasilnya 0,010
- Jumlah LKM Tahun 2015 ada sekitar 1.132 LKM, jumlah LKM Tahun 2016 ada 1.135 UKM, LKM yang aktif ada 681 LKM

(4) Indikator Usaha Mikro dan Kecil

- Usaha Mikro dan Kecil Yaitu jumlah Usaha mikro dan Kecil/Jumlah seluruh UKM =yaitu  $25247/28423 \times 100 = 80$
- Usaha mikro dan kecil Tahun 2015 yaitu 24.979 unit.
- Usaha mikro dan kecil Tahun 2016 yaitu ada 25.247 unit

12) Penanaman Modal

Tabel II.59  
 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Penanaman Modal  
 Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2016 dan Target Tahun 2017

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	HASIL		Target 2017
			2015	2016	
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Buah	941	568	927
	PMA	Buah	1	4	1
	PMDN	Buah	940	564	926

2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp.	1.213.545.000.000	1.827.843.874.470	1.208.940.862.500
	PMA	Rp.	117.000.000.000	329.061.703.769	120.000.000.000
	PMDN	Rp.	1.096.545.000.000	1.498.782.170.701	1.098.940.862.500
3	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Rp.	-6,30 %	36,68 %	
4	Lama proses perijinan		-	-	
	1. Izin	hari kerja	10	10	8
	Mendirikan Bangunan ( IMB );				
	2. Izin Usaha Industri ( SIUI );	hari kerja	10	10	8
	3. Tanda Daftar Perusahaan ( TDP );	hari kerja	3	3	3
	4. Izin Usaha Perdagangan ( SIUP);	hari kerja	3	3	3
	5. Izin Usaha Rumah Makan dan Warung Makan;	hari kerja	3	3	3
	6. Izin Usaha Hotel;	hari kerja	3	3	3
	7. Izin Usaha Tempat ( ITU ) dan Izin Gangguan ( HO);	hari kerja	10	10	8
	8. Izin Lokasi;	hari kerja	10	10	8
	9. Izin Usaha Rice Mill;	hari kerja	3	3	3
	10. Tanda Daftar Gudang ( TDG );	hari kerja	10	10	8
	11. Izin Usaha Pemanfaatan Burung Walet dan atau Sriti;	hari kerja	10	10	8

*Sumber: Dina Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kab. Boyolali*

Di Bidang Penanaman Modal Terjadi kenaikan yang signifikan dalam hal kenaikan nilai investasi yaitu dari capaian investasi Tahun 2015 sebesar Rp1.213.545.000.000,- menjadi Rp1.827.843.874.470,- atau mengalami kenaikan sebesar 50,62%. Hal itu terjadi karena pelayanan di bidang penanaman modal yang semakin meningkat. Persentase peningkatan nilai realisasi investasi disebabkan karena investasi merupakan hal yang kompleks, keberhasilan investasi dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan inflasi, ketersediaan lahan, regulasi, ketersediaan listrik serta sarana prasarana pendukung

investasi. Berbagai faktor diatas berpengaruh terhadap faktor peningkatan nilai realisasi investasi.

13) Kepemudaan dan Olah Raga

Tabel II.60  
 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pemuda dan Olahraga  
 Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2016 dan Target Tahun 2017

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	HASIL		Target 2017
			2015	2016	
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah organisasi pemuda	Buah	12	31	31
2	Jumlah organisasi olahraga	Buah	31	31	32
3	Jumlah kegiatan kepemudaan	Keg	16	93	93
4	Jumlah kegiatan olahraga	Keg	9	12	15
5	Lapangan olahraga	Buah	13	13	17

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Boyolali

Dari jumlah organisasi pemuda yang ada pada akhir Tahun 2016, sejumlah 31 kelompok, dari total akhir Tahun 2015 yang ada sejumlah 12 kelompok, sehingga terjadi penambahan yang sangat signifikan, yakni sejumlah 19 kelompok, hal ini di sebabkan adanya beberapa faktor, yang antara lain,:

1. Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat, melalui meningkatnya lapangan kerja yang di buka di wilayah Kabupaten Boyolali.
2. Meningkatnya animo masyarakat untuk mendirikan kelompok pemuda.
3. Kondisi pemerintahan yang kondusif, sehingga masyarakat memanfaatkan waktunya untuk berorganisasi, sehingga menambah manfaat di kehidupanya.

Sedangkan organisasi olahraga, bertahan pada angka 31 kelompok, hal ini membuktikan bahwa tingkat pembinaan yang sangat kontinue, sehingga kelompok yang sudah ada tersebut masih dapat bertahan di dibandingkan dengan Tahun 2015 pada posisi 31 kelompok, Kemudian untuk kegiatan kepemudaan mengalami penambahan yang cukup banyak di banding Tahun 2015 sejumlah 16, sedangkan di akhir Tahun 2016 mencapai 93 kegiatan atau ada

penambahan sebanyak 77 kegiatan, hal ini merupakan dampak positif dari adanya penambahan kelompok pemuda tersebut di atas.

Selain itu, keberadaan lapangan olahraga, di Boyolali, masih berjumlah 13, atau sama pada Tahun 2015 sebanyak 13, dari jumlah ini masih ada beberapa lapangan yang belum terpenuhi, di karenakan dari ukuran yang belum memenuhi, sehingga belum terpenuhi, sehingga lapangan lapangan tersebut akan di upayakan pada akhir Tahun 2017 nanti bertambah menjadi 17 buah, atau penambahan 4 buah di Tahun 2017 ini.

14) Statistik

Tabel II.61  
 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Statistik  
 Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2016 dan Target Tahun 2017

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	HASIL		Target 2017
			2015	2016	
1	Penyediaan Buku Boyolali Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka	dokumen	2	2	2
2	Penyediaan data tentang informasi perubahan harga kebutuhan pokok Kab. Boyolali	dokumen	1	1	1

Sumber: BP3D Kab. Boyolali

15) Persandian

Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pembangunan bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan maka diperlukan peningkatan kapasitas pertahanan serta stabilitas keamanan dan ketertiban yang antara lain dapat terwujud melalui penyelenggaraan kegiatan persandian untuk pengamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Lembaga Sandi Negara Tahun 2015-2019, yang diarahkan pada sasaran “Terjaminnya layanan sistem keamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara (*information assurance*)”.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang menetapkan bahwa urusan persandian adalah urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib bagi seluruh pemerintah daerah di tingkat

provinsi, kabupaten dan kota. Untuk Kabupaten Boyolali baru akan dilaksanakan pada Tahun 2017 dengan tanggung jawab indikator pembagian sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.

16) Kebudayaan

Tabel II.62  
 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Kebudayaan  
 Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2016 dan Target Tahun 2017

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUA N	HASIL		Target 2017
			2015	2016	
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah grup kesenian. Data Tahun 2007 ini belum diperbaharui karena keterbatasan anggaran untuk pendataan, prediksi data statis.	Grup/ pelaku	585	579	-
2	Jumlah gedung. Gedung yang dimaksud adalah Ngeksipurna atau Kapujanggan, fungsi sementara untuk pertunjukan, pertemuan, kedepan untuk perpustakaan dan BCB. (selama belum memiliki gedung Museum).	Lokasi	3	7	-
3	Penyelenggaraan festival seni dan budaya. Kegiatan ini sangat tergantung dengan tersedianya anggaran dan juga kegiatan kegiatan di tingkat Propinsi Jateng untuk keluar daerah.	event	43	49	54
4	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya. Tempat penyelenggaraan seni dan budaya yaitu Theater di Pengging, Gedung Ngeksipurna, Tlatar dan Selo.	Lokasi	7	7	-
5	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan. Prosentase ini dimaksud mendata merawat agar benda-benda tersebut menjadikan aset daerah.	%	90	90	92
6	SPM Kesenian. Terdapat 8 cakupan, Yaitu Kajian seni 50%; Fasilitas seni 30% ; Gelar seni 75% ; Misi kesenian 100%; SDM 25%; Tempat 100%; Organisasi 34%;	%	100	100	-

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Boyolali

Capaian Aspek Pelayanan Bidang Kebudayaan kepada masyarakat bukan hanya dititikberatkan pada pelayanan hiburan atau seni kepada masyarakat, tetapi juga memberikan pelayanan dalam bentuk pemberian bantuan, kaderisasi dan sosialisasi sehingga diharapkan kekayaan budaya lokal yang mengandung kearifan lokal dapat tumbuh dan berkembang. Hal ini perlu digali dan disebarluaskan kepada masyarakat luas khususnya generasi penerus agar memahami makna setiap budaya daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional.

Penyelenggaraan event seni dan budaya yang diselenggarakan pada Tahun 2016 dapat mencapai target, hal ini didukung oleh komitmen dan kebijakan dalam pengembangan dan pelestarian seni dan budaya di Kabupaten Boyolali, serta adanya dukungan masyarakat sehingga pelaksanaan festival dapat berjalan dengan baik dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pembangunan Gelanggang Anuraga dan Balai Mahesa yang pada Tahun 2016 sebagai salah satu tempat/arena penyelenggaraan kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Boyolali merupakan salah satu bukti kepedulian pemerintah Kabupaten Boyolali dalam bidang kebudayaan. Gedung tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan kegiatan kesenian, kebudayaan dan sebagai sarana edukasi. Gelanggang Anuraga dan Balai Mahesa merupakan sarana yang sangat strategis guna mengembangkan khasanah kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Boyolali.

Upaya pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya juga memerlukan perubahan cara pandang kita, bahwa pemerintah bukan lagi satu-satunya pihak yang berkepentingan melestarikan seni budaya tradisional, akan tetapi memerlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, baik itu lembaga, komunitas seni, maupun perorangan, agar secara bersama-sama ikut berpartisipasi serta berperan dalam pelestarian, pengelolaan dan pengembangan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya.

Kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Boyolali memiliki potensi jika dikembangkan dan dikelola dengan baik, dan tentunya akan menjadi sebuah komoditas yang dapat mendorong kemajuan pembangunan Kabupaten Boyolali. Kabupaten Boyolali dalam urusan

kebudayaan terus berupaya memberikan pelayanan bidang kebudayaan kepada masyarakat Boyolali secara optimal.

Untuk lebih fokus pada sasaran strategis yaitu meningkatnya popularitas daya tarik produk dan potensi daerah Boyolali, maka mulai Tahun 2017 indikator urusan kebudayaan menjadi sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel II.63  
Tabel Indikator dan Target Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2017

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya popularitas daya tarik produk dan potensi daerah Boyolali	Budaya tradisi lokal yang dilestarikan	8 Budaya
		Prosentase benda, situs dan kawasan budaya yang dilestarikan.	92 %
		Tempat penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya	9 Tempat
		Pelaku seni budaya yang dilestarikan dan dikembangkan	37 Group
		Pelaksanaan Gelar Seni dan Budaya	54 Kali
		Event seni dan budaya	4 Kali

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Boyolali

17) Perpustakaan

Tabel II.64  
Capaian Aspek Pelayanan Bidang Perpustakaan  
Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2016 dan Target Tahun 2017

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	HASIL		Target 2017
			2015	2016	
1	Jumlah Capaian pembinaan perpustakaan	%	32	26,6	7.17
2	Jumlah pengunjung perpustakaan per Tahun	orang	32.269	42.914	16.875
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	buah	22.165	24.604	17.530
4	Cakupan layanan perpustakaan keliling	%	100	100	100

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Boyolali

Capaian Indikator Kunci (IKK) Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, kegiatan pengembangan minat dan budaya baca Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:



- Jumlah capaian Pembinaan Perpustakaan desa dari target 14,77 desa dapat tercapai 26,6% desa atau realisasinya sebesar 180,1%.
- Jumlah pengunjung perpustakaan dengan target 31.000 orang dapat tercapai sebesar 42.914 orang atau terealisasi sebesar 138,4%
- Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah dari target yang direncanakan semula yaitu bertambah sehingga menjadi 22.500 eksemplar tercapai sebesar 24.604 eksemplar atau bertambah sebanyak 2.439 eksemplar, hal ini dikarenakan adanya anggaran untuk penambahan bahan pustaka perpustakaan daerah sebesar Rp3.060.000,00
- Capaian layanan perpustakaan keliling dapat tercapai 100% artinya layanan mobil perpustakaan keliling dapat menjangkau di beberapa desa yang ada di 19 kecamatan hal tersebut karena adanya jadwal yang telah dibuat dengan baik.

18) Kearsipan

Tabel II.65  
 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Kearsipan  
 Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2016 dan Target Tahun 2017

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	HASIL		Target 2017
			2015	2016	
1	Pengelola arsip secara baku	%	100	100	100
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Keg	1	1	1

*Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Boyolali*

Peningkatan SDM pengelola kearsipan dapat tercapai dengan meningkatnya kualitas SDM dalam pengelolaan kearsipan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 dengan target sebesar 100% melalui kegiatan kajian sistem administrasi kearsipan, bimbingan teknis kearsipan bagi petugas pengelola kearsipan sebanyak 50 orang dari 50 Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Boyolali, dan Tahun 2016 ini mengambil dari 50 Perangkat Daerah di Kabupaten Boyolali.

Dibanding dengan capaian Tahun 2015, sebetulnya tidak jauh berbeda bahwa peningkatan SDM pengelola kearsipan yaitu adanya 1 kegiatan Bimbingan Teknis Kearsipan dengan peserta yang diundang 50 orang dari UPT Dikdas LS.

18)c.ii.3 Urusan Pilihan

1) Kelautan dan perikanan

Tabel II.66

Capaian Aspek Pelayanan Bidang Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2016 dan Target Tahun 2017

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	HASIL		Target 2017
			2015	2016	
1	Persentase peningkatan produksi hasil perikanan				
	1. Produksi ikan budidaya	Ton	32.014	33.027	26.007
	2. Produksi ikan tangkap	Ton	1.641	2.319	1.637
	3. Produksi pengolahan perikanan	Ton	56	64,8	63,15

Sumber: Dinas Perternakan dan Perikanan Kab. Boyolali, 2016

Capaian Aspek Pelayanan Bidang Kelautan dan Perikanan secara terinci sebagai berikut:

1. Produksi ikan budidaya
- Keberhasilan capaian indikator kinerja ini adalah tercapainya indikator kinerja sebesar 134%. Hal ini terbukti telah diproduksi ikan lele konsumsi, nila dan carper sebanyak 33.027 ton di Wilayah Kab. Boyolali.
  - Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah menggunakan 99% anggaran pengembangan bibit ikan unggul dengan efisiensi anggaran 1%, 99% anggaran pendampingan kelompok pembudidaya ikan dengan efisiensi anggaran 1%, 97% kegiatan pembinaan dan pengembangan perikanan dengan efisiensi anggaran 3% dan 92% kegiatan kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar dengan efisiensi anggaran 8%.
  - Target produksi budidaya sebesar 24.702 ton tercapai 33.027 ton ( $\pm$  90 ton per hari) atau capaian kinerja 134%. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dengan Renstra Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2016. Target produksi budidaya Tahun 2017 sebesar 26.007 ton, indikator ini merupakan akumulasi produksi budidaya dalam 1 Tahun dan sebagai pembanding tercapai/tidak tercapainya kinerja Tahun

2017 antara target dengan realisasi capaian Tahun 2017 mendatang.

## 2. Produksi ikan tangkap

- Keberhasilan capaian indikator kinerja ini adalah tercapainya indikator kinerja sebesar 149% (realisasi 2.319 ton). Estimasi 10 Tahun mendatang produktivitas ikan tangkapan bisa diestimasikan pada angka 1.500-2.000 ton per Tahun dan dampak lebih lanjut petani penangkap ikan akan banyak menganggur dan berpindah haluan pekerjaan karena pekerjaan utama menangkap ikan tidak maksimal, maka hal yang dapat dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan adalah pemulihan daya dukung fisik waduk/sungai, dengan rehabilitasi luasan dan kedalaman waduk/sungai serta pelestarian lingkungan/kapasitas air waduk/sungai. Hal ini dimaksudkan untuk mengembalikan daya dukung waduk/sungai tersebut. dan langkah penebaran benih ikan yang dapat mengembalikan plasma nutfah yang ada di waduk ataupun di sungai tersebut.
- Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah menggunakan Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah menggunakan 99% anggaran pengembangan bibit ikan unggul dengan efisiensi anggaran 1%, 99% anggaran pendampingan kelompok pembudidaya ikan dengan efisiensi anggaran 1%, 97% kegiatan pembinaan dan pengembangan perikanan dengan efisiensi anggaran 3% dan 92% kegiatan kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar dengan efisiensi anggaran 8%.
- Target produksi tangkap 1.559 ton tercapai 2.319 ton (6,4 ton per hari) atau capaian kinerja 149%. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dengan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2016. Target produksi tangkap Tahun 2017 sebesar 1.637 ton, indikator ini merupakan akumulasi produksi tangkap dalam 1 Tahun dan sebagai pembanding tercapai/ tidak tercapainya kinerja Tahun 2017 antara target dengan realisasi capaian Tahun 2017 mendatang.

3. Produksi pengolahan perikanan

- Keberhasilan capaian indikator kinerja ini adalah tercapainya indikator kinerja sebesar 108% (realisasi 64,80 ton). Produksi pengolahan ini berasal dari komoditas utama ikan lele dan nila dengan varian produk keripik, abon dan lain-lain. Produksi 39 ton tersebut 70% berada Kec. Banyudono, Sawit, Ngemplak dan 30% di Kec. Kemusu dan Wonosegoro.
- Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah menggunakan 78% anggaran kajian sistem penyuluh perikanan dengan efisiensi anggaran 22% dan 98% anggaran kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dengan efisiensi anggaran 2%.
- Target produksi pengolahan 60,15 ton tercapai 64,80 ton (0,18 ton per hari) atau capaian kinerja 108%. Program/kegiatan secara umum telah sesuai dengan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2016. Target produksi pengolahan Tahun 2017 sebesar 63,15 ton, indikator ini merupakan akumulasi produksi pengolahan dalam 1 Tahun dan sebagai pembanding tercapai/tidak tercapainya kinerja Tahun 2017 antara target dengan realisasi capaian Tahun 2017 mendatang.

2) Pariwisata

Tabel II.67  
Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pariwisata  
Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2016 dan Target Tahun 2017

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	HASIL		Target 2017
			2015	2016	
1	Kunjungan wisata. Kunjungan wisatawan Tahun 2015 dapat memenuhi target, wisnus 100,19 % wisman 100 % Tahun 2016 , kunjungan wisnus menjadi 128,67 % dan wisman menjadi 100 %.	orang	432.76 7	554.24 8	437.08 7
2	Jenis, kelas, dan jumlah restoran.	buah	82	82	82
3	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel.	buah	19	19	19

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kab. Boyolali

Dibanding dengan kunjungan wisata Tahun 2015, jumlah kunjungan wisatawan nusantara Tahun 2016 mengalami kenaikan, yaitu dari 100,19 % menjadi 128,32 %.

Tercapainya target kunjungan wisatawan Nusantara yang ditetapkan 430.760 orang, dapat terealisasi sebanyak 554.248 orang (128,67%) dibandingkan dengan capaian Tahun lalu naik sebesar 28,13%.

Hal ini disebabkan karena jumlah kunjungan wisatawan Nusantara yang digunakan adalah tingkat kunjungan yang terukur atau berdasarkan retribusi (tiket) masuk sedangkan semakin berkembangnya pariwisata di Boyolali banyak obyek wisata yang dikunjungi tetapi tanpa retribusi sehingga tidak dapat diukur jumlahnya, selain itu ada obyek wisata yang aksesibilitas menuju ke obyek wisata yang masih terbatas atau kurang memadai.

Tercapainya dari target kunjungan wisatawan mancanegara yang ditetapkan 2007 orang, terealisasi sebanyak 2.007 orang (100%) hal ini disebabkan Tahun 2016 kondisi dan situasi pendakian ke Gunung Merapi cukup kondusif sehingga dapat mendatangkan kunjungan wisatawan cukup baik. Hal ini juga didukung kerjasama pihak penginapan di Selo dengan pihak perhotelan cukup baik. Hasilnya target RPJMD 2015 untuk sektor ini dapat tercapai.

Capaian tingkat Hunian Hotel 55%, dari target, sampai akhir Tahun 2016 dapat tercapai 55% (mencapai 100%) hal ini disebabkan banyaknya event pertunjukan atau pementasan di Kabupaten Boyolali yaitu pada saat akhir Tahun.

Rumah makan Tahun 2015 yg memiliki kelas Piring Perunggu 82 buah. Sisanya belum memiliki kelas.

Komposisi hotel di Kabupaten Boyolali pada Tahun 2016 berdasarkan kelasnya adalah sebagai berikut: 1 (satu) hotel Bintang 1, 1 (satu) hotel Bintang 2, dan 17 (tujuh belas) hotel kelas Melati.

### 3) Pertanian

Tabel II.68  
Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pertanian  
Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2016 dan Target Tahun 2017

N O	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	HASIL		Target 2017
			2015	2016	
1	Produktivitas padi atau				

	bahan pangan utama lokal lainnya per hektar				
	1. padi sawah	Ku / Ha	58,97	60,68	57,52
	2. padi ladang	Ku / Ha	27,90	34,11	34,13
	3. jagung	Ku / Ha	41,35	54,73	54,63
	4. kedele	Ku / Ha	14,34	13,23	14,22
	5. kacang tanah	Ku / Ha	12,65	12,37	13,33
	6. ubi kayu	Ku / Ha	221,44	259,56	213,87
	7. ubi jalar	Ku / Ha	80,54	107,77	122,10
2	Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB Cakupan bina kelompok petani	Kelompok	164	110	139

*Sumber: Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kab. Boyolali*

Interpretasi capaian kinerja Tahun 2016 untuk produktifitas tanaman pangan yaitu padi sawah, padi ladang, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar apabila dibandingkan dengan target Tahun 2016 yang ditetapkan maka yang tidak bisa mencapai target adalah produktifitas padi ladang, kedelai dan kacang tanah. Sedangkan komoditas tanaman pangan yang lain dapat melampaui target. Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2015 maka hanya padi kedelai dan kacang tanah yang mengalami penurunan, sedangkan yang lain mengalami kenaikan.

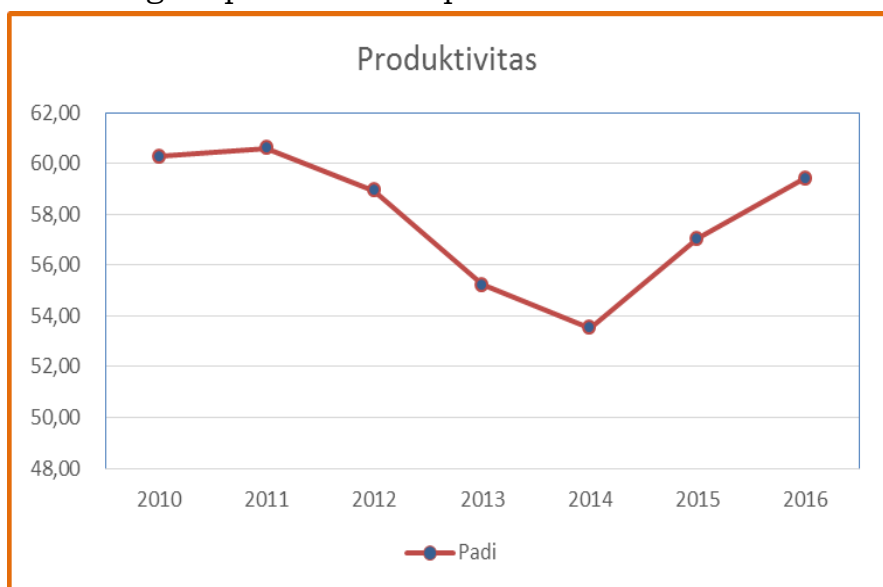
Berkaitan dengan capaian produksi dan produktifitas komoditas padi (padi sawah dan padi ladang) yang merupakan bahan pangan utama bagi penduduk di Kab. Boyolali dari Tahun 2010 – 2016, maka dapat dibuat grafik di bawah ini :

Grafik II.3

Grafik jumlah produksi padi dari Tahun 2010–2016



Grafik II.4  
Grafik tingkat produktivitas padi dari Tahun 2010–2016



Dari kedua grafik di atas dapat dilihat bahwa tren jumlah produksi dan produktivitas padi dari Tahun 2012–2014 mengalami penurunan sedangkan Tahun 2015–2016 mengalami kenaikan.

Penurunan produksi padi sangat berkaitan dengan penurunan produktivitas. Permasalahan yang terjadi pada rentang Tahun 2013–2014 sehingga menyebabkan penurunan produktivitas diantaranya adalah:

- Adanya serangan OPT utama padi (wereng, tikus, dan penggerek batang, blast, BLB, dan virus kerdil) pada daerah-daerah kantong

produksi padi, yaitu sebagian wilayah Kec. Sawit, Banyudono, Ngemplak, dan Nogosari. Serangan OPT ini cukup signifikan dalam menyumbang angka penurunan produktivitas padi di Kab. Boyolali.

- Kurangnya penerapan teknologi pertanian.

Hal ini sangat berkaitan dengan sifat petani yang malas/enggan meninggalkan kebiasaan cara berbudidaya padi secara tradisional. Teknologi pertanian yang sudah dikenalkan kepada petani biasanya akan segera ditinggalkan oleh petani, dan mereka kembali beralih ke cara lama begitu program dari pemerintah selesai dilaksanakan.

- Penggunaan pupuk yang tidak berimbang.

Petani masih sulit untuk diajak menggunakan pupuk secara berimbang baik dalam dosis penggunaan yang sesuai rekomendasi spesifik lokasi maupun dalam jenis penggunaan yaitu penggunaan pupuk organik.

- Banyak jaringan irigasi yang mulai rusak sehingga menyebabkan berkurangnya suplesi air pertanian.

Upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah :

- Dalam mengendalikan dan mengantisipasi adanya serangan OPT maka upaya dilakukan:
  - Pemerintah bersama-sama dengan kelompok tani mengadakan gerakan pengendalian secara serempak.
  - Berkoordinasi dengan kabupaten yang berbatasan terutama kabupaten yang masuk dalam segitiga emas penyebaran OPT yaitu Kab. Klaten dan Kab. Sukoharjo untuk mengadakan gerakan pengendalian bersama-sama.
  - Himbauan kepada kelompok tani untuk menerapkan pengendalian OPT dengan prinsip PHT (Pengendalian Hama Terpadu).
  - Penggalakan penggunaan predator alami dan pestisida hayati.
  - Penyelenggaraan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) dan Sekola Lapang Iklim (SLI).
- Penumbuhan kesadaran, motivasi, dan semangat kelompok untuk menerapkan teknologi pertanian melalui pembinaan, penyuluhan, pendampingan, dan pelaksanaan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT).



- Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait (DPU dan PR) dalam perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi.
- Penguatan kelembagaan P3A/GP3A.
- Pengaturan kembali jadwal tanam.

Masalah yang menjadi tantangan ke depan sekaligus berpotensi menjadi kendala dalam peningkatan produksi dan produktivitas padi pada khususnya dan produk pertanian pada umumnya adalah laju alih fungsi lahan pertanian yang semakin meningkat.

Pada rentang Tahun 2012–2014 telah terjadi alih fungsi lahan pertanian produktif seluas ± 100 Ha. Alih fungsi lahan ini terutama terjadi karena adanya pembangunan jalan tol ruas Solo–Mantingan dan ruas Salatiga – Boyolali serta karena untuk memenuhi kebutuhan permukiman. Wilayah kecamatan yang banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian ini diantaranya Banyudono, Ngemplak, Teras, Mojosongo, Boyolali, dan Ampel. Salah satu upaya untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan ini adalah dengan pembuatan peta digitasi lahan pertanian yang berkriteria pertanian pangan berkelanjutan sebagai dasar untuk mempertahankan luasan lahan pertanian produktif.

Tetapi pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 produktivitas dan produksi padi mulai mengalami kenaikan. Adapun kenaikan ini disebabkan oleh dukungan program antara lain: tanam jajar legowo, subsidi benih unggul, bantuan sarana dan prasarana pertanian seperti transplanter, embung, sumur pantek dan sumur dalam, pompa air, *hand tractor*, *cultivator* dan *combine harvester*.

Tabel II.69  
Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pertanian untuk peternakan  
Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2016 dan Target Tahun 2017

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	HASIL		Target 2017
			2015	2016	
1	Persentase peningkatan produksi hasil peternakan				
	1. Produksi susu sapi	Juta liter	45,54	49,91	46,98
	2. Produksi daging sapi	Ribu ton	9,63	11,36	8,25
	3. Produksi daging ayam	Ribu ton	1,3	12,84	3,79
	4. Produksi telur unggas	Ribu ton	20,25	24,76	12,65
	5. Populasi sapi potong	ekor	86,990	95.651	87.500
	6. Populasi sapi perah	ekor	86,360	89.844	86.910
	7. Populasi kambing	ekor	88.051	89.809	88.781

	8. Populasi domba	ekor	48.644	49.319	48.940
	9. Populasi ayam buras	ekor	887,710	815.585	504.553
	10. Populasi itik	ekor	172,060	158.830	133.079

*Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Boyolali*

Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pertanian untuk peternakan secara terinci sebagai berikut:

1. Produksi susu sapi.

- a. Tercapainya indikator kinerja ini (107%) atau realisasi 49,91 juta liter. hal ini dikarenakan oleh faktor utama yaitu Jaminan kehidupan keseharian masyarakat peternak sapi perah karena harga jual susu yang cukup menguntungkan/menjanjikan dan dapat disisihkan untuk kebutuhan lain (tabungan). Terlepas dari itu dominansi kebijakan pemerintah Kab. Boyolali akan fokus memulihkan icon Kab. Boyolali sebagai Kota Susu, dengan penguatan modal pemerintah berupa bantuan pakan, pengusahaan akan iklim usaha susu yang cukup kompetitif.
- Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah menggunakan 98% anggaran pada program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dengan efisiensi anggaran 2% anggaran, 98% anggaran pada program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan dengan efisiensi anggaran 2% anggaran dan menggunakan 96% anggaran program peningkatan produksi hasil peternakan dengan efisiensi 4% anggaran, efisiensi teknis pembinaan masyarakat peternak sapi perah serta adanya 2 UPTD Puskesmas yang terletak di 6 Kecamatan strategis peternakan sapi perah tersebut.
- Target produksi susu sapi perah 46,78 juta liter tercapai 49,91 juta liter atau capaian kinerja 107%. Capaian indikator 107% ini sesuai dengan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2016. Target produksi susu sapi Tahun 2017 sebesar 46,98 juta liter, indikator ini merupakan akumulasi produksi susu sapi dalam 1 Tahun dan sebagai pembandingan tercapai/tidak tercapainya kinerja Tahun 2017 antara target dengan realisasi capaian Tahun 2017 mendatang.

2. Produksi daging sapi

- Tercapainya indikator kinerja ini (138%) atau realisasi 11,4 ribu ton. Jumlah produksi daging tersebut diperoleh dari produksi daging sapi (Perah dan potong).
- Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dilakukan adalah menggunakan 98% anggaran pada program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dengan efisiensi anggaran 2% anggaran, 98% anggaran pada program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan dengan efisiensi anggaran 2% anggaran dan menggunakan 96% anggaran program peningkatan produksi hasil peternakan dengan efisiensi 4% anggaran, efisiensi teknis pembinaan masyarakat sumber produsen daging hewani dari 5 UPTD Puskesmas.
- Target produksi daging sapi 8,2 ribu ton tercapai 11,4 ribu ton atau capaian kinerja 138%. Capaian indikator 138% ini sesuai dengan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2016. Target produksi daging sapi Tahun 2017 sebesar 8,25 ribu ton, indikator ini merupakan akumulasi produksi daging sapi dalam 1 Tahun dan sebagai pembanding tercapai/tidak tercapainya kinerja Tahun 2017 antara target dengan realisasi capaian Tahun 2017 mendatang.

### 3. Produksi daging ayam

- Tercapainya indikator kinerja ini (339%/surplus) atau realisasi 12,84 ribu ton. Jumlah produksi daging tersebut diperoleh dari produksi daging ayam potong/pedaging, ayam buras, ayam petelur.
- Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dilakukan adalah menggunakan 98% anggaran pada program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dengan efisiensi anggaran 2% anggaran, 98% anggaran pada program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan dengan efisiensi anggaran 2% anggaran dan menggunakan 96% anggaran program peningkatan produksi hasil peternakan dengan efisiensi 4% anggaran, efisiensi teknis pembinaan masyarakat sumber produsen daging ayam dari 5 UPTD Puskesmas.

- Target produksi daging ayam 3,79 ribu ton tercapai 12,84 ribu ton atau capaian kinerja 339% (Surplus). Capaian indikator 339% ini 80% diproduksi oleh perusahaan ayam potong dan 20% dari masyarakat. Capaian indikator tersebut sesuai dengan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2016. Target produksi daging ayam Tahun 2017 sebesar 3,79 ribu ton, indikator ini merupakan akumulasi produksi daging ayam dalam 1 Tahun dan sebagai pembanding tercapai/tidak tercapainya kinerja Tahun 2017 antara target dengan realisasi capaian Tahun 2017 mendatang.

#### 4. Produksi telur unggas

- Tercapainya indikator kinerja ini (196%) atau realisasi 24,76 ribu ton. Jumlah produksi telur unggas tersebut diperoleh dari telur ayam dan jenis unggas lainnya.
- Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dilakukan adalah menggunakan 98% anggaran pada program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dengan efisiensi anggaran 2% anggaran, 98% anggaran pada program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan dengan efisiensi anggaran 2% anggaran dan menggunakan 96% anggaran program peningkatan produksi hasil peternakan dengan efisiensi 4% anggaran serta efisiensi teknis pembinaan masyarakat produsen telur (ayam petelur, buras, itik dan burung puyuh) oleh 5 UPTD Puskesmas.
- Target produksi telur unggas 12,66 ribu ton tercapai 24,76 ribu ton atau capaian kinerja 196%. Capaian indikator 196% ini sesuai Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2016. Target produksi telur unggas Tahun 2017 sebesar 12,65 ribu ton, indikator ini merupakan akumulasi produksi telur unggas dalam 1 Tahun dan sebagai pembanding tercapai/ tidak

tercapainya kinerja Tahun 2017 antara target dengan realisasi capaian Tahun 2017 mendatang.

5. Populasi sapi potong

- Tercapainya indikator kinerja ini (110%) diduga karena keberhasilan pengendalian ternak keluar dan pemotongan di Kabupaten Boyolali serta keberhasilan program Pemeriksaan Kebuntingan (PKB), Asisten Teknik Reproduksi (ATR) dan Inseminasi Buatan (IB).
- Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah menggunakan 98% anggaran pada program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dengan efisiensi anggaran 2% anggaran, 96% anggaran program peningkatan produksi hasil peternakan dengan efisiensi 4% anggaran, dan efisiensi teknis pembinaan masyarakat/keompok peternak di wilayah/sentra sapi potong.
- Target meningkatnya populasi sapi potong 87.000 ekor tercapai 95.651 ekor atau capaian kinerja 110%. Capaian indikator 110% ini telah sesuai dengan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2016. Target populasi sapi potong Tahun 2017 sebesar 87.500 ekor, indikator ini merupakan penambahan populasi dalam 1 Tahun dan sebagai pembanding tercapai/tidak tercapainya kinerja Tahun 2017 antara target penambahan populasi sapi potong (500 ekor) dengan realisasi penambahan populasi sapi potong diakhir Tahun 2017 mendatang.

6. Populasi sapi perah.

- Tercapainya indikator kinerja ini (104%) diduga karena keberhasilan pengendalian ternak keluar dan pemotongan di Kabupaten Boyolali serta keberhasilan program Pemeriksaan Kebuntingan (PKB), Asisten Teknik Reproduksi (ATR) dan Inseminasi Buatan (IB). Faktor lain diduga adanya fakta pada kalangan masyarakat dengan adanya harga susu yang potensial akan menjamin kehidupan sehari-hari peternak tersebut, penguatan modal dari pemerintah melalui Disnakan berupa bantuan ternak sapi perah dara dan pakan sapi perah dan

program pembuatan BUMD Persusuan yang akan lebih memihak kepentingan peternak sapi perah.

- Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah menggunakan 98% anggaran pada program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dengan efisiensi anggaran 2% anggaran, 96% anggaran program peningkatan produksi hasil peternakan dengan efisiensi 4% anggaran, serta efisiensi teknis pembinaan masyarakat/keompok peternak di wilayah/sentra sapi perah.
- Target meningkatnya populasi sapi perah 86.400 ekor tercapai 89.844 ekor atau capaian kinerja 104%. Capaian indikator 104% ini telah sesuai dengan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2016. Target populasi sapi perah Tahun 2017 sebesar 86.910 ekor, indikator ini merupakan penambahan populasi dalam 1 Tahun dan sebagai pembanding tercapai/tidak tercapainya kinerja Tahun 2017 antara target penambahan populasi sapi perah (510 ekor) dengan realisasi penambahan populasi sapi perah diakhir Tahun 2017 mendatang.

#### 7. Populasi kambing.

- Tercapainya indikator kinerja ini (102%) diduga karena keberhasilan pengendalian ternak keluar dan pemotongan di Kabupaten Boyolali serta keberhasilan program PKB, ATR dan IB;
- Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah menggunakan 98% anggaran pada program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dengan efisiensi anggaran 2% anggaran, 96% anggaran program peningkatan produksi hasil peternakan dengan efisiensi 4% anggaran serta efisiensi teknis pembinaan masyarakat/keompok peternak di wilayah/sentra ternak kambing.

- Target meningkatnya populasi kambing 88.231 ekor tercapai 89.809 ekor atau capaian kinerja 102%. Capaian indikator 102% ini telah sesuai dengan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2016. Target populasi kambing Tahun 2017 sebesar 88.781 ekor, indikator ini merupakan penambahan populasi dalam 1 Tahun dan sebagai pembanding tercapai/tidak tercapainya kinerja Tahun 2017 antara target penambahan populasi kambing (550 ekor) dengan realisasi penambahan populasi kambing diakhir Tahun 2017 mendatang.
8. Populasi domba.
- Tercapainya indikator kinerja ini (101%) diduga karena keberhasilan pengendalian ternak keluar dan pemotongan di Kabupaten Boyolali serta keberhasilan program PKB, ATR dan IB.
  - Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah menggunakan 98% anggaran pada program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dengan efisiensi anggaran 2% anggaran, 96% anggaran program peningkatan produksi hasil peternakan dengan efisiensi 4% anggaran serta efisiensi teknis pembinaan masyarakat/kelompok peternak di wilayah/sentra ternak domba.
  - Target meningkatnya populasi domba 48.640 ekor tercapai 49.319 ekor atau capaian kinerja 101%. Capaian indikator 101% ini telah sesuai dengan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2016. Target populasi domba Tahun 2017 sebesar 48.940 ekor, indikator ini merupakan penambahan populasi dalam 1 Tahun dan sebagai pembanding tercapai/tidak tercapainya kinerja Tahun 2017 antara target penambahan populasi domba (300 ekor) dengan realisasi penambahan populasi domba diakhir Tahun 2017 mendatang.
9. Populasi ayam buras.
- Tercapainya indikator kinerja ini (162%) diduga karena masyarakat sudah meyakini bahwa virus flu burung telah diminimalisir dan banyak permintaan ayam buras dipasaran saat ini.

- Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah menggunakan 98% anggaran pada program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dengan efisiensi anggaran 2% anggaran, 96% anggaran program peningkatan produksi hasil peternakan dengan efisiensi 4% anggaran serta efisiensi teknis pembinaan masyarakat/kelompok peternak di wilayah/sentra ternak ayam buras.
- Target meningkatnya populasi ayam buras 503.553 ekor tercapai 815.585 ekor atau capaian kinerja 162%. Capaian indikator 162% ini telah sesuai dengan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2016. Target populasi ayam buras Tahun 2017 sebesar 504.553 ekor, indikator ini merupakan penambahan populasi dalam 1 Tahun dan sebagai pembandingan tercapai/tidak tercapainya kinerja Tahun 2017 antara target penambahan populasi ayam buras (1.000 ekor) dengan realisasi penambahan populasi ayam buras diakhir Tahun 2017 mendatang.

#### 10. Populasi itik.

- Tercapainya indikator kinerja ini (120%) diduga karena itik sebagai ternak substitusi unggas potensial dengan kelebihan tahan penyakit dan permintaan pasar yang selalu meningkat pada Tahun 2014 dan / Tahun 2015 dan pemeliharaan yang mudah walaupun memiliki kekurangan polusi udara (bau kotoran) yang dihasilkan. Akan tetapi dengan pemeliharaan yang terintegrasi dengan teknis pemeliharaan yang baik maka kelemahan tersebut dapat dikurangi, sebagai contoh penggunaan bakteri pengurai yang telah banyak tersedia di toko/*poultry shop* untuk mengurangi polusi udara/bau kotoran.
- Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah menggunakan 98% anggaran pada program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dengan efisiensi anggaran 2% anggaran, 96% anggaran program peningkatan produksi hasil peternakan dengan efisiensi 4% anggaran serta efisiensi teknis pembinaan masyarakat/kelompok peternak di wilayah/sentra peternak itik.



- Target meningkatnya populasi itik 132.079 ekor tercapai 158.830 ekor atau capaian kinerja 120%. Capaian indikator 120% ini telah sesuai dengan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2016. Target populasi itik Tahun 2017 sebesar 133.079 ekor, indikator ini merupakan penambahan populasi dalam 1 Tahun dan sebagai pembandingan tercapai/tidak tercapainya kinerja Tahun 2017 antara target penambahan populasi itik (1.000 ekor) dengan realisasi penambahan populasi ayam buras diakhir Tahun 2017 mendatang.

4) Bidang Kehutanan

Tabel II.70  
 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Kehutanan  
 Kabupaten Boyolali Tahun 2014-2015 dan Target Tahun 2016

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	HASIL		Target 2016
			2014	2015	
1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Ha	2.260	875	475
2	Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	31,2	209	-

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Boyolali

5) Energi dan Sumberdaya Mineral

Tabel II.71  
 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral  
 Kabupaten Boyolali Tahun 2014-2015 dan Target Tahun 2016

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	HASIL		Target 2016
			2014	2015	
1	Pertambangan tanpa ijin	%	38,5	50,4	60

Sumber: DPU dan PR Kab. Boyolali

Indikator ini pada Tahun 2015 dengan target 60% dapat terealisasi 50,4% atau capaian kinerja sebesar 84%, sehingga indikator ini tidak dapat tercapai, dikarenakan jumlah kegiatan pertambangan yang telah mengajukan Wilayah Izin Usaha Pertanian (WIUP) mengalami kendala untuk pengajuan peningkatan Izin Usaha Pertanian (IUP) baik Izin Usaha Pertanian (IUP) Eksplorasi maupun Izin Usaha Pertanian (IUP) Operasi produksi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamankanatkan sejak tanggal 2 Oktober 2014 perizinan di Bidang ESDM (Sub Urusan Geologi dan Air Tanah, Mineral Dan Batubara, Energi Baru Terbarukan dan Ketenaga listrikian) menjadi

Kewenangan Pemerintah Provinsi, sehingga semua proses perizinan pertambangan di wilayah Kabupaten Boyolali harus sudah diserahkan kepada Gubernur/Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, dengan target RPJMD pada Tahun 2015 sebesar 60% tidak dapat tercapai, penjelasannya karena kegiatan pertambangan liar yang beroperasi, waktu penambangan serta luasannya pada tiap Tahun sangat fluktuatif dan tidak dapat diprediksi, karena sangat dipengaruhi oleh permintaan pasar.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah bahwa kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang ada di wilayah Kabupaten Boyolali tidak hanya kegiatan pertambangan yang menggunakan alat berat dan berskala menengah, tetapi juga kegiatan pertambangan manual (hingga saat ini masih dimengerti sebagai Pertambangan Rakyat) yang bersifat sporadis, periodik dan dalam skala relatif kecil.

Sehingga apabila menggunakan indikator kinerja berupa peningkatan presentase pertambangan yang mempunyai ijin, sangat sulit untuk menentukan presentase tiap Tahunnya apalagi perkembangan capaian kinerja pada setiap Tahunnya. Disebabkan oleh banyaknya kegiatan pertambangan liar yang beroperasi, waktu penambangan serta luasannya pada tiap Tahun sangat fluktuatif dan tidak dapat diprediksi, karena sangat dipengaruhi oleh permintaan pasar.

1) Perdagangan

Tabel II.72  
 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Perdagangan  
 Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2016 dan Target Tahun 2017

No	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	HASIL		TARGET 2017
			2015	2016	
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	26,355 (ADHB)	*	13,50
		Juta(Rp)	3.511.143,25 (ADHB)	*	**
		%	27,01 (ADHK)	*	**
		Juta(Rp)	1.476.729,5 (ADHK)	*	**
2	Ekspor Bersih Perdagangan	US \$	2.782.767,04	244.218. 547,96	**
	Ekspor	US \$	187.677.660, 96	244.501. 759,86	136.500

3	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	UPTD/ Kelompok	12	12	12
---	---	-------------------	----	----	----

Sumber data: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Boyolali

Keterangan:

\* = Data dari BPS (not available)

\*\* = tidak menjadi indikator Disperindag pada RPJMD 2016-2021

Ekspor bersih = US \$ 244.501.759,86 - US \$ 283.211,90

= US \$ 244.218.547,96

Capaian Aspek Pelayanan bidang Perdagangan Tahun 2016 didukung oleh ekspor bersih perdagangan yang mengalami kenaikan dari US \$ -2.782.767,04 menjadi US \$ 244.218.547,96. Kenaikan ekspor bersih terjadi karena naiknya nilai ekspor dan turunnya nilai impor secara signifikan pada Tahun 2016 ini.

#### 1) Perindustrian

Tabel II.73

Capaian Aspek Pelayanan Bidang Perindustrian  
Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2016 dan Target Tahun 2017

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	HASIL		Target 2017
			2015	2016	
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	16,35 (ADHB)	*	**
		Juta (Rp)	2.170.974 (ADHB)	*	**
		%	17,83 (ADHK)	*	**
		Juta (Rp)	951.923 (ADHK)	*	**
2	Pertumbuhan Industri	%	38,42	1.34	1.4
3	Cakupan bina kelompok pengrajin	Kelompok	33	33	33
4	Semakin berkembangnya industri kecil dan menengah	IKM	29	120	150
5	Meningkatnya penerapan teknologi dan standart produk industri daerah	IKM	65	180	155

Sumber data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Boyolali

Keterangan:

\* = Data dari BPS (not available)

\*\* = tidak menjadi indikator Disperindag pada RPJMD 2016-2021

Pada Tahun 2015 sektor industri mempunyai andil sebesar 16,35 (ADHB) sedangkan untuk pertumbuhan industri di Tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar 38,42% dan 1,34% dengan cakupan bina kelompok pengrajin mencapai 33 (tiga puluh tiga) kelompok.

Adapun industri kecil dan menengah yang dibina sehingga berkembang usahanya mencapai 120 IKM pada Tahun 2016, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada kenaikan sebesar 91 IKM. Begitu juga dengan 180 IKM yang meningkat dalam penerapan teknologi dan standart produk industri daerah pada Tahun 2016, naik sebesar 55 IKM jika dibandingkan dengan Tahun 2015.

#### 1) Transmigrasi

Tabel II.74

Capaian Aspek Pelayanan Bidang Ketramigrasian  
Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2016 dan Target Tahun 2017

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	HASIL		Target 2017
			2015	2016	
1	Transmigran swakarsa	%	0	0	0
2	Kontibusi transmigrasi terhadap PDRB	%	37,07	33,3	30

*Sumber: Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kab. Boyolali*

Capaian Aspek Pelayanan Bidang Ketramigrasian secara terinci sebagai berikut:

- Jumlah Transmigran Swakarsa pada Tahun 2016 tidak ada 0 (nol). Mulai Tahun 2012 Kabupaten Boyolali tidak memberangkatkan Transmigrasi Swakarsa. Program penempatan Transmigrasi Swakarsa dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang direncanakan periode Tahun 2010-2014, hanya dapat terlaksana sampai Tahun 2012, karena banyaknya permasalahan yang muncul, baik transmigran maupun daerah penempatan. Mulai Tahun 2011 tidak ada penempatan transmigran swakarsa, karena dari pusat sendiri sudah tidak ada program tersebut.
- Penempatan transmigrasi umum untuk Tahun 2016 sebanyak 10 Kartu Keluarga dengan target sebanyak 30 Kartu Keluarga. Sehingga kontribusi transmigran terhadap PDRB sebesar 33,3%.

b)c.ii.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

1) Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan urusan penunjang yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta atas-bawah dan bawah-atas. Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Demi terciptanya perencanaan pembangunan yang konsisten dan berkelanjutan serta sebagai dasar penyusunan dokumen penganggaran, telah disusun dokumen perencanaan pembangunan secara periodik untuk kurun waktu tertentu. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dua puluh Tahunan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025. Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan ditetapkan setiap Tahun dengan Peraturan Bupati. Setiap dokumen perencanaan pembangunan disusun dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031.

Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Boyolali dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.75  
Dokumen Perencanaan Pembangunan  
Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2016 dan Target Tahun 2017

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	HASIL		Target 2017
			2015	2016	
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokume n	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen	Dokume	Ada	Ada	Ada

	Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	n			
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Peraturan Kepala Daerah)	Dokumen	Ada	Ada	Ada
4	Penjabaran Program RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) ke dalam RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah)(%)	%	100%	100%	100%

Sumber: BP3D Kabupaten Boyolali

Tabel II.76

Capaian Aspek Pelayanan Bidang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2016 dan Target Tahun 2017

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	HASIL		Target 2017
			2015	2016	
1	Penyusunan Buku IPM Kab. Boyolali	%	100	100	100
2	Pelacakan Batas Daerah	%	40	40	40
3	Penyusunan dokumen RKPD	Dokumen	2	2	2
4	Penyusunan Lap. Evaluasi Pembangunan	%	100	100	100
5	Penyelenggaraan pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD dan Gubernur	%	100	100	100
6	Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Mendagri	%	100	100	100
7	Penyediaan data profil peluang investasi	%	100	100	100
8	Pembinaan kelembagaan petani	Dokumen	2	2	2
9	Pembangunan database dan informasi untuk keperluan perencanaan pembangunan ekonomi	Dokumen	1	1	1
10	Koordinasi pelaksanaan pendidikan untuk semua tersedianya laporan kegiatan Pendidikan Untuk Semua (PUS)	%	100	100	100

Sumber: BP3D Kabupaten Boyolali

## 2) Keuangan

### a. Administrasi Keuangan

Kabupaten Boyolali telah mendapat piagam penghargaan WTP dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, untuk LKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2015 merupakan Tahun kelima kalinya memperoleh WTP dari BPK. Opini WTP yang diberikan BPK memberikan gambaran bahwa sistem pengendalian internal dan pengelolaan keuangan daerah di Boyolali telah sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah.

Hal ini merupakan wujud penghargaan dan komitmen Pemerintah kepada seluruh kementerian, lembaga negara, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota yang laporan keuangannya sudah diperiksa BPK dan mendapat status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

b. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah

Prioritas pemanfaatan aset daerah difokuskan pada upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Optimalisasi penataan, pengelolaan dan pemberdayaan aset daerah dilakukan secara periodik antara lain melalui sertifikasi, pemasangan label dan patok batas tanah, inventarisasi dan identifikasi nilai aset serta validasi neraca aset serta penyelesaian kasus/sengketa.

3) Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

- a. Pengembangan sumber daya aparatur merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kinerja aparatur. Pengembangan sumber daya manusia bagi aparatur pemerintahan, melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) merupakan faktor dominan dalam meningkatkan efisiensi kinerja, serta produktifitas kinerja pegawai agar pegawai dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan nasional dan tantangan global. Dalam upaya meningkatkan efisiensi kinerja, serta produktivitas kinerja aparatur melalui pendidikan maupun pelatihan-pelatihan serta pembinaan-pembinaan terhadap pegawai. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur antara lain dilaksanakan melalui pengiriman Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tugas belajar dan fasilitasi ijin belajar, pelaksanaan diklat, bimbingan teknis, dan pengembangan karier

Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui promosi terbuka dan *assesment centre* pegawai.

b. Reformasi Birokrasi

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 yang dijabarkan melalui beberapa tahapan *Road Map*. Dalam rangka perwujudan *good governance* telah disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014 oleh pemerintah pusat yang harus diacu oleh pemerintah daerah. Reformasi Birokrasi pada dasarnya merupakan proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif). Mendasarkan *Road Map* tersebut telah ditetapkan 8 area perubahan yang sudah diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, serta *mind-set* dan *culture set* aparatur.

Tabel II.77  
Diklat Aparatur Kabupaten Boyolali  
Kabupaten Boyolali Tahun 2015 – 2016 dan Target 2017

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATU AN	HASIL		TARGET 2017
			2015	2016	
1	Diklat Teknis	Orang	566	459	350
2	Diklat Fungsional	Orang	20	8	5
3	Diklat Kepemimpinan	Orang	36	41	50
4	Diklat Pemerintah Daerah	Orang	0	0	0
5	Diklat Prajabatan	Orang	437	36	34

*Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah  
Kabupaten Boyolali*

Pada Tahun Anggaran 2017 jumlah peserta Diklat Pemerintah Kabupaten Boyolali direncanakan 439 orang seperti dalam tabel diatas.

Diklat Teknis direncanakan berupa diklat pengadaan barang/jasa pemerintah (50 orang) yang akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga, selain itu Diklat Teknis juga dilaksanakan untuk meningkatkan



kompetensi teknis dalam bentuk Rapat Koordinasi, rapat Teknis dan Lokakarya (300 orang).

Diklat fungsional direncanakan untuk 5 orang dengan perincian sebagai berikut:

- Diklat Pengawas Makanan Daerah untuk 1 (satu) orang;
- Diklat Sanitarian untuk 1 (satu) orang;
- Diklat Auditor untuk 2 (dua) orang; dan
- Diklat Penyuluh Pertanian untuk 1 (satu) orang.

Diklat Kepemimpinan (Diklat PIM) direncanakan untuk 50 orang dengan perincian sebagai berikut:

- Diklat PIM II untuk 5 (lima) orang;
- Diklat PIM III untuk 10 (sepuluh) orang; dan
- Diklat PIM IV untuk 35 (tiga puluh lima) orang.

Diklat Prajabatan direncanakan 34 orang untuk Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang diangkat Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Pemerintah Kabupaten Boyololali

#### 4) Penelitian dan Pengembangan

Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadinya kolaborasi antar aktor pembangunan merupakan faktor kunci peningkatan daya saing. Pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam sistem inovasi nasional yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem inovasi.

Pada dasarnya, merupakan agenda nasional sesuai dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Dalam rangka menumbuhkembangkan penguasaan, pemanfaatan, pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi diwujudkan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), yang diamanatkan melalui Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset

dan Teknologi Nomor 03 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah

4)b.ii.5 Fungsi lainnya

1) Kesekretariatan DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali untuk mendukung Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat, maka kesekretariatan DPRD Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan fungsinya yaitu :

1. Fungsi Legislatif sebagaimana dimaksud dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati, untuk faktor pendukung :
  - a) Semakin meningkatnya kualitas dan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - b) Kualitas Pembahasan Ranperda;
  - c) Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas kedewanan;
  - d) Meningkatnya Optimalisasi pelaksanaan tugas dalam mencapai tujuan;
  - e) Untuk menjamin agar anggota DPRD adalah kader-kader yang memiliki kompetensi yang memadai perlu dibangun sistem pengembangan SDM.
2. Fungsi Anggaran yang dimaksud dalam membahas dan menyetujui Rancangan APBD bersama Bupati dan untuk mewujudkan fungsi anggaran ini dilakukan melalui kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Cara melaksanakan kegiatan ini adalah dijadwalkan rapat-rapat baik Gabungan maupun dengar pendapat dengan Perangkat Daerah dan untuk mengoptimalkan agar dilaksanakan sesuai rencana, maka untuk moment penting diadakan di luar gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dalam hal ini dilaksanakan disalah satu ruang rapat seperti :
  - a). Kegiatan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ini adalah

tersusunnya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yaitu :

- Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni.

3. Fungsi Pengawasan adalah sebagaimana dalam pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam Fungsi pengawasan dalam lingkup Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) cara mencapainya dengan disusunnya dan ditetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bentuk kegiatannya adalah Kunjungan Kerja sharing untuk mendapatkan masukan tentang Peran Badan Kehormatan dan Penguatan Kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan tupoksinya adalah :

- a). Semakin meningkatnya kualitas peran dan fungsi Badan Kehormatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan semakin menguatnya kapasitas kelembagaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mendukung pelaksanaan Tupoksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- b). Semakin meningkatnya kesadaran, ketaatan dan kepatuhan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Kode Etik dan Peraturan – peraturan yang ada.

Adapun Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali untuk mendukung Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat adalah :

1. Peningkatan Pelayanan dalam memfasilitasi kegiatan dewan;
2. Peningkatan Sumber Dana yang berprinsip efisien;
3. Peningkatan Sarana dan prasarana Penunjang Kegiatan;

4. Perencanaan Kegiatan Dewan yang disesuaikan dengan Keputusan tata tertib dewan;
5. Peningkatan Koordinasi lintas kinerja Sekretariat Dewan;
6. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi lintas Sekretariat Dewan dengan dewan;
7. Peningkatan dan optimalisasi kinerja setwan dalam memfasilitasi kegiatan dewan.

2) Penyusunan kebijakan, koordinasi administratif dan Pelayanan

a. Penyusunan kebijakan

Untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat serta mewujudkan ketenteraman dan kedamaian dalam masyarakat perlu adanya kebijakan. Dalam penyusunan kebijakan Kabupaten Boyolali melakukan Penataan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan produk hukum/regulasi daerah yang dihasilkan berdasarkan prolegda.

b. Koordinasi Administratif

Kerja sama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diharapkan dapat menyeraskan pembangunan daerah dan mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi maupun kapasitas fiskal. Melalui kerja sama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah perbatasan antar daerah. Kerja sama daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di daerah maupun antar daerah.

Hal ini sangat relevan dengan visi Kabupaten Boyolali mewujudkan masyarakat Kabupaten Boyolali yang lebih sejahtera, berdaya saing dan pro investasi, sehingga kerjasama daerah merupakan gerbang utama untuk membuka dan menarik

investasi di Kabupaten Boyolali. Kami informasikan bahwa, Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam mengoptimalkan kerjasama baik antar daerah maupun dengan pihak ketiga telah membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD), selama Tahun 2015 tim telah melaksanakan tugasnya antara lain melakukan penjajagan maupun fasilitasi pembahasan kerjasama dengan berbagai pihak baik antar daerah maupun pihak ketiga.

Kerjasama daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Boyolali meliputi Kerjasama antar Daerah dan Kerjasama dengan pihak ketiga.

Kerjasama Kabupaten Boyolali dengan Dearah lain meliputi bidang ketenagakerjajaan dan kepegawaian, tata ruang dan sumber daya serta lingkungan hidup, pembangunan sarana dan prasarana, perhubungan dan pariwisata, kependudukan, permukiman dari masalah sosial, air bersih, perindustrian dan perdagangan, penelitian dan pengembangan iptek, sumber daya manusia, kesehatan, pertanian dan pengairan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, perlindungan khusus terhadap anak, Java Promo, Forum Merapi, dan transmigrasi.

Kerjasama Kabupaten Boyolali dengan pihak ketiga meliputi bidang kesehatan, ketenagakerjaan dan penunjukan tempat penyimpanan dan pembayaran dana.

c. Pelayanan

Untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan penghargaan kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi, Kabupaten/kota terbaik 2016. Penghargaan ini diberikan kepada 3 (tiga) penyelenggara PTSP terbaik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Kabupaten Boyolali mendapat Juara 3 tingkat Nasional dalam lomba PTSP Tahun 2016. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada penyelenggara PTSP di daerah berdasarkan hasil kualifikasi dari total 561 (lima ratus enam puluh satu) daerah provinsi, kabupaten, kota, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan

kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas tercatat 526 daerah telah membentuk PTSP.

Kabupaten Boyolali mendapat juara dalam Penilaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Boyolali telah menyederhanakan Peraturan Daerah (Perda) dari 33 (tiga puluh tiga) Perda menjadi 3 (tiga) Perda yakni Perda Pelayanan Investasi, Perda Retribusi serta Perda Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) BPMP2T. Penyederhanaan Perda ini dimaksudkan untuk mempermudah para investor baik investor dalam Negeri maupun luar negeri dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Boyolali. Selain itu dari 46 (empat puluh enam) jenis perijinan yang ada, hanya 2 (dua) layanan perijinan yang masih ditarik retribusinya yakni Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Gangguan/HO. Khusus Ijin HO untuk Industri kecil UMKM mulai Tahun 2016 digratiskan tanpa membayar biaya sepeserpun. Selain itu BPMP2T juga memberikan layanan inovasi berbasis IT yang intinya bisa memberikan kemudahan kepada para investor seperti layanan Perijinan *Online*, Peta Potensi Investasi *online*, *SMS Gate way*, *paperless*, *elektronik document*, Aplikasi *Top Screen*, *Geographic Information Sistem Survey* (GIS) serta *Barcode* yang berfungsi untuk mengantisipasi pemalsuan dokumen.

### 3) Pembinaan dan Pengawasan

Pada Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Kabupaten Boyolali telah melakukan pemeriksaan reguler sebanyak 100 (seratus) Obrik, Pemeriksaan kasus/khusus dari target 40 (empat puluh) LHP dapat tercapai sebanyak 43 LHP, *Review* laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat tercapai 1 (satu) LHP, Laporan *Review* LAKIP 1 (satu) LHR, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dapat tercapai 1 (satu) kegiatan, Pelaksanaan laporan Harta Kekayaan Aparat Sipil Negara (LHKASN) dari target 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) laporan dapat tercapai 10.571 (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh satu) laporan dan Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) tercapai 1 (satu) kegiatan.

### 4) Administrasi Umum pada Semua Perangkat Daerah

Untuk mendukung terlaksananya semua kegiatan dalam pembangunan daerah, maka administrasi umum sangat diperlukan demi kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Administrasi umum pada semua perangkat daerah meliputi kegiatan rutin yang ada disetiap Perangkat Daerah.

Aspek Daya Saing Daerah  
 4)b.ii.6 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

- 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita)
- 2) Nilai Tukar Petani

NTP pada Tahun 2014 sebesar 105, lebih tinggi dibandingkan Tahun 2013 sebesar 104, sedangkan di Tahun 2015 naik menjadi 106. Mengacu pada kondisi perekonomian yang berdampak pada kenaikan harga hasil pertanian, NTP pada Tahun 2016 ditargetkan menjadi sebesar 105-107.

Secara umum perkembangan ekonomi makro Tahun 2013-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.78  
 Perkembangan Ekonomi dan Prospek Ekonomi  
 Kabupaten Boyolali Tahun 2013–2015 dan target 2016

No	Indikator	2013	2014	2015	Target 2016
1.	PDRB :				
	Atas dasar harga berlaku (Trilyun Rp)	18,798	20,958	23,360	26,038
	Atas dasar harga konstan (Trilyun Rp)	16,265	17,085	18,107	19,140
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,43	5,48	5,48	5,4-5,6
3.	Inflasi (%)	8,21	7,45	2,58	5,5-6,0
4.	Indeks Gini	0,40	0,38	0,35	0,3-0,4
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,46	4,95	5,43	4,37
6.	Kemiskinan	13,27	12,36	12,55	12,05
7.	Nilai Tukar Petani (NTP)	104	105	106	105-107

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali.

- 3) Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan)

3)b.ii.7 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

- 1) Perhubungan

Tabel II.79  
 Capaian Aspek Daya Saing Daerah Fokus  
 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Bidang Perhubungan  
 Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2016 dan Target Tahun 2017

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	HASIL		Target 2017
			2015	2016	
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Volume/ Kapasitas	0,033	0,038	0,039
2	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang (barang)	1.562.966	1.456.500	1.250.000
3	Jumlah orang/barang melalui terminal per Tahun	Orang (barang)	6.870.247	6.817.262	6.800.000

*Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Boyolali*

Capaian Aspek Daya Saing Daerah Fokus Fasilitas Wilayah/infrastruktur Bidang Perhubungan secara terinci sebagai berikut:

- a Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan untuk pada Tahun 2015 sebesar 0,033 dan untuk Tahun 2016 sebesar 0,038 rasio diperoleh dari jumlah panjang jalan dibagi jumlah kendaraan target Tahun 2017 sebesar 0,039
- b Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum Tahun 2015 sebanyak 1.562.966 orang untuk Tahun 2016 sebanyak 1.456.500 orang target Tahun 2017 sebanyak 1.230.000 orang
- c Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun, Tahun 2015 sebanyak 6.870.247 orang sedangkan untuk Tahun 2016 sebanyak 6.817.262 orang target Tahun 2017 sebanyak 6.800.000 orang.

## 2) Lingkungan Hidup

Tabel II.80  
 Capaian Aspek Daya Saing Daerah Fokus Fasilitas  
 Wilayah/Infrastruktur Bidang Lingkungan Hidup  
 Kabupaten Boyolali Tahun 2014-2015 dan Target Tahun 2016

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	HASIL		Target 2016
			2014	2015	



1	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	%	77,18	77,37	77,55
---	--	---	-------	-------	-------

Sumber: DPU dan PR Kab. Boyolali

Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih Tahun 2013 sebesar 165.274 rumah pada Tahun 2014 sebesar 164.860 rumah, untuk Tahun 2015 ditargetkan sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) rumah tangga pengguna air bersih.

3) Komunikasi dan Informatika

Tabel II.81

Capaian Aspek Daya Saing Daerah Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2016 dan Target Tahun 2017

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	HASIL		Target 2017
			2015	2016	
1	Rasio ketersediaan daya listrik	VA	140.555	214.605	220.000
2	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	%	85	89	90

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Boyolali

Capaian Aspek Daya Saing Daerah Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Bidang Komunikasi dan Informatika secara terinci sebagai berikut:

Rasio ketersediaan daya listrik Tahun 2015 sebesar 140.555 VA, prosentase ini diperoleh dari jumlah daya listrik terpasang dibagi jumlah daya listrik tersedia/kebutuhan satuan VA. Untuk Tahun 2016 Rasio ketersediaan daya listrik yaitu sebesar 214.605 VA.

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Tahun 2015 sebesar 85%, sedangkan Tahun 2016 sebesar 89%. Target Tahun 2016 tidak bertambah karena Pemerintah Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki kewenangan dalam ketenagalistrikan (UU No. 23 Tahun 2014). Untuk Tahun 2017 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik ditargetkan sebesar 90%.

3)b.ii.8 Fokus Iklim Berinvestasi

- 1) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Tabel II.82 Capaian Aspek Daya Saing Daerah  
Fokus Iklim Berinvestasi Bidang Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2016 dan Target Tahun 2017

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	HASIL		TARGET 2017
			2015	2016	
1	Angka kriminalitas	%	80	80	80
2	Jumlah demo	Kali	3	3	2
3	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	Pajak Daerah	11	11	11
		Retribusi umum	10	7	7
		Retribusi usaha	10	10	10
		Retribusi Perijinan	3	2	2
4	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Perda	0	0	2

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kab. Boyolali

1. Angka kriminalitas

Diharapkan angka kriminalitas yang terjadi turun prosentasenya dibandingkan Tahun sebelumnya. Penurunan ini mengindikasikan masalah keamanan dan kenyamanan lingkungan yang kondusif untuk ditinggali dan untuk berinvestasi.

2. Jumlah demo

Capaian jumlah demo yang berkurang Tahun sebelumnya masyarakat semakin puas terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Boyolali maupun Pemerintah Pusat yang berimplikasi ke daerah.

2.b.ii.9 Fokus Sumber Daya Manusia

- 1) Salah satu indikator pembangunan pada bidang Sumber Daya Manusia adalah tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan). Ketergantungan dalam hal ini adalah ketergantungan dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup seseorang karena tidak memiliki penghasilan sendiri. Rasio ketergantungan merupakan

perbandingan antara penduduk usia 15-64 Tahun dibagi Penduduk Usia Kerja (PUK) kali 100.

Rasio ketergantungan pada Tahun 2014 sebesar 50,71% yang berarti bahwa setiap 100 orang usia produktif menanggung sekitar 52 orang yang belum atau sudah tidak produktif lagi. Kondisi ini relatif stabil jika dibandingkan dengan Tahun 2013 yang berada pada angka 52,5%.

1)2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

1)2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD

Evaluasi Pelaksanaan RKPD bermaksud untuk mengetahui sejauh mana prediksi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun 2017 Kabupaten Boyolali sampai dengan Triwulan I. Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2017 bertujuan untuk menilai dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2017 dan sasaran RPJMD dapat dicapai dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan provinsi maupun nasional Tahun 2017.

Pemerintah Kabupaten Boyolali mempunyai 49 Perangkat Daerah (termasuk 9 Bagian di Sekretariat Daerah) dengan total 57 kuesioner evaluasi RKPD. Capaian pelaksanaan RKPD Kabupaten Boyolali 2017 sampai dengan Triwulan I (setelah diverifikasi dengan dokumen RKPD Tahun 2017) per Perangkat Daerah tersaji pada Tabel berikut:

Tabel II.83

Evaluasi RKPD Triwulan I Tahun 2017

No	OPD	TOTAL			TOTAL			JUMLAH REALISASI ANGGARAN	% RATA-RATA	
		(dalam RKPD)			(dalam APBD)				REALISASI KINERJA	
		Anggaran	Kegiatan	Program	Anggaran	Kegiatan	Program	Rupiah	%	%
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	7,137,557,000	38	10	6,424,372,000	38	10	603,351,837	9.39	19.16
2	BADAN KEUANGAN DAERAH	36,132,895,000	63	7	35,524,613,000	62	8	1,041,129,449	2.93	14.47
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2,911,056,000	35	4	2,980,539,000	38	5	0	0	8.36
4	BADAN PERENCANA, LIT DAN BANG	5,787,925,000	52	16	5,294,409,000	46	15	308,359,303	5.82	11.61
5	BAGIAN HUKUM DAN HAM	875,000,000	6	2	875,067,000	6	2	268,580,290	30.69	30.77
6	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1,892,460,000	6	2	1,770,950,000	6	2	56,489,564	3.19	6.92
7	BAGIAN ORGANISASI	475,000,000	6	3	647,065,000	9	5	144,180,000	22.28	2.22
8	BAGIAN OTONOMI DAERAH	783,490,000	15	8	903,424,000	13	9	252,213,564	27.92	41.92
9	BAGIAN PEMBANGUNAN	341,243,000	3	2	279,028,000	4	2	7,695,000	2.76	14.58
10	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	932,072,000	19	5	858,082,000	20	4	94,414,320	11	6.5
11	BAGIAN PEREKONOMIAN	5,885,000,000	6	2	10,857,551,000	7	2	43,176,065	0.4	0
12	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	381,388,000	9	7	372,520,000	9	7	11,811,380	3.17	25

13	BAGIAN UMUM	2,699,784,000	12	2	2,263,299,000	11	2	92,766,962	4.1	25
14	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2,014,144,000	30	10	1,822,942,000	29	9	81,000,471	4.44	19.42
15	DINAS KESEHATAN	82,891,435,000	51	17	80,452,349,000	50	17	3,726,179,040	4.63	18.13
16	DINAS KETAHANAN PANGAN	2,892,268,000	35	8	1,836,311,000	30	5	140,378,376	7.64	15.56
17	DINAS KOMINFO	2,866,802,000	26	8	7,015,619,000	28	8	584,197,579	8.33	16.45
18	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA	4,720,913,000	56	12	4,236,926,000	51	11	394,391,018	9.31	108.48
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	32,908,168,000	41	12	31,904,709,000	41	11	279,698,324	0.88	11.42
20	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	214,444,410,000	39	15	202,280,951,000	38	15	497,877,078	0.25	2.81
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5,971,890,000	34	11	5,471,607,000	35	11	317,333,945	5.8	9.56
22	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	9,594,156,500	46	12	25,133,946,000	46	12	634,013,225	2.52	11.89
23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)	1,795,854,000	28	7	1,909,354,000	25	7	188,998,466	9.9	19.29
24	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	56,385,653,000	74	11	132,410,983,000	65	11	420,320,719	0.32	23.33
25	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4,142,256,000	43	13	3,496,624,000	49	16	79,099,250	2.26	38.97
26	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN	31,076,933,000	35	10	33,041,346,000	37	10	166,357,803	0.5	28.07
27	DINAS PERHUBUNGAN	27,573,320,000	32	10	37,938,064,000	33	11	5,056,969,478	13.33	7.72
28	DINAS PERTANIAN	25,049,676,500	44	7	16,063,211,000	46	9	353,206,709	2.2	10.88
29	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10,730,763,000	18	4	10,642,019,000	18	4	29,513,688	0.28	21.01
30	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	3,325,802,500	31	7	3,273,803,000	30	7	158,463,784	4.84	25.43
31	DINAS SOSIAL	4,192,693,000	36	9	2,101,097,000	33	9	78,837,201	3.75	12.71
32	DISDUKCAPIL	5,350,927,000	30	5	5,138,612,000	32	5	447,918,671	8.72	16.41
33	INSPEKTORAT	2,276,091,000	31	6	2,311,867,000	32	6	254,952,048	11.03	17.06
34	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1,725,718,000	34	8	3,950,709,000	34	8	136,416,100	3.45	8.18
35	KEC. AMPEL	640,650,000	34	13	685,650,000	33	12	86,922,996	12.68	12.67
36	KEC. ANDONG	406,935,000	35	13	392,435,000	35	13	47,747,500	12.17	33.58
37	KEC. BANYUDONO	370,270,000	30	13	370,270,000	30	13	29,394,000	7.94	9.17
38	KEC. BOYOLALI	1,526,968,000	34	12	1,526,968,000	33	12	134,863,945	8.83	23.59
39	KEC. CEPOGO	712,002,500	35	12	712,003,000	35	12	61,974,811	8.7	34.56
40	KEC. JUWANGI	472,287,500	30	11	472,288,000	31	11	44,626,144	9.45	18.37
41	KEC. KARANGGEDE	572,572,500	30	11	608,573,000	31	11	9,880,000	1.62	31.36
42	KEC. KEMUSU	473,075,000	31	11	517,075,000	32	11	0	0	24.61
43	KEC. KLEGO	829,200,000	36	11	829,200,000	36	11	53,544,715	6.46	16.5
44	KEC. MOJOSONGO	556,268,000	30	10	556,268,000	30	10	194,015,500	34.88	26.45
45	KEC. MUSUK	882,860,000	37	12	932,360,000	37	12	31,251,053	3.35	11.49
46	KEC. NGEMPLAK	601,587,500	35	13	584,788,000	34	13	41,318,547	7.07	13.89
47	KEC. NOGOSARI	1,172,557,500	40	13	899,558,000	35	13	63,294,514	7.04	16.49
48	KEC. SAMBI	633,210,000	36	12	633,210,000	36	12	175,344,000	27.69	34.31
49	KEC. SAWIT	752,700,000	32	12	752,700,000	32	12	51,522,704	6.85	18.23
50	KEC. SELO	626,376,000	35	12	656,376,000	36	12	104,157,500	15.87	23.61
51	KEC. SIMO	465,950,000	32	9	460,950,000	31	10	21,670,608	4.7	16.92
52	KEC. TERAS	891,270,000	36	12	891,270,000	36	12	79,432,040	8.91	46.55
53	KEC. WONOSEGORO	831,800,750	34	12	890,801,000	35	12	53,213,236	5.97	23.97
54	Kelurahan Banaran	234,000,000	19	7	234,000,000	20	7	30,376,039	12.98	6.25
55	Kelurahan Kemiri	726,450,000	22	6	169,050,000	20	6	23,004,025	13.61	23.75
56	Kelurahan Mojosongo	624,150,000	23	7	374,150,000	24	7	41,377,749	11.06	117.37
57	Kelurahan Pulisen	200,200,000	17	8	200,200,000	20	6	37,240,987	18.6	45.42
58	Kelurahan Sambeng	249,300,000	25	8	249,300,000	18	5	0	0	0
59	Kelurahan Siswodipuran	234,240,000	21	6	234,240,000	21	6	48,140,000	20.55	51.19
60	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG	92,420,000,000	3	3	100,308,294,000	3	2	14,740,870,300	14.7	27.78
61	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIMO	28,510,500,000	3	3	26,030,927,000	3	2	12,178,859,195	46.79	8.33
62	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARAS WIRIS	26,120,000,000	4	3	19,204,146,000	5	4	820,498,878	4.27	5

63	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5,350,442,000	31	7	5,203,770,000	26	7	119,948,000	2.31	68.27
64	SEKRETARIAT DAERAH	26,746,481,000	31	4	5,474,284,000	24	4	570,828,148	10.43	32.97
65	SEKRETARIAT DPRD	32,320,232,000	25	5	28,320,232,000	29	6	4,161,134,461	14.69	24.23
<b>TOTAL</b>		825,319,278,750	1,930	56 3	880,859,304,000	1,902	56 1	51,006,742,302	9.05	23.02

Sumber: Data Analisis BP3D 2017

Jumlah anggaran APBD 2017 sejumlah Rp880.712.825.000,00 ini termasuk anggaran yang ada di 6 kelurahan yaitu sejumlah Rp1.460.940.000,00. Sebagai catatan, anggaran untuk 6 kelurahan tersebut sudah masuk dalam RKPD Kabupaten Boyolali 2017 dan sudah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Boyolali 2017. Perincian untuk alokasi untuk masing-masing tersebut adalah sebagai berikut: Kecamatan Boyolali mencakup Kelurahan Banaran sebesar Rp234.000.000,00, Kelurahan Siswodipuran sebesar Rp234.240.000,00 dan Kelurahan Pulisen sebesar Rp200.200.000,00. Kecamatan Mojosongo terdiri dari Kelurahan Mojosongo sebesar Rp374.150.000,00 dan Kelurahan Kemiri sebesar Rp169.050.000,00. Kecamatan Juwangi terdiri dari Kelurahan Sambeng sebesar Rp249.300.000,00.

Adapun kesesuaian kegiatan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2017 dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 terangkum pada Tabel II.84 berikut:

Tabel II.84  
Rekapitulasi Kesesuaian Kegiatan  
antara RKPD Dan APBD Tahun 2017

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / UNIT ORGANISASI /UPT	RKPD		APBD
		(+) APBD	(-) APBD	(-) RKPD
	1	2	3	4
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	38	0	0
2	BADAN KEUANGAN DAERAH	59	4	3
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	32	3	6
4	BADAN PERENCANA, LIT DAN BANG	44	8	2
5	BAGIAN HUKUM DAN HAM	6	0	0
6	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6	0	0
7	BAGIAN ORGANISASI	6	0	3
8	BAGIAN OTONOMI DAERAH	7	8	6
9	BAGIAN PEMBANGUNAN	2	1	2
10	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	17	2	3

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / UNIT ORGANISASI /UPT	RKPD		APBD
		(+) APBD	(-) APBD	(-) RKPD
11	BAGIAN PEREKONOMIAN	6	0	1
12	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	9	0	0
13	BAGIAN UMUM	10	2	1
14	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	29	1	0
15	DINAS KESEHATAN	49	2	1
16	DINAS KETAHANAN PANGAN	29	6	1
17	DINAS KOMINFO	19	7	9
18	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA	50	6	1
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	39	2	2
20	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	38	1	0
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	32	2	3
22	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	46	0	0
23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)	23	5	2
24	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	63	11	2
25	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	43	0	6
26	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN	34	1	3
27	DINAS PERHUBUNGAN	30	2	3
28	DINAS PERTANIAN	42	2	4
29	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	18	0	0
30	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	18	13	12
31	DINAS SOSIAL	31	5	2
32	DISDUKCAPIL	28	2	4
33	INSPEKTORAT	30	1	2
34	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	34	0	0
35	KEC. AMPEL	32	2	1
36	KEC. ANDONG	34	1	1
37	KEC. BANYUDONO	30	0	0
38	KEC. BOYOLALI	33	1	0
39	KEC. CEPOGO	34	1	1
40	KEC. JUWANGI	29	1	2
41	KEC. KARANGGEDE	27	3	4

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / UNIT ORGANISASI /UPT	RKPD		APBD
		(+) APBD	(-) APBD	(-) RKPD
42	KEC. KEMUSU	27	4	5
43	KEC. KLEGO	32	4	4
44	KEC. MOJOSONGO	28	2	2
45	KEC. MUSUK	30	7	7
46	KEC. NGEMPLAK	33	2	1
47	KEC. NOGOSARI	34	6	1
48	KEC. SAMBI	35	1	1
49	KEC. SAWIT	30	2	2
50	KEC. SELO	35	0	1
51	KEC. SIMO	25	7	6
52	KEC. TERAS	36	0	0
53	KEC. WONOSEGORO	34	0	1
54	Kelurahan Banaran	13	6	7
55	Kelurahan Kemiri	20	2	0
56	Kelurahan Mojosongo	21	2	3
57	Kelurahan Pulisen	14	3	6
58	Kelurahan Sambeng	15	10	3
59	Kelurahan Siswodipuran	21	0	0
60	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG	2	1	1
61	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIMO	2	1	1
62	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARAS WIRIS	4	0	1
63	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	26	5	0
64	SEKRETARIAT DAERAH	20	11	4
65	SEKRETARIAT DPRD	24	1	5
<b>Total</b>		<b>1747</b>	<b>183</b>	<b>155</b>

*Sumber: Olah Data BP3D 2017.*

Dari hasil Evaluasi RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan yang direncanakan di RKPD Tahun 2017 dan kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Tahun 2017 sebanyak 1.747 kegiatan.
2. Kegiatan yang direncanakan di RKPD Tahun 2017 namun tidak masuk dalam APBD Tahun 2017 sebanyak 183 kegiatan.
3. Kegiatan APBD Tahun 2017 yang tidak direncanakan dalam RKPD 2017 sebanyak 155 kegiatan.

Dari uraian diatas dapat digambarkan irisan sebagai berikut:

RKPD

APBD

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 1.902 kegiatan, dengan tingkat kesesuaian kegiatan =  $(1.747/1.902) \times 100\% = 91,85\%$

3.2.22 Realisasi Capaian RPJMD

Untuk prediksi capaian RPJMD periode 2016-2021 Secara detail belum dapat disampaikan karena pelaksanaan RPJMD 2016-2021 pada pelaksanaan tahun pertama yaitu tahun 2017 masih dalam proses pelaksanaan, sehingga realisasi capaiannya baru dapat tersaji pada Tahun N+1 atau tahun 2018.

Sedangkan realisasi capaian RPJMD Tahun 2016 belum dapat disajikan karena tahun 2016 merupakan masa transisi yang pada pelaksanaannya sudah tidak menggunakan indikator kinerja berdasarkan RPJMD 2010-2015. Indikator kinerja dalam RPJMD 2016-2021 dapat dilakukan pada semester penyusunan RPJMD 2016-2021 proses penyelesaian penyusunan dengan penyusunan Organisasi

Realisasi capaian RPJMD Tahun 2015 tersaji pada tabel II.85 berikut:

Tabel II.85  
Realisasi Capaian RPJMD Tahun 2015  
Kabupaten Boyolali



No.	Prioritas	Jumlah Indikator Kinerja	Capaian RPJMD s.d. 2015 (%)
1	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	50	109,92
2	Pendidikan	48	103,19
3	Kesehatan	81	107,02
4	Penanggulangan Kemiskinan	13	132,25
5	Ketahanan Pangan	94	144,72
6	Infrastruktur	22	102,26
7	Iklim Investasi dan Usaha	32	116,69
8	Lingkungan Hidup dan Bencana	27	101,81
9	Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi	9	106,58
10	Perekonomian	17	73,37
11	Kesejahteraan Rakyat	30	114,59
12	Politik, Hukum dan Keamanan	9	95,96
J u m l a h		432	1.251,00
R a t a – R a t a C a p a i a n			109,03

### 3.2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi nyata saat perencanaan disusun. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan dengan berdasarkan hasil gambaran umum kondisi daerah dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, serta mendasarkan pada hasil evaluasi RKPD Triwulan I Tahun 2016 dan capaian RPJMD periode sebelumnya. Secara umum permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 dikelompokkan dalam 6 (enam) bidang yaitu:

1. Permasalahan tata kelola pemerintahan, antara lain meliputi:
  - a. Belum optimalnya implementasi standar pelayanan;
  - b. Belum optimalnya harmonisasi dan implementasi regulasi;
  - c. Belum optimalnya rasio kecukupan kualitas dan kuantitas SDM aparatur dengan kompetensi khusus sesuai fungsi yang dibutuhkan masih kurang;
  - d. Belum optimalnya tingkat kemandirian keuangan daerah;
  - e. Belum optimalnya sinergitas dan integrasi sistem perencanaan dan penganggaran;
  - f. Belum optimalnya kemampuan Perangkat Daerah dalam mengartikulasikan kebutuhan masyarakat masih kurang;
  - g. Belum optimalnya implementasi dokumen kajian untuk kebijakan teknis masih rendah;
  - h. Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan;
  - i. Belum optimalnya ketersediaan data dasar yang akurat dan tepat waktu; dan
  - j. Belum optimalnya sistem pengelolaan arsip.
2. Permasalahan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana wilayah, antara lain meliputi:
  - a. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar, penunjang, sosial dan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
  - b. Belum optimalnya pengelolaan tata guna lahan sesuai dengan peruntukannya; dan
  - c. Belum optimalnya pemanfaatan pengembangan energi terbarukan.
3. Permasalahan tingkat kesejahteraan, antara lain meliputi:
  - a. Belum optimalnya penanganan kemiskinan dan pengangguran;
  - b. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas pelayanan pendidikan, dan kesejahteraan;
  - c. Belum optimalnya pemanfaatan peran perempuan, dan perlindungan ibu dan anak; dan
  - d. Belum optimalnya penanganan kerawanan sosial.
4. Permasalahan daya saing perekonomian daerah berbasis potensi lokal, antara lain meliputi:
  - a. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur dan pemanfaatan

Teknologi Informasi;

- b. Belum optimalnya pelestarian budaya dan pengembangan potensi wisata;
  - c. Belum optimalnya fungsi kelembagaan masyarakat;
  - d. Belum optimalnya pengembangan Usaha Menengah Keuangan Mikro (UMKM);
  - e. Belum optimalnya tingkat keragaman konsumsi pangan masyarakat;
  - f. Belum optimalnya produktivitas pertanian, masih rendahnya pemasaran produk pertanian serta masih maraknya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian; dan
  - g. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana (sarpras) perdagangan, pengembangan nilai tambah produk unggulan dan akses permodalan.
5. Permasalahan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan, antara lain belum optimalnya penanganan persampahan, pencemaran, dan bencana alam.
6. Permasalahan kondusifitas lingkungan sosial, politik, hukum, ketertiban dan keamanan:
- a. Belum optimalnya kesadaran masyarakat berdemokrasi; dan
  - b. Belum optimalnya penanganan gangguan ketertiban umum, dan penyakit masyarakat.